



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG

Bunga Rampai

"Pelestarian Budaya dan Sejarah Lokal"

Rektorat
 Layanan

Editor

Dr. Mumuh Muhsin Z., M.Hum



306.4824 BUN

Bunga Rampai

Pelestarian Budaya Dan Sejarah Lokal

Bunga Rampai
Pelestarian Budaya Dan Sejarah Lokal

Editor
Mumuh Muhsin Z.

CV. IZDA PRIMA
Jl. Sukamenak Komp. Permata Kopo E 12

Bunga Rampai
Pelestarian Budaya Dan Sejarah Lokal

ISBN

Editor

Mumuh Muhsin Z.

Dicetak oleh :

CV. IZDA PRIMA

Jl. Sukamenak Komp. Permata Kopo E 12

SAMBUTAN KEPALA

BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG

Sesuai dengan program kerja TA 2012, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung melaksanakan serangkaian penerbitan mengenai kebudayaan dan sejarah di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi kantor sebagai unit pelaksanaan teknis yang bergerak dalam pelestarian, yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian bidang kebudayaan dan kesejarahan.

Hasil penelaahan atau pengkajian para peneliti BPSNT Bandung, baik berupa buku maupun laporan-laporan penelitian dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebudayaan. Tentunya hal dimaksud bukan sekedar “berpameran” kekayaan, namun lebih bersifat informasi kepada pembaca untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Sejumlah tulisan kebudayaan dan kesejarahan itu antara lain dipublikasikan dalam bentuk *Bunga Rampai*. Pada edisi pertama tahun 2012 ini *Bunga Rampai* terbit dengan tema *Pelestarian Budaya dan Sejarah Lokal*.

Selanjutnya, selaku kepala kantor, kami turut bergembira dan menyampaikan ucapan terimakasih, terutama kepada para penulis dan editor yang telah memberikan hasil pemikiran di bidang kebudayaan dan kesejarahan. Semoga *Bunga Rampai* ini dapat memperkaya literatur kesejarahan dan kebudayaan serta bermanfaat bagi upaya pelestarian kebudayaan

Bandung, Juni 2012

Kepala,

Drs. Toto Sucipto

NIP 196504201991031001

PELESTARIAN BUDAYA DAN SEJARAH LOKAL

Sering terdengar sebuah imbauan yang disampaikan oleh para pejabat atau pemimpin: “mari kita lestarikan budaya leluhur kita” dan kalimat-kalimat imbauan lain yang senada dengan itu. Terhadap kalimat himbauan tersebut muncul sejumlah pertanyaan: mungkinkah budaya dilestarikan? Bagian mana dari kebudayaan itu yang harus dilestarikan? Seluruhnya secara utuh atau bagian tertentu saja? Mengapa budaya itu harus dilestarikan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terlebih dahulu akan dibahas dua pengertian: “pelestarian” dan “budaya” dari segi bahasa.

“Pelestarian” berasal dari kata “lestari”. Dari kata dasar “lestari” muncul kata-kata jadian seperti melestarikan, pelestarian, dan kelestarian. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **les·ta·ri** *a* tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal;
- **me·les·ta·ri·kan** *v* menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah; membiarkan tetap seperti keadaan semula; mempertahankan kelangsungan (hidup dan sebagainya);
- **pe·les·ta·ri·an** *n* 1 proses, cara, perbuatan melestarikan; 2 perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi;
- **ke·les·ta·ri·an** *n* keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berubah-ubah.

Berikutnya kata “budaya”. Dari kata dasar ini muncul sejumlah kata jadian: berbudaya, membudaya, membudayakan,

pembudayaan, kebudayaan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian kata-kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **bu·da·ya** *n* **1** pikiran; akal budi; **2** adat istiadat; **3** sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); **4** *cak* sesuatu yg sudah menjadi kebiasaan yg sudah sukar diubah;
- **ber·bu·da·ya** *v* mempunyai budaya; mempunyai pikiran dan akal yg sudah maju;
- **mem·bu·da·ya** *v* menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging;
- **mem·bu·da·ya·kan** *v* **1** mengajar supaya mempunyai budaya; mendidik supaya beradab (berbudaya); **2** membiasakan suatu perbuatan yang baik sehingga dianggap sebagai berbudaya;
- **pem·bu·da·ya·an** *n* **1** proses, cara, perbuatan membudayakan; **2** *Antr* proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yg mantap;*
- **ke·bu·da·ya·an** *n* **1** hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; **2** *Antr* keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Kebudayaan adalah *instrument* bagi manusia supaya bisa *survive* di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kebudayaan bersifat dinamis sejalan dengan tingkat tantangannya. Dengan demikian, karakter pasti yang melekat pada kata kebudayaan adalah sifat “berubah dan berkembang”. Dengan demikian, berdasarkan analisis kebahasaan, frase “pelestarian budaya” merupakan “*contradictio in terminis*”. Oleh karena itu, frase tersebut hendaklah dibaca/ditafsirkan sebagai “revitalisasi nilai-nilai budaya”.

Tidak semua budaya leluhur perlu diwarisi oleh generasi berikutnya. Hanya budaya yang berkualitas dan budaya yang masih memiliki nilai fungsional bagi kepentingan kekinian yang perlu diwarisi. Dengan kata lain, hanya budaya *adiluhung* yang perlu diwarisi. Budaya *adiluhung* adalah kebudayaan luhur yang diciptakan untuk mencapai tujuan luhur; kebudayaan yang bernilai tinggi untuk selanjutnya dijadikan pedoman hidup. Setiap individu selayaknya menjadi pendukung kebudayaan etnisnya, dan secara moral berkewajiban “melestarikan”-nya.

Dalam buku yang ada di hadapan pembaca sekarang ini disuguhkan beberapa tulisan mengenai kebudayaan, yaitu: Makanan Khas Cirebon, Tradisi Pemberian dalam Upacara Tradisional, dan Batik. Makanan khas Cirebon merupakan hasil kecerdasan lokal masyarakat Cirebon masa lalu. Selain karena alasan nostalgis-romantis, secara pragmatis pun makanan tradisional Cirebon masih fungsional untuk tetap dihidupkan pada masa kini dan mungkin juga pada masa mendatang. Memang kenyataannya demikian. Makanan khas Cirebon tidak hanya makin tumbuh dan berkembang di wilayah Cirebon namun meluas ke wilayah-wilayah lain yang tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga ke Jawa Tengah. Ini menjadi bukti jelas masyarakat berterima dengan warisan leluhur masyarakat Cirebon itu. Pada sisi lain, mengenai tradisi pemberian dalam upacara tradisional tampaknya kurang mendapat tempat yang leluasa untuk hidup subur pada masa kini. Kalaupun “jejak” tradisi pemberian masih ada pada masa sekarang, itu sangat terbatas, misalnya pada momentum hari raya Idul Fitri atau *lebaran*. Secara alami, masyarakat mempunyai logikanya sendiri untuk mempertimbangkan apakah tradisi ini perlu diwarisi atau tidak.

Mengenai batik sendiri terdapat perkembangan yang fenomenal atau, setidaknya, menjadi isu yang menasional. Kenyataan itu, memang perlu diakui sebagai “berkah tidak langsung”

(*blessing in disguise*) dari klaim negara tetangga terhadap kepemilikan batik sebagai warisan tradisi leluhurnya. Hal tersebut tak pelak lagi memicu bangkitnya emosi nasionalisme perbatikan. Sejak saat itu terjadi *booming* produksi batik di negeri ini. Sentra-sentra batik di Jawa Barat sendiri terkena pengaruh positif dari kejadian itu. Di wilayah-wilayah Jawa Barat yang secara historis tidak memiliki tradisi perbatikan pun terpacu dan terpacu untuk memproduksi batik dengan kekhasan yang mencerminkan potensi daerahnya sendiri. Daerah yang dimaksud adalah Kota Cimahi.

Sejalan dengan *booming*-nya perbatikan muncul persoalan lain yang berpotensi mematikan perbatikan yang diproduksi secara tradisional di Jawa Barat. Di Jawa Barat batik diproduksi dengan cara ditulis dan dicap. Tentu saja produksi dengan cara ini produktivitasnya agak terbatas. Konsekuensinya adalah harga batiknya pun agak tinggi. Dalam perkembangan kemudian muncul jenis batik yang diproduksi secara *printing*. Batik *printing* ini produktivitasnya sangat tinggi, harganya pun lebih rendah. Akibatnya adalah produksi batik tradisional Jawa Barat tidak sanggup bersaing dengan batik *printing* itu. Untuk memediasi persoalan yang berpotensi konflik ini diperlukan keterlibatan pemerintah yang memiliki *political will* yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan idealisme kultural.

Mengungkap beberapa aspek budaya dari beberapa daerah di Jawa Barat ini diharapkan masyarakat Jawa Barat dapat mengapresiasi budaya warisan leluhurnya. Pada sisi lain, terdapat tindak lanjut dari apresiasi itu, adalah mewarisi nilai budaya itu bagi kepentingan-kepentingan praktis kehidupan aktual sekarang ini.

Selain tulisan-tulisan mengenai kebudayaan, buku ini pun menyuguhkan empat tulisan sejarah yang terdiri atas tiga tulisan mengenai substansi, yakni sejarah lokal beberapa daerah di Jawa Barat, dan satu tulisan mengenai teori. Ketiga tulisan substansi

adalah Sejarah Ujungberung, Sejarah Kota Sukabumi, dan Peristiwa Berdarah di Rawagede. Tulisan mengenai sejarah Ujungberung ini memiliki arti penting tersendiri karena beberapa hal. Pertama, tulisan yang lingkup spasialnya sangat sempit ini belum banyak diungkap dan dikerjakan. Oleh karena itu penelitian dan penulisan mengenai sejarah Ujungberung ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Kedua, Ujungberung ternyata memiliki akar sejarah yang cukup panjang, bahkan beririsan dengan sejarah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Dengan demikian, mengungkap sejarah Ujungberung akan berkontribusi bagi sejarah Bandung pada umumnya.

Sejarah Sukabumi dari berbagai sisi dan sudut pandang sebenarnya sudah cukup banyak dikerjakan, setidaknya dalam bentuk skripsi. Akan tetapi tidak ada larangan menulis kembali sejarah. Tentu saja dengan sudut pandang yang berbeda atau terjadi perluasan dan penajaman dari yang sudah ada. Dalam tulisan ini diuraikan perubahan dan perkembangan status sukabumi dari sebuah perkampungan sampai menjadi kota.

Belakangan ini peristiwa berdarah Rawagede banyak diangkat dalam berbagai media massa sehubungan dengan pengabulan tuntutan ganti rugi pihak keluarga korban kepada Pemerintah Belanda. Penulisan kembali peristiwa tersebut dalam buku ini diharapkan lebih mengikat kembali memori kolektif anak bangsa terhadap masa lalu sejarah bangsanya.

Terakhir adalah tulisan mengenai biografi. Tema biografi merupakan tema tulisan sejarah yang sangat terbuka untuk dikerjakan oleh siapa pun yang punya kemampuan menulis. Tema biografi sampai sekarang masih merupakan lahan garapan yang amat luas dan belum banyak digarap. Dari sisi keilmuan pun akan banyak manfaat dari penulisan biografi itu.

Oleh karena itu, tulisan mengenai biografi ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk memproduksi tulisan-tulisan biografi.

Bandung, 11 Juni 2011

Mumuh Muhsin Z.
(editor)

Sumber:

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

(11 Juni 2012)

Koentjaraningrat. 1992.

Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta:

Gramedia.

..... 2009.

Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi revisi. Jakarta: Rneka

Cipta.

Rahyono, F.X. 2009.

Kearifan Budaya dalam Kata. Jakarta: Wedatamawid-

yasastra.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA	i
PELESTARIAN BUDAYA DAN SEJARAH LOKAL	iii
DAFTAR ISI	ix
BATIK TULIS DAN CAP VERSUS PRINTING BATIK	1- 19
<i>Ria Intani T</i>	
BATIK CIMAH	20 - 39
<i>Lasmiyati</i>	
MAKANAN KHAS CIREBON	40 – 65
<i>Hermana</i>	
PENGAJIAN NASKAH KUNA	66 – 84
<i>Agus Heryana</i>	
KOTA SUKABUMI DALAM LINTASAN SEJARAH	85 - 111
<i>Herry Wiryono</i>	
PERISTIWA BERDARAH DI RAWAGEDE	112 - 127
<i>Adeng</i>	
KEMANDIRIAN PANGANPADA MASYARAKAT TRADISIONAL	128 – 143
<i>Nina Merlina</i>	
SELINTAS SEJARAH KECAMATAN UJUNGBERUNG	144 - 158
<i>Euis Thresnawaty S</i>	
BIOGRAFI	159 – 176
<i>Heru Erwantoro</i>	
TRADISI PEMBERIAN DALAM UPACARA TRADISIONAL	177 – 196
<i>Irvan Setiawan</i>	

BATIK TULIS DAN CAP VERSUS PRINTING BATIK

Kasus Perbatikan di Jawa Barat

Ria Intani T.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail: ria_intani@yahoo.com

ABSTRACT

*Batik*s from West Java are divided into *Batik*s from inlands and *Batik*s from coastal. The division of these two regions showed typical *Batik*s in each area, especially in styles and colors. Prior to the recognition of *Batik*s as an Indonesian cultural heritage by UNESCO, the producers of *Batik*s in West Java were Ciamis, Garut, Tasik, Indramayu, Cirebon, and Sumedang. Now after the recognition of the world, there are many new crafters and new typical *batiks* area. The New *Batik*s means that these *batiks* are reborn from their extinctions. Among a number of *Batik*s' producers, *Batik*s from Cirebon are the only *Batik*s that grow rapidly. Unfortunately *Batik*s from Cirebon are still unexcelled from *Batik*s from Pekalongan. This unexcellence was particularly due to the invention of *Batik*s Printing, the cloths with *Batik* patterns. Meanwhile Ciamis, Garut, Tasik, Indramayu, and Sumedang survive on traditional *batiks*, stamped *Batik*s and *Batik*s combination to both traditional and stamped. This is certainly not the *Batik*s entrepreneurs' faults. The original *batiks* are *batiks* which have to pass the *batiks* processing principles. *Batik*s printing are not *batiks*,

but the cloths with batiks pattern. So, according to the trending of Batiks printing, it is necessary to build a preservation of the entrepreneurs and their batiks works.

Keywords: batiks, batiks preservation.

PENDAHULUAN

Pengertian batik tidak bisa dilepaskan dari proses pemalaman, pewarnaan, dan penghilangan malam. **Proses pemalaman** merupakan tahap pembentukan ragam hias di atas kain. **Proses pewarnaan** adalah mewarnai kain yang tidak tertutup malam. **Proses penghilangan malam** merupakan tahapan untuk menampakkan tapak malam sesuai dengan warna dasar kain. Prinsip proses inilah yang membedakan antara batik tulis dengan printing batik. Ken Atik Djatmiko, staf pengajar seni kriya di Institut Teknologi Bandung (ITB) menjelaskan bahwa kata batik berasal dari bahasa Jawa *ambatik* (*anulis* atau *anyerat*) yang berarti menulis (dalam arti yang luas disebut menggambar). Secara teknis, batik adalah menuliskan atau menorehkan titik-titik ke atas selembar kain mori dengan menggunakan canting yang berisi *malam* (lilin) panas. Pada printing batik, produk tersebut tidak melalui proses pematikan. Tak ada malam (lilin) panas yang ditorehkan di atas kain.

Secara garis besar, ada dua aliran batik di Pulau Jawa, yakni batik pedalaman dan pesisiran. Di luar Jawa Barat, batik pedalaman dikenal dari Solo dan Jogja, sedang batik pesisiran dikenal dari Pekalongan. Di Jawa Barat, batik pedalaman dikenal dari Ciamis dengan sebutan batik *Ciamisan*, dari Tasik dengan sebutan batik *Tasikan*, dan dari Garut dengan sebutan batik *Garutan*. Batik pesisiran dikenal dari Indramayu dengan sebutan batik *Dermayon* dan dari Cirebon dengan sebutan batik *Kacirebonan*.

Perbedaan antara kedua aliran tersebut, pedalaman dan

pebisiran, terletak pada ada-tidaknya kandungan makna yang melekat di dalam ragam hiasnya. Ragam hias pada batik pedalaman sebagian mengekspresikan alam sekitar, sedang sebagian lain mengandung makna simbolis. Sebaliknya, ragam hias pada batik pesisiran bebas, tidak terikat oleh nilai-nilai simbolis. Ragam hias batik pesisiran menggambarkan kekayaan laut. Perajin batik di Indramayu mengangkat *iwak etong* dan *urang ayu* (udang) yang merupakan hasil laut Indramayu sebagai motif batik mereka. Terkecuali untuk Cirebon, Cirebon memiliki keraton sebagai pemangku budaya dan oleh karenanya ragam hias batiknya yang berkiblat ke keraton kental dengan kandungan makna.

Selain perbedaan itu, secara visual kedua aliran batik berbeda dalam penggunaan warna. Warna-warna batik pada batik pedalaman cenderung ke arah warna gelap, sedangkan warna-warna pada batik pesisiran cenderung ke arah warna terang, berkesan meriah. Ragam hias batik pesisiran mencerminkan berbagai pengaruh budaya lain. Hal ini terjadi karena kawasan pesisiran merupakan kawasan berlabuhnya kapal-kapal dari belahan penjuru, pulau, dan bahkan negara. Pesisir adalah tempat bertemunya antarbudaya.

Nian S. Djoemena (1986:1) mengatakan bahwa hasil lukisan atau ragam hias batik, umumnya sangat dipengaruhi dan erat hubungannya dengan faktor-faktor seperti: letak geografis daerah pembuatan batik yang bersangkutan, sifat dan tata cara penghidupan daerah yang bersangkutan, adat istiadat dan kepercayaan daerah yang bersangkutan, keadaan alam sekitarnya termasuk flora dan faunanya, serta adanya kontak atau hubungan antardaerah pembatikan.

Sebagai produk komoditas, batik pesisiran mudah menembus pasar. Selain karena tidak ada batasan dalam penggunaannya, batik pesisiran juga mudah menyesuaikan dengan selera pasar. Dampak positifnya adalah permintaan pasar menjadi melambung sehingga berakibat ada desakan untuk mempercepat proses dalam pembuatan

batik. Pengusaha batik kemudian dituntut untuk berinovasi dalam teknik produksi. Lahirlah kemudian teknik membuat batik dengan menggunakan media cap. Kalau semula hanya ada batik tulis, yakni batik yang diproses dengan menggunakan canting, maka kelahiran teknik baru ini menjadikan ada batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap. Batik cap yakni batik yang diproses dengan dicap, dengan menggunakan media berupa alat cap berbahan tembaga. Adapun batik kombinasi tulis dan cap adalah batik yang dibuat dengan menggabungkan teknik tulis dan cap.

Kelahiran batik cap dan batik kombinasi tulis dan cap berdampak negatif pada tradisi batik tulis. Batik tulis menjadi terpinggirkan oleh karena harganya yang mahal harus berhadapan dengan batik kombinasi tulis dan cap yang lebih murah, dan apalagi dengan batik cap yang harganya jauh lebih murah.

Seiring meningkatnya permintaan batik, proses pengecapan juga dirasakan tidak lagi dapat mengejar target, dalam arti mengejar secara kuantitas. Pebisnis membaca peluang ini dengan membuat kain bermotifkan batik. Kain ini diproses dengan diprinting atau dengan dicetak mesin. Kain printing ini muncul pada dekade tahun 1970-an.

Ada pengetahuan dasar yang bisa dipegang untuk membedakan antara batik tulis, batik cap, dan printing batik. Pada batik tulis, pengulangan motif dalam sehelai kain tidak akan persis sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena motif batik tulis ditulis/digambar langsung dengan tangan di atas kain dengan menggunakan canting. Pada batik cap, apabila perajinnya cermat, maka motif akan tampak lebih rapi ketimbang batik tulis. Motif yang berulang bentuknya akan sama persis. Namun demikian apabila perajinnya kurang cermat, bisa terjadi warna di salah satu sisi motif akan terlihat agak tebal karena saat pengecapan terjadi sedikit penumpukan motif. Adapun printing motif batik terlihat lebih rapi

lagi. Dari segi kualitas, batik cap tidak dapat menyamai atau mengimbangi batik tulis. Apalagi printing motif batik, produk ini tidak dapat menyamai atau mengimbangi batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan batik tulis.

Dekade tahun 1980-an, tepatnya sejak kemunculan printing motif batik, batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap, mengalami kemunduran yang drastis. Kemunduran ini bisa terjadi oleh karena printing motif batik dapat sampai ke tangan konsumen dengan harga relatif lebih murah dibandingkan dengan batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan apalagi dengan batik tulis. Selain itu juga corak dan warnanya lebih beragam.

Menjamurnya printing motif batik di satu sisi merugikan pengusaha batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis dan cap, namun demikian di sisi lain menggembirakan pengguna batik secara umum. Para pengguna batik memiliki banyak pilihan corak dan warna dengan besaran harga yang sangat terjangkau. Kondisi ini memungkinkan munculnya dugaan/pertanyaan bagi mereka yang bergelut dalam dunia perbatikan, yakni pengusaha, perajin, sekaligus pemerhati batik.

Dugaan pertama yang muncul adalah kemungkinan para pengguna batik sebenarnya paham dengan apa yang dimaksud dengan batik. Namun demikian mereka harus mengabaikannya demi dapat mengenakan batik dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus dengan pilihan warna dan corak yang lebih beragam. Penjaja printing motif batik nyaris bertebaran di mana-mana. Printing motif batik hampir tak lepas dari pandangan mata, khususnya dalam bentuk busana dan sebagian lain dalam bentuk kain, dengan beragam warna dan coraknya. Berbeda dengan batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan terutama batik tulis, baik itu penajanya, warna dan coraknya tidak sebanyak printing motif batik. Kondisi demikian memperkecil peluang konsumen batik untuk memilih batik cap, batik

kombinasi tulis dan cap, dan apalagi batik tulis. Dugaan kedua adalah para pengguna printing motif batik bukan mengejar besaran harga batiknya yang murah, melainkan memang mereka awam pada apa yang dimaksud dengan batik. Mereka membeli dari sekadar melihat coraknya yang menyerupai atau bahkan sama dengan batik.

GELIAT BATIK

Batik sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dari Indonesia terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2009 oleh UNESCO (Badan PBB untuk urusan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan). Terkait dengan penetapan itu, selanjutnya tanggal 2 Oktober oleh pemerintah dicanangkan sebagai Hari Batik Nasional. Implementasinya adalah pada setiap tanggal 2 Oktober, instansi-instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya, mewajibkan karyawan/karyawatnya untuk berpakaian batik. Gerakan berpakaian batik dalam rangka Hari Batik Nasional sifatnya bukan saja regional, tetapi nasional, berlaku seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kewajiban berpakaian batik bukan saja diberlakukan dalam peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga di hari-hari yang lain. Di tingkat regional misalnya, penggunaan batik oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung No. 508 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemkot Bandung. Melalui Perwal tertanggal 29 Mei 2009 tersebut, setiap hari Jumat, semua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Bandung diharuskan mengenakan batik lengan pendek.

Tampaknya pemakaian batik bukan hanya dilakukan di kalangan pemerintah dan BUMN. Kantor-kantor swasta dan sekolah-sekolah negeri atau swasta pun demikian. Bahkan, pengisi acara

dalam berbagai kegiatan, juga melakukan hal yang sama. Partisipan yang disebutkan terakhir tadi menunjukkan kepada kita betapa mereka sangat mengapresiasi penggunaan pakaian batik.

Di beberapa sekolah, siswa dan guru mengenakan pakaian batik pada kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas pada peringatan Hari Batik Nasional dan hari-hari tertentu. Demikian pula dengan kantor-kantor swasta. Tak kalah, para pengisi acara-acara musik, pembaca berita, pengisi acara dialog dan lain-lain di stasiun-stasiun televisi, beraksi dalam balutan batik. Sebut saja di antaranya Giring Niji. Pada suatu acara pentas musik, vokalis yang energik tersebut tampil dengan balutan jaket batik. Juga Ayu Ting Ting, pedangdut penyebar *Alamat Palsu* itu, tampil di satu acara stasiun televisi dengan celana pendek batik bermotifkan *mega mendung*. Pemakaian batik tersebut tentunya merupakan dukungan dan apresiasi masyarakat, bukan saja dalam rangka Hari Batik Nasional, melainkan dukungan atas penetapan batik sebagai warisan budaya dari Indonesia.

Dukungan terhadap batik semakin hari tampaknya semakin meluas. Meluas dalam ruang dan waktu. Sebelum adanya penetapan dari UNESCO, batik identik dengan busana/pakaian untuk resepsi yang dikenakan oleh kalangan tua. Orang cenderung enggan mengenakan pakaian batik jika tidak terpaksa.

Citra batik seperti di atas sudah tak berlaku lagi. Dewasa ini, sebagai busana/pakaian, batik dikenakan oleh semua kalangan usia di beragam acara/kegiatan. Batik dikenakan dari mulai kalangan tua sampai kanak-kanak. Batik sudah bukan lagi hanya sebagai pakaian resmi, melainkan sudah menjadi pakaian sehari-hari yang lumrah dikenakan oleh siapa saja. Sudah tentu penetapan UNESCO membawa angin segar bagi perajin batik di tanah air.

Batik kini mengalami metamorfosa. Bukan saja dari segi citra dan pemakainya, melainkan mengarah pula ke warna. Warna-warna batik yang diproduksi sekarang ini tidak lagi bersifat alami

seperti coklat, hitam, atau hijau batu, yang lebih pas dikenakan oleh kalangan tua. Warna-warna batik sekarang ada pink, orange, nila, ungu, dan lain sebagainya. Warna-warna tersebut bisa masuk ke semua kalangan usia. Kesan batik yang mencuat kemudian adalah bukan saja hanya bisa menjadi pakaian resmi, melainkan bisa pula menjadi pakaian santai yang kasual. Batik bisa menjadi celana pendek dan celana panjang untuk acara santai maupun setengah resmi, bisa menjadi kemeja bermodelkan kemeja jins, bisa menjadi rompi, blus ala balon, ala kelelawar, ala Maroko, ala piyama, ala *babydoll*, dan lain sebagainya. Tentu saja metamorfosa ini memperluas jumlah pemakai dan tempat pemakaian. Sehari-hari, kini banyak kita temui orang berbusana/berpakaian batik. Bukan saja di lingkungan perkantoran, sekolah, dan acara hajatan, melainkan pula di *mall*, di pasar, di acara reuni, di acara buka bersama, di stasiun-stasiun televisi, di acara arisan, di waktu Jumatan, di saat melaksanakan shalat Idul Fitri di lapangan atau di masjid, di lingkungan tempat anak-anak bermain, dan lain sebagainya. Eksistensi batik pasca pengukuhan UNESCO semakin menguat.

Memasyarakatnya batik seperti sekarang ini memang sangat diharapkan, oleh karena empat tahun pasca ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dari Indonesia, UNESCO akan terus memantau dan memberi penilaian. Ada empat hal yang akan dinilai, yakni: apakah betul pemerintah Indonesia memiliki kepedulian terhadap batik, apakah betul Indonesia memiliki perajin batik, apakah ada regenerasi perajinnya, dan apakah ada yang mencintai batik dan menggunakannya. Apabila hasil penilaian selama empat tahun itu tidak baik, maka tidak menutup kemungkinan pengakuan itu akan dicabut.

Berbagai kegiatan kemudian dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan penetapan batik sebagai warisan budaya dari Indonesia oleh UNESCO. Sebut saja satu di antaranya adalah World

Batik Summit 2011 yang dibuka oleh orang nomor satu di Indonesia pada tanggal 28 September, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta. World Batik Summit merupakan perhelatan akbar berskala internasional yang sengaja digelar dalam rangka Hari Batik Nasional yang dihadiri delegasi dari mancanegara. Tujuan kegiatan tersebut adalah: membangun antusiasme batik secara internasional, mendukung apresiasi praktisi dan penggemar batik di seluruh dunia, membangun ikatan kuat di antara negara penghasil batik, dan membuat forum untuk perajin dan industri batik di seluruh dunia. Forum ini ingin menghasilkan deklarasi dari para delegasi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah “asal-muasal batik-batik di seluruh dunia”. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran yang menampilkan beragam batik dari wilayah perbatikan yang ada di Nusantara.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Jero Wacik, masih di acara yang sama, mengatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya dari Indonesia, tidaklah gampang. Hal ini disebabkan pada saat itu ada pula negara lain yang ingin mengakui batik sebagai warisan budaya bangsanya. Oleh karenanya, Jero Wacik menghimbau agar bangsa Indonesia terus menjaga dan melestarikan batik. Beliau menjanjikan bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan terus melakukan promosi batik ke dunia internasional sehingga kelak Indonesia akan dikenal sebagai rumah batik. Menurut beliau, hanya dengan promosi yang gencar, batik lokal akan lebih dikenal dibandingkan dengan batik impor yang belakangan menggempur Indonesia. Masih dalam rangkaian acara World Batik Summit, pada tanggal 29 September, Yayasan Batik Indonesia mempersembahkan “Cultural Evening Performance”. Acara ini menampilkan busana karya desainer ternama Indonesia dan

mancanegara dengan menggunakan batik Madura, Pekalongan, Cirebon, dan dua jenis batik dari mancanegara.

GELIAT BATIK JAWA BARAT

Batik *Ciamisan*, Batik *Tasikan*, Batik *Garutan*, Batik *Dermayon*, Batik *Kacirebonan*, Batik *Kasumedangan* adalah batik Jawa Barat. Meskipun secara geografis letak Garut, Tasik, dan Ciamis berdekatan, namun demikian dalam karya batiknya, ketiga daerah tersebut memiliki karakter dan corak yang berbeda. Batik *Garutan* lebih menonjolkan penggunaan warna krem dengan motif *lereng (rengreng)*. Batik *Tasikan* lebih natural dengan menonjolkan warna merah bata dengan motif untuk binatang berupa burung dan kupu-kupu. Batik *Ciamisan* menonjolkan warna hitam dan putih dengan paduan hitam dan coklat (saga). Motif *daun* dan *parang rusak* menjadi pilihan utama.

Dengan berjalannya waktu, tradisi batik tulis dari ketiga daerah yakni Ciamis, Tasik, dan Garut nyaris tinggal nama. Di antara sejumlah daerah penghasil batik di Jawa Barat, sampai saat ini hanya Cirebon yang tampaknya populer. Batik Ciamis sempat berjaya di tahun 1960 hingga 1980. Tahun sesudahnya perlahan-lahan menghilang. Batik-batik dari daerah lainnya dapat dikatakan mati segan hidup tak mau, tidak mati namun juga tidak berkembang.

Dekade tahun 1990-an, ada upaya untuk mengangkat kembali batik dari keterpurukannya. Berbagai kegiatan seminar tentang batik dilaksanakan sebagai upaya mendapatkan solusi untuk mengangkat batik. Pelaksananya adalah dari jajaran pemerintah maupun komunitas pemerhati dan pecinta batik. Selain itu, sekolah-sekolah, dari mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP)/sederajat, sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/sederajat, diwajibkan untuk

mengenakan batik sebagai seragam sekolah pada hari-hari tertentu. Corak batik tiap-tiap sekolah berbeda antara satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki kekhasan. Ciri yang paling menonjol adalah adanya pembubuhan nama sekolah yang bersangkutan di sela-sela atau di atas ragam hiasnya.

Apa yang terjadi kemudian adalah batik Jawa Barat mulai menggeliat kembali. Bahkan seni batik pun mulai meluas fungsinya. Batik bukan saja sebagai bahan sandang, melainkan bahan seni kriya. Selanjutnya motif batik berkembang lebih jauh pada media non-kain seperti kayu dan bambu. Sebagai bahan seni kriya, kain batik di antaranya digunakan untuk kerajinan boneka dan gantungan kunci. Seni kriya tersebut digeluti oleh perajin di Bogor dengan sasaran awalnya adalah kalangan orang asing. Kain batik juga digunakan untuk sandal, tas, dan dompet oleh perajin di Kabupaten Tasikmalaya. Kerajinan topeng dari kayu dan taplak meja dari bambu bermotifkan batik digeluti oleh perajin di Kabupaten Tasikmalaya pula.

Pasca penetapan batik sebagai warisan budaya dari Indonesia oleh UNESCO, ada peraturan dan banyak kegiatan yang diarahkan untuk mempromosikan dan memasyarakatkan batik Jawa Barat. Di Jawa Barat, pada setiap hari Kamis atau Jumat, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dari mulai tingkat provinsi sampai dengan kelurahan mewajibkan karyawan/karyawatnya mengenakan pakaian batik. Pemakaian batik tersebut diikuti oleh sejumlah instansi lain dan sekolah-sekolah.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan batik di antaranya adalah: pada tanggal 30 September, dilaksanakan kegiatan Kampanye Batik dengan tema acara *Ngagowes Nganggê* Batik. Kegiatan ini berupa bersepeda dengan berpakaian batik yang diikuti oleh 300 peserta, di antaranya dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat dan komunitas sepeda. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat dan dilepas oleh Gubernur Jawa Barat. Kegiatan Kampanye Batik bertujuan untuk memperkenalkan, mengingatkan generasi muda akan pakaian khas Indonesia, menjaga, dan mengembangkan batik yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dari Indonesia ke semua lapisan masyarakat. Ketua Dekranasda Jawa Barat berharap agar dengan semakin memasyarakatnya batik, maka industri batik akan bertahan hidup. Apabila batik berkembang akan berimplikasi dengan industri-industri yang lain seperti kain, dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, dengan bertajuk “Aksi Ekspresi Cinta Batik Jawa Barat”, Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) bersama Duta Batik Jawa Barat dan masyarakat, melakukan aksi jalan santai sambil membawa beragam contoh motif batik asal Jawa Barat. Kegiatan tersebut terselenggara pada acara *Car Free Day* (hari tanpa kendaraan bermotor) di Jalan Ir. Djuanda, Kota Bandung. Pada pukul 07.00 WIB, sekitar 500 orang berkonvoi bersama Ketua YBJB dan para duta batik, dimulai dari rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat sampai ke Galeri Cita Batik. Selain konvoi, peringatan juga diisi dengan bengkel batik dengan membuat bentangan kain putih. Bukan itu saja, pada kesempatan itu pula diresmikan pembentukan *Balarea* Batik Jawa Barat. *Balarea* Batik Jawa Barat merupakan forum pencinta batik di Jawa Barat.

Ketua YBJB optimis penetapan UNESCO dapat dipertahankan kalau melihat perkembangan batik dalam tiga tahun terakhir ini. Hal itu dapat dibuktikan dari semakin banyaknya jumlah pengusaha dan perajin batik, diversifikasi produk batik, dan jumlah pemakai batik itu sendiri. Menurut Ketua YBJB, terkait dengan masih adanya pemantauan dan penilaian oleh UNESCO,

maka pemerintah dari mulai tingkat pusat sampai kabupaten/kota harus serius mengembangkan potensi batik Nusantara. Selain itu, dari pihak masyarakat diharapkan untuk turut bertanggung jawab melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan batik.

Kegiatan lain yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap batik adalah acara Pergelaran Musik Bambu Nusantara 5 “World Musik Festival” di Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Bandung. Pergelaran yang berlangsung dua hari itu diisi dengan serba balutan batik. Sekolah-sekolah tak ketinggalan, para siswanya diberikan pembelajaran cara membuat batik dengan teknik tulis maupun cap. Pembelajaran dilakukan di sekolah masing-masing melalui mata pelajaran seni budaya keterampilan (SBK). Selain itu, ada pula pembelajaran yang langsung dilakukan di salah satu bengkel batik. Sebut saja salah satunya adalah SD Islam Terpadu (IT) Fitrah Insani, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. SD tersebut bergabung pada Lembur Batik Cimahi (tempat produksi dan galeri batik) di Jalan Pesantren Kota Cimahi, sebagai tempat mereka mengenal sekaligus mempraktekkan cara pembuatan batik.

Produksi batik Jawa Barat meningkat seiring meningkatnya wilayah perbatikan di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan wilayah penghasil batik Jawa Barat di tahun 2011 ada kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun 2008. Tahun 2008, Jawa Barat hanya memiliki 10 kabupaten/kota sebagai wilayah perajin batik. Namun demikian tahun 2011 sudah 24 kabupaten/kota menjadi wilayah perbatikan dengan karakter dan coraknya masing-masing. Keseluruhannya ada sekitar 6.000 perajin dan ratusan pengusaha batik.

Masing-masing kabupaten/kota, baik itu sebagai wilayah perbatikan lama atau pun baru, selain mereka membuat batik dengan motif yang lama (bagi wilayah perbatikan lama), mereka juga menciptakan motif-motif baru yang mencirikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebut saja perajin batik dari Sumedang misalnya,

mereka menciptakan motif tahu oleh karena Sumedang terkenal dengan tahunya. Perajin batik Cimahi membuat motif dengan mengeksplorasi kekayaan alamnya berupa *curug* 'air terjun' dan *awi* 'bambu', sedangkan perajin batik dari Bogor mengeksplorasi peninggalan Padjadajaran, dan lain sebagainya.

Satu lagi motif baru yang diciptakan oleh perajin batik dari Kota Bandung yakni motif cerita rakyat atau legenda Nusantara dan kampung adat. Kalau biasanya cerita rakyat dan kampung adat hanya bisa disimak melalui literatur sastra kuno, buku pelajaran, buku cerita, dan dari tuturan pendongeng, kini cerita rakyat dan kampung adat bisa dinikmati di atas lembaran kain batik. Batik legenda Nusantara dan kampung adat menampilkan rangkaian gambar yang jumlahnya bisa mencapai 36 hingga 42 fragmen. Ada gambar gerakan pencak, penari, hingga raksasa yang sedang mengejar-ngejar manusia di hutan belantara. Legenda Nusantara dan kampung adat yang diangkat sebagai motif batik di antaranya: Sangkuriang, Ciungwanara, Kabayan, Kampung Naga, Prabu Siliwangi, Kesultanan Cirebon, Situ Cileunca, Dewi Sri, dan Malin Kundang.

Perluasan wilayah perbatikan berarti pula penambahan jumlah pengusaha dan perajin batik. Meskipun demikian angka fantastik dalam transaksi batik tidak dicapai pada tahun 2011, melainkan tahun 2008. Pasca klaim Negeri Jiran Malaysia atas batik, saat itulah merupakan fase puncak penjualan batik. Pada tahun 2008 itu bisa dikatakan merupakan masa puncak kejayaan penjualan batik Jawa Barat. Ada kenaikan sampai 200 persen dibandingkan tahun 2007.

Dikatakan oleh Ketua Harian YBJB, tahun 2009 dan 2010 transaksi batik mengalami penurunan. Namun demikian tahun 2011 menggeliat kembali hingga ada peningkatan dalam transaksi batik. Peningkatan ini terjadi seiring dengan gencarnya program untuk menggenjot produksi dan pasar batik di setiap daerah. Tahun 2011,

transaksi batik Jawa Barat diprediksi mencapai 25 miliar per bulan. Menjelang lebaran kemarin mencapai 50 miliar per bulan. Ada peningkatan sebanyak 20 persen dibandingkan tahun lalu.

Geliat batik Jawa Barat kini bukan lagi hanya mewujud dalam bentuk sandang, melainkan pula merambah ke berbagai benda. Di antaranya adalah untuk perlengkapan rumah tangga ada tirai dan *bed cover*, untuk perlengkapan sekolah dan kerja ada tas *laptop* dan buku, untuk asesoris ada gelang, kalung, sepatu kain bermotifkan batik. Tak ketinggalan, kertas pembungkus kado, sampul undangan, spanduk, serta sertifikat, turut bermotifkan batik. Beberapa travel di Kota Bandung, melukiskan motif batik Jawa Barat pada sebagian badan mobil. Ada pula pemilik mobil yang mengambil motif *rereng Ciamisan* untuk dilukiskan di seluruh badan mobilnya. Juga, kereta api jurusan Bandung Jakarta pun ambil bagian dengan menggunakan motif batik *mega mendung* dari Cirebon untuk sebagian badan kereta.

PERANG BATIK

Produk tekstil bermotifkan batik menggempur Jawa Barat bak jamur tumbuh di musim penghujan. Gempuran bukan saja berasal dari dalam negeri sendiri, melainkan pula dari mancanegara. Dari negeri sendiri, gempuran terutama datang dari Pekalongan berupa busana/pakaian berbahan tekstil bermotifkan batik. Dari mancanegara, gempuran terutama datang dari Cina dalam bentuk kain. Gempuran dari mancanegara terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberlakukan perdagangan bebas. Bertumbuhnya tekstil bermotifkan batik, baik itu produk dalam negeri maupun luar negeri, selanjutnya menggempur pasar dan *mall* di Jawa Barat.

Di sudut-sudut Kota Bandung misalnya, yang terjadi di pasaran adalah kain batik produk tanah air, apakah itu batik tulis,

batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, harus berhadapan dengan tekstil bermotifkan batik. Selain itu, busana/pakaian berbahan batik tulis, batik cap, maupun batik kombinasi tulis dan cap, harus berhadapan dengan busana/pakaian berbahan tekstil bermotifkan batik yang banyak diproduksi di Pekalongan. Secara kasat mata, tekstil bermotifkan batik, apakah itu masih dalam bentuk kain atau sandang, lebih mendominasi setiap pasar atau *mall* di Kota Bandung. Kondisi tersebut di antaranya bisa dilihat di kawasan Pasar Baru di Jalan Oto Iskandardinata dan kawasan *mall* di Bandung Utara dan Timur. Batik Jawa Barat tampaknya belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri.

Kondisi seperti digambarkan di atas diperparah lagi dengan adanya ketidakjujuran dari pihak pabrikan yang mencantumkan label batik tulis/batik halus pada tekstil bermotifkan batik atau pada busana/pakaian yang berbahan sama. Seharusnya, untuk produk tekstil bermotifkan batik, pada labelnya juga dituliskan tekstil bermotif batik, bukan batik tulis atau batik halus misalnya. Perang antara batik dengan printing batik rupanya tak bisa dihindari.

PENUTUP

Batik Jawa Barat kini sudah menggeliat. Terbukti dengan bermunculannya atau lahirnya para perajin batik bukan saja di Kota Bandung, melainkan pula di beberapa daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Batik disosialisasikan melalui berbagai kegiatan. Lebih jauh, fungsi batik diperluas atau keluar dari pakem. Batik dan motif bati Jawa Barat bukan saja digunakan sebagai bahan sandang, melainkan digunakan sebagai balutan seni kriya, perlengkapan rumah tangga, asesoris, alat transportasi, dan lain sebagainya.

Namun demikian sangat disayangkan, geliat batik Jawa Barat bisa dikatakan masih belum menjadikannya tuan rumah di rumah sendiri. Batik Jawa Barat sudah meluas dalam arti dari segi kuantitas perajin, wilayah perbatikan, dan tentu saja corak-coraknya. Namun demikian tidak tuntas sampai di pemasaran. Pasar batik Jawa Barat masih terkalahkan oleh printing motif batik produk Pekalongan dan Cina.

Atas kondisi ini, seluas apa pun batik Jawa Barat berkembang, tidak ada artinya kalau tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap pengusaha, perajin, dan karya batiknya, baik itu untuk batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan terutama batik tulis. Ada beberapa cara yang barangkali bisa dijadikan alternatif untuk melindungi batik, yakni: *Pertama*, melarang pabrikan memproduksi printing motif batik. Dengan kata lain, melarang pabrikan memproduksi kain dengan mengambil atau menggunakan motif-motif batik daerah yang sudah dipatenkan. Apabila langkah ini akan diambil, itu artinya harus diawali dengan mempatenkan terlebih dahulu motif-motif batik yang diproduksi oleh tiap-tiap pengusaha batik. *Kedua*, kegiatan pameran/bazar dan sejenisnya memperlakukan larangan untuk menjual atau memamerkan produk printing bermotifkan batik. *Ketiga*, instansi baik pemerintah maupun swasta, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya tidak diperkenankan menggunakan seragam berbahan tekstil bermotifkan batik, selain batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan batik tulis. *Keempat*, definisi batik tidak pernah berubah, namun demikian karena masih banyaknya kalangan yang awam batik, maka pengetahuan tentang batik perlu dimasyarakatkan. Proses pembuatannya perlu disosialisasikan lebih gencar. *Kelima*, demi memasyarakatkan batik dan menumbuhkan kebanggaan akan batik sebagai warisan budaya nenek moyang, maka pada kegiatan-kegiatan pameran, disediakan stan demo/praktik batik. Pengunjung

dipersilakan mencoba proses pencantingan dan pengecapan. Melalui cara ini paling tidak masyarakat mengetahui proses panjang pembuatan batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, dan terutama batik tulis. Melalui cara ini pula masyarakat diharapkan semakin menghargai batik sebagai suatu karya seni bercita rasa tinggi. *Keenam*, diharapkan ada kejujuran dari pabrikan, pengusaha, maupun penjaja printing motif batik, bahwa tekstil bermotifkan batik tidak dilabelkan sebagai batik tulis atau batik halus.

DAFTAR PUSTAKA

A-94/Ant. 2011

“Batik Dalam Negeri Jauh Lebih Unggul”, dalam *Pikiran Rakyat*, Sabtu 1 Oktober 2011; halaman 6.

Eriyanti. 2011

“Batik yang Bermetamorfosis”, dalam *Pikiran Rakyat*, Minggu 22 November 2011; halaman 15.

Ganin, Arselan. 2011

“Indonesia, Global Home of Batik”, dalam *Pikiran Rakyat*, Minggu 2 Oktober 2011; halaman 24.

Husodo, Triwi. 2001

Konsep Strategi Pelestarian Batik sebagai Seni Budaya Bangsa yang Bernilai Kultural, Sakral, Sosial dan Ekonomi, Bandung: Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga.

Isniawati, Nina. 1988

Symbolisme dalam Seni Batik Kratonan Cirebon, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Rry. 2011

“Cerita Rakyat dalam Torehan Batik”, dalam *Tribun Jabar*, Jumat 2 Oktober 2009; halaman 24.

Suhaeri, Dedy. 2011

“Bangkit Bersama Boneka Batik”, dalam *Pikiran Rakyat*, Senin
15 November 2011; halaman 29.

Yuniaperdani, Ella. 2011

“Antara Kebebasan dan Pakem”, dalam *Pikiran Rakyat*, Minggu
2 Oktober 2011; halaman 7.

BATIK CIMAHI

Lasmiyati

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail : lasmiyatinizam@gmail.com

ABSTRACT

The batik motifs from Cimahi have their own characteristics. Their type of the styles cannot be found in any area. Their Motifs are taken from the natural in Cimahi. The making of batiks from Cimahi was produced when the central government launched the batiks as an Indonesian product that has been recognized worldwide as Indonesia's cultural heritage. The multifarious of batiks from Cimahi are based on the meaning of the symbolism of nature tourism, indigenous villages, the military area, and bamboo garden. The batiks from Cimahi were made in 2009 when the humanists wanted to raise Cimahi at the national level by exploring the potential of Cimahi to find batik patterns. From the meeting through saresehan and competition ultimately Cimahi produces five motifs, namely Kujang, Ciawitali, Cireundeu, Curug Cimahi, and Pusedik (in Indonesian Military Education Center).

Keywords: batiks, Cimahi.

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kehidupan, manusia memerlukan sandang yaitu pakaian yang berfungsi sebagai pelindung badan yang dapat memberikan kenyamanan. Pakaian juga dapat melindungi anggota badan dari terik matahari atau tiupan angin. Manusia memerlukan pakaian dengan bahan yang dapat menyerap keringat, bersifat elastis agar gerak anggota badan tidak terganggu. Tubuh manusia memerlukan pakaian dengan berbagai jenis bahan, baik dari tingkat ketipisannya, tingkat keringanan serat, dan tingkat penyerapan, sehingga pakaian dapat dikenakan dengan nyaman. Sejak ditemukan serat alam yang dapat dipakai sebagai bahan baku benang, menjadi awal bagi penemuan teknik menenun. Serat alam yang memenuhi persyaratan tersebut adalah linen, wol, katun, dan sutera. Keempat serat digolongkan sebagai serat alam yang memiliki potensi cukup besar. Penemuan bahan baku benang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi tekstil. Dari hasil menenun dapat menghasilkan selembar kain yang kemudian dapat digunakan sebagai pakaian. Aturan dan cara berpakaian dapat ditinjau dari aspek normatif, yaitu berhubungan erat dengan norma agama, yang diklasifikasikan pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Selain aspek normatif wujud pakaian juga tidak terlepas dari aspek estetika, bahkan pakaian merupakan perhiasan yang menjadikan daya tarik. Ungkapan estetika bangsa Indonesia dalam pakaian tampil beragam dengan media yang berlainan misalnya: batik, jumputan, sungkit, ikat, dan sebagainya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau *menerakan* malam pada kain itu, kemudian pengolahannya melalui proses tertentu (Sogono, 2011: 146), sedangkan arti batik

menurut *Ensiklopedi Indonesia* adalah kain mori yang digambar dan diproses secara tradisional untuk dikenakan sebagai pakaian bawah oleh banyak suku di Indonesia, terutama suku-suku di Pulau Jawa, istilah umum yang dipakai adalah kain batik (Ensiklopedi, 1989: 206). Kain batik bukan hanya dikenakan sebagai pakaian bawah melainkan lebih berkembang lagi menjadi pakaian pria dan wanita, sprei, sarung bantal, taplak, dan sapu tangan, hiasan dinding, dan lain-lain.

Perkembangan batik di Indonesia melahirkan dua *genre* batik yaitu batik pesisiran dan batik keratonan. Batik Pasisiran pada umumnya batik yang berkembang di wilayah pantai utara Pulau Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Pekalongan, Lasem, Tuban, dan Gresik. Warnanya lebih dinamis, meriah, dan banyak warna. Batik pesisir dibuat oleh masyarakat biasa yang hidup di luar benteng keraton. Batik keraton adalah industri batik yang dibuat di dalam keraton. Pada umumnya batik keraton dibuat di keraton sesuai dengan alam pikir dan nilai-nilai spiritual. Batik keraton memiliki ungkapan yang lebih kental dengan muatan-muatan simbolisme, kemudian berimbas pada batik keratonan yang sarat dengan *pakem* yang harus ditaati. Batik keraton dibuat di kalangan terbatas dan yang memakainya hanya sebatas para bangsawan. Khusus untuk Cirebon, batik Cirebon kemudian bukan hanya sebagai batik pesisiran juga bermakna batik keratonan (Taruna, 2008: 83-84).

SEKILAS SEJARAH CIMAH

Tahun 1816, pemerintah Inggris mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia, khususnya Pulau Jawa kepada Belanda. Dengan dikembalikannya kekuasaan tersebut, Belanda menjadikan Cimahi sebagai kota militer. Tanggal 16 Oktober 1882, pemerintah Belanda melakukan perubahan administrasi di wilayah Karesidenan

Priangan, yaitu dengan pembagian kabupaten-kabupaten di wilayah karesidenan Priangan dalam distrik-distrik dan onderdistrik (kecamatan). Kabupaten Bandung terbagi dalam 10 distrik salah satunya adalah Cilokotot yang terbagi dalam 5 onderdistrik (kecamatan) yaitu Cilokotot yang diperintah langsung oleh wedana, kemudian Gadobangkong, Padalarang, Leuwidadap, dan Leuwigajah, yang masing-masing diperintah oleh asisten wedana.

Pada tahun 1896 Cimahi dijadikan sebagai *garnizun* militer. Pemerintah Belanda memindahkan pabrik mesiu dari Ngawi ke Bandung yang sekarang dikenal dengan nama Pindad. Cimahi dilengkapi dengan pasukan tempur (batalyon tempur), infanteri, dan bantuan tempur kavaleri, artileri, serta sarana-sarana pendukung seperti polisi militer, perhubungan, dan sebagainya. Dengan sarana-sarana tersebut, maka Cimahi dijadikan sebagai kota militer. Setelah Cimahi dijadikan sebagai garnizun militer yang merupakan pusat komando pengendalian pasukan dan koordinasi/mobilisasi/pengerahan pasukan untuk digunakan dalam operasi-operasi tempur dan fungsi kegarnizunan, sejak itulah hampir setengah kekuatan militer Hindia Belanda berada di Cimahi. Dipilihnya Cimahi sebagai kota *garnizun* karena letak Cimahi strategis yakni di tepi jalan antara Jakarta dan Bandung yang memungkinkan dapat memobilisasi dengan cepat.

Cimahi sebagai kota garnizun atau kota militer, maka Cimahi pun dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana lainnya seperti rumah-rumah/perumahan militer, di antaranya gedung yang dihuni para perwira Belanda yang dikenal dengan nama Gedung Empat (sekarang terletak di Jalan Gedung Empat, salah satu gedungnya berfungsi sebagai Mess Perwira Kodiklad AD), dan rumah dinas perwira yang terletak di Gedung Delapan, yang terletak di Jalan Raya Sriwijaya (di depan pasar Antri Baru). Sedangkan tentara KNIL ditempatkan di rumah-rumah di belakang Rumah Sakit

Dustira Jl. Sudirman). Selain membuat rumah-rumah dinas, Belanda juga membuat lapangan olah raga berkuda yang penanganannya langsung oleh Tentara Korps Kavaleri. Masyarakat Cimahi biasa menyebut lapangan olah raga tersebut dengan nama Lapangan Sriwijaya, yang terletak berseberangan dengan Gedung Delapan, namun sekarang di lapangan tersebut sudah dibangun kantor Pussen Arhanudpusdik (Pusat Persenjataan Artileri Angkatan Udara).

Tahun 1901, di Cimahi terjadi perubahan wilayah, yaitu distrik Cilokotot dibagi menjadi 4 onderdistrik yaitu Cimahi, Batujajar, Padalarang, dan Cisarua. Onderdistrik Cimahi diperintah langsung oleh wedana yang dibantu seorang asisten wedana. Pada tanggal 1 Mei 1901, Cimahi sebagai onderdistrik merangkap sebagai ibu kota distrik. Tanggal 1 Juli 1913, Distrik Cilokotot berganti nama menjadi distrik Cimahi yang dipimpin oleh seorang wedana. Distrik Cimahi membawahi 4 onderdistrik yaitu Cimahi, Cisarua, Padalarang, dan Batujajar yang masing-masing diperintah oleh seorang asisten wedana (camat).

Tahun 1925 terjadi lagi perubahan sistem administrasi pemerintah Hindia Belanda dengan diberlakukannya Sistem Desentralisasi. Pada waktu itulah dibentuk provinsi-provinsi yang terbagi atas daerah-daerah otonom kabupaten. Provinsi yang pertama kali dibentuk adalah provinsi Jawa Barat yang beribu kota di Batavia (Jakarta) yang meliputi 5 karesidenan yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Dengan keluarnya berita Negara 1925 No. 404 dinyatakan bahwa wilayah Jawa Barat terbagi atas 9 karesidenan: yaitu Banten, Batavia, Buitenzorg, Karawang, Priangan Barat, Priangan Tengah, Priangan Timur, Indramayu, dan Cirebon. Keresidenan Priangan Tengah terdiri atas Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya Distrik Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Karesidenan Priangan Tengah ini kemudian mengalami perubahan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Berita Negara 1926 No.

475 yang menetapkan bahwa Karesidenan Priangan Tengah terdiri dari Kabupaten Bandung dengan distrik-distrik Bandung, Lembang, Cimahi, Cikalongwetan, Ujungberung, Cicalengka, Ciparay, Banjaran, Soreang, dan Cililin. Distrik Cimahi juga mengalami perubahan wilayah yaitu dimasukkannya onderdistrik Cisarua ke dalam wilayah distrik Lembang sehingga distrik Cimahi tinggal 3 onderdistrik yaitu Cimahi, Batujajar, dan Padalarang. Perubahan ini berlaku 1 Januari 1927.

Pada tahun 1931 terjadi perampingan wilayah, yaitu beberapa karesidenan di wilayah Provinsi Jawa Barat dirampingkan menjadi 5 karesidenan yaitu Banten, Batavia, Buitenzorg, Priangan, dan Cirebon. Karesidenan Priangan mencakup kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis dengan ibu kota di Bandung. Distrik Cimahi tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung dengan membawahi 3 onderdistrik yaitu Cimahi, Batujajar, dan Padalarang. Pembagian wilayah ini berlaku sejak 1 November 1931 sampai berakhirnya Hindia Belanda.

Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945, rumusan PPKI yang disetujui oleh sidang PBB menetapkan bahwa wilayah RI terdiri atas 8 provinsi yang dikepalai oleh gubernur yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda kecil. Daerah provinsi terdiri atas karesidenan-karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Tiap karesidenan terdiri atas kabupaten-kabupaten dan atau kota besar dengan bupati/walikota sebagai kepalanya. Provinsi Jawa Barat terdiri atas lima karesidenan yaitu: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Karesidenan Priangan terdiri atas satu kota otonom (kota Bandung) dan 5 kabupaten yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUDS 1950, Pemerintah daerah kabupaten dijabat oleh bupati, di bawah kabupaten terdapat kawedanaan yang dikepalai oleh wedana. Di bawah wedana terdapat kecamatan yang dikepalai oleh camat, kemudian di bawah camat adalah kalurahan yang dikepalai oleh lurah atau kepala desa. Lurah dibantu oleh beberapa pejabat desa yang keseluruhannya disebut *pamong desa*. Kabupaten Bandung terdapat 6 kawedanaan yaitu: Ujungberung, Ciparay, Cicalengka, Cililin, Cimahi, Cikalongwetan, 17 kecamatan dan 248 desa. Pada tahun 1950-an yaitu dengan berlakunya UUDS tahun 1950, Cimahi merupakan sebuah kawedanaan. Tahun 1970 ibu kota Kabupaten Bandung berada di Dayeuhkolot. Dengan berpindahnya ibu kota Kabupaten Bandung dari Kota Bandung ke Dayeuhkolot, status Cimahi menjadi kota administratif. Tahun 1975, Cimahi dikukuhkan sebagai kota administratif dengan membawahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan.

Ketika reformasi berhembus dan tuntutan desentralisasi muncul, lahirlah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kota administratif agar meningkatkan statusnya menjadi kota otonom. Cimahi merupakan kota administratif tertua, salah satu yang ditempuh untuk menjadi sebuah kota adalah sejumlah LSM dari Cimahi mendatangi Pemda dan DPRD Kabupaten Bandung untuk meminta kotif Cimahi statusnya ditingkatkan menjadi sebuah kota. Bupati Bandung merespon aspirasi tersebut dan sanggup mengeluarkan dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk studi kelayakan. Dari studi kelayakan tersebut Cimahi dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kota. Setelah Dirjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah (PUOD) menilai persyaratan administratif kotif Cimahi menjadi kota otonom, maka Cimahi

dinyatakan memenuhi syarat. Berdasarkan rekomendasi dari Dirjen PUOD tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2000. Pemerintah kota dan DPRD Kota Cimahi memutuskan tanggal 21 Juni 2001 sebagai hari jadi Kota Cimahi (Lasmiyati, 2006: 44).

BATIK CIMAHI

Cimahi merupakan kirata bahasa yang berasal dari kata *cai* (singkatan dari *ci* yang berarti air), dan kata *mahi* (yang berarti cukup). Dua kata *ci* dan *mahi* tersebut menjadi nama Cimahi, yang artinya daerah tersebut cukup akan air. Menurut Imat Rochimat, sungai Cimahi pernah dijadikan sebagai sumber kehidupan masyarakat, air sungainya sangat bersih, di kanan dan kirinya tumbuh pohon *urang-arang*, *tarum areuy*, *amis panon*, *ancemon*, *arbei*, *picung*, dan *teureup*. Berkaitan dengan suasana alam Cimahi yang cukup air, maka daerah-daerah yang ada di sekitar Cimahi menggunakan kata *ci*, seperti: Cibabat, Cibeber, Cihanjuang, Citeureup, Cipageran, Ciuyah, Ciawitali, dan sebagainya.

Setelah Cimahi menjadi kota Itoch Tohija selaku walikota, melakukan berbagai pembenahan seperti mengubah jalur lalu lintas dari dua arah menjadi satu arah yaitu di jalan Gandawijaya, Jalan Gatot Subroto hingga depan Kodim, dan Jalan Gedong Empat. Perubahan jalur tersebut bertujuan mengurangi kemacetan. Selain itu, juga dilakukan pembangunan baik gedung sekolah maupun gedung pemerintah.

Tahun 2010 batik telah diakui dunia sebagai warisan budaya Indonesia. Untuk mendukung keputusan sidang UNESCO tersebut, pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengenakan kain batik pada hari Kamis dan Jum'at. Sejak dikeluarkan surat keputusan tersebut, maka daerah-daerah mencari corak yang akan dijadikan sebagai corak batik khas daerahnya.

Dekranasda Kota Cimahi yang diketuai oleh Ny. Atty Suharti Tochija mengadakan kompetisi untuk menggali potensi Kota Cimahi agar dapat menemukan corak batik Cimahi yang dapat disesuaikan dengan potensi dan kekayaan Cimahi. Kompetisi tersebut merupakan hasil sarasehan yang diikuti tokoh masyarakat, seniman, pengusaha, dan unsur Dekranasda. Dari hasil kompetisi tersebut dihasilkan lima motif batik yaitu: *Kujang*, *Ciawitali*, *Cireundeu*, *Curug Cimahi*, dan *Pusdik (pusat pendidikan) militer*. Setelah menemukan motif, salah satu pengusaha di Kota Cimahi menghimpun pemuda dan pemudi yang peduli pada desain batik dalam wadah *Lembur Batik Cimahi*. Para pemuda tersebut kemudian dikirim ke Cirebon untuk belajar membuat batik, setelah mahir ia kembali ke Cimahi untuk mengembangkan batik Cimahi dengan ciri khas Kota Cimahi.

Bahan baku untuk membuat batik adalah kain mori berkualitas nomor 1 dan 2, *dobby* (katun), *viscose* (semi sutera), dan sutera. Bahan tersebut didatangkan dari Pekalongan Jawa Tengah. Bahan kimia untuk pewarnaan atau pencelupan yang diperlukan adalah lilin baron, gondorukem, paraffin, naptella, dan soda. Warna alami digunakan dari daun alpukat dan mahoni yang direbus.

Sebelum selembur kain mori dibuat menjadi batik yang indah, terlebih dahulu diperlukan kain mori atau kain putih polos berkualitas prima (kualitas nomor 1 dan 2) sehingga menghasilkan kain batik berkualitas bagus. Bahan lainnya adalah lilin atau malam yang berfungsi untuk *nembok* yakni tahapan proses membatik khususnya yang berkaitan dengan pembuatan corak dan motif batik. Peralatan yang diperlukan adalah seperangkat kompor, *canting* (yaitu alat untuk menggambar motif), *wajan* kecil untuk wadah *malam* (lilin). Selain itu diperlukan peralatan lain, yaitu bak terbuat dari kayu yang berfungsi untuk merendam batik dalam proses pewarnaan, *gawangan* yaitu alat untuk menggantungkan kain mori yang akan diberi gambar oleh pembatik. Penjemuran terbuat dari

beberapa tiang bambu atau kayu yang didirikan di atas tanah, kemudian dibentangkan tali kawat/tambang, digunakan untuk menjemur kain-kain yang telah *dilorod*. Kompor atau *tungku* api digunakan untuk memanaskan lilin.

Proses pembuatan. Sebelum kain diubah menjadi selembar batik siap pakai, terlebih dahulu melalui beberapa proses, yakni :

- Menghilangkan *tajin* yaitu kain yang dijadikan bahan batik terlebih dahulu dicuci supaya kotoran dan bahan yang kaku semacam kanji yang menempel pada kain larut dalam air. Selanjutnya kain tersebut direbus selama 5 menit dengan tujuan warna pada kain batik dapat menempel. Terkecuali bahan *viscose* dan *sutera* tidak perlu dicuci dan direbus. Setelah kain dibilas kemudian dijemur sampai kering.
- Pengecapan. Kain yang sudah kering diletakkan di atas meja, selanjutnya canting cap yang sudah diletakkan di atas lilin ditempelkan di atas kain hingga merata.

Gambar 1

Blok warna, mengisi gambar yang masih putih dengan menggunakan canting.



Sumber: Dok. BPSNT 2011

- Blok warna yaitu memberikan warna- warna pada gambar yang belum terisi warna. Caranya bagian yang masih berwarna putih ditutup *malam* khusus dengan menggunakan *canting*. Jika dalam melakukan proses pembuatan blok warna kurang cermat, atau jenis *malam*nya kurang tepat, dan gagal, maka kain tersebut direndam di bak sampai benar-benar basah, kemudian *dituus* yaitu dijemur tidak sampai kering asal air tidak menetes

dan dilakukan peng-ulangan pengecapan dan blok warna. Namun seandainya proses blok warna tidak terjadi kesalahan tahap berikutnya adalah pewarnaan.

-Pewarnaan. Proses pewarnaan bertujuan memperjelas warna dengan cara setelah kain dicap dilakukan pencucian yaitu air dimasukkan ke dalam bak pencucian yang telah diisi air yang dicampur dengan pewarna kain, bak pencucian digoyang-goyang hingga air merendam kain. Kemudian kain dibalik dan bak kembali digoyang-goyangkan, dilakukan berulang-ulang hingga 10 kali, setelah itu baru *dituus* (hingga air tidak lagi menetes). Setelah *tuus* kain dimasukkan ke dalam bak kedua.

- Merendam kain. Tahap berikutnya adalah merendam kain dengan bahan pewarna kimia pada bak kedua, dengan cara seperti pewarnaan pada bak satu, dilakukan berulang-ulang hingga tiga kali, tujuannya memperpekat atau mempertajam warna. Selanjutnya *dituus* dianginkan, tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari langsung.

- Ngelorod, yaitu menghilangkan atau membuang *malam* yang menempel pada kain dengan cara kain yang telah *dituus* dicelupkan berulang-ulang ke dalam bak berisi

Gambar 2
Proses pewarnaan



Sumber: Dok. BPSNT 2011

Gambar 3
Kain yang dituus



air mendidih yang dicampur dengan soda sampai *malamnya* tampak mengambang. *Malam* yang mengambang diambil dan kain diangkat.

- Pengulangan. Setelah dilorod dan diangin-angin sampai kering, kain dikembalikan kepada pembuat blok warna untuk mengisi warna-warna yang belum terisi. Dari bagian blok warna dikembalikan lagi kepada bagian pewarnaan untuk dicuci, kemudian dilorod ulang. Pengulangan dilakukan hingga tiga kali.

Ngelorod merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan batik, kemudian dicuci, dijemur, disetrika, dan dipak untuk dipasarkan.

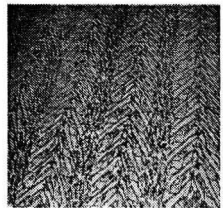
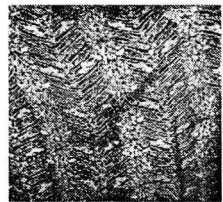
Hasil saresahan Dekranasda Kota Cimahi telah menghasilkan lima motif Batik Cimahi, yaitu:

Motif Kujang

Batik Cimahi bermotif kujang diciptakan oleh Mohamad Yaser. Jenis motif kujang ada dua yaitu *Rereng Kujang* dan *Kujang Cakra*. Alasan motif kujang dijadikan sebagai motif Batik Cimahi karena pusaka kujang merupakan simbol Jawa Barat. Kujang adalah senjata tajam, berbentuk unik mempunyai tonjolan pada bagian pangkal dan lengkungan pada bagian ujung.

Menurut tokoh masyarakat Cimahi, kujang merupakan senjata khas masyarakat Sunda. Kujang memiliki ragam bentuk yang menarik, strukturnya adalah *papatuk*, *waruga*, *mata*, *siih*, *pamor*, dan sebagainya. Kujang merupakan senjata, pusaka yang pernah dimiliki

Gambar 4
Motif Kujang



Sumber: Dok BPSNT
Bandung 2011

masyarakat peladang. Bentuk kujang bermacam-macam, tetapi mempunyai struktur yang tetap namun pemaknaan atau simbol pada kujang berdasarkan pada jenis kujang itu sendiri.

Masyarakat peladang mengenal kujang sebagai perkakas yang digunakan untuk membuka lahan atau bercocok tanam. Benda yang menyerupai arit atau parang dapat digunakan untuk menebas atau memotong. Bagi masyarakat peladang kujang berfungsi sebagai arit, kapak, gergaji, dan pencukil. *Siih* yang runcing bergerigi menyerupai bentuk gergaji dapat digunakan untuk memotong kayu. Kujang juga berfungsi sebagai alat perang. Lubang pada mata kujang dapat digunakan untuk meraut lidi.

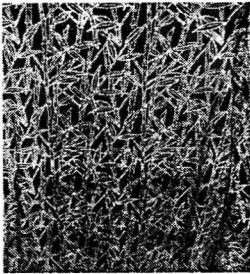
Penamaan kujang umumnya diambil dari nama hewan, misalnya Kujang *Ciung*. Kujang *Ciung* bentuknya menyerupai burung Ciung. Kujang ini dipakai oleh bangsawan yang berkedudukan tinggi yaitu raja, atau putera mahkota. Bagi masyarakat Sunda burung Ciung menjadi simbol pencitraan yang positif. Burung Ciung adalah burung yang elok, penampilannya gagah ketika bertengger di atas ranting pohon. Burung Ciung mencerminkan kecerdasan, kepandaian berdiplomasi, dan rupawan (Suryadi, 2008: 23).

Berdasarkan fungsinya, dikenal sejumlah nama kujang yaitu: *Kujang Pamangkas* yang berfungsi sebagai alat perladangan dan pertanian, Kujang *Pakakas* berfungsi sebagai perkakas untuk sehari-hari, *Kujang Pakarang* yang berfungsi sebagai alat berperang untuk menghadapi musuh, *Kujang Pangarak* bertangkai panjang seperti tombak berfungsi sebagai alat upacara, *Kujang Pusaka* yang berfungsi sebagai lambang keagungan raja atau pejabat kerajaan, biasanya memiliki kadar kesakralan yang sangat tinggi dan memiliki tuah atau daya gaib (Suryadi, 2008: 29). Dengan warna dasar kain berwarna putih dipadu dengan goresan gambar kujang warna coklat, motif batik ini kelihatan sangat cantik. Begitu pula dasar

berwarna merah diisi dengan goresan gambar kujang berwarna kuning dan merah tua, kain tersebut sangat menarik.

Motif Ciawitali

Gambar 5
Motif Ciawitali



Sumber: Dok BPSNT Bandung
2011

Motif bambu diciptakan oleh Didi Sahadi. Motif bambu didominasi oleh lukisan bambu dan anyamannya. Inspirasi motif bambu datang dari seorang warga yang merupakan penggagas Asosiasi Bambu Sedunia. Pohon bambu banyak tumbuh di sebuah kampung yang berada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Kampung tersebut bernama Ciawitali.

Nama Ciawitali diambil dari kata *awi* atau bambu. Menurut Imat Rochimat, pohon bambu banyak tumbuh di kampung tersebut hingga sebagian masyarakat Cimahi memanfaatkan bambu sebagai pagar, bilik, dan peralatan rumah tangga. Orang Sunda menamakam pohon bambu dengan nama *tangkal awi*. Jalan menuju Kampung Ciawitali juga bernama jalan Ciawitali. Menurut penuturan Imat Rochimat, di daerah tersebut sampai sekarang masih banyak ditemukan *tangkal awi*.

Bagi masyarakat Sunda *tangkal awi* dimanfaatkan sebagai tempat berteduh, akarnya sebagai resapan air, batangnya dimanfaatkan sebagai pagar, bilik, dan perabot rumah tangga. Itulah yang membuat Didi Sahadi menciptakan batik Cimahi bermotif Ciawitali.

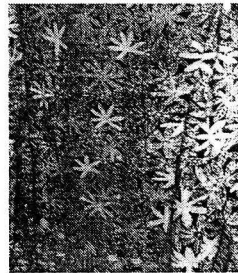
Warna dasar Batik motif Ciawitali adalah biru, didominasi dengan goresan-goresan daun dan ranting bambu berwarna putih.

Warna dasar biru diberi goresan ranting dan daun berwarna putih akan terlihat anggun untuk dipandang.

Motif Cireundeu

Motif Cireundeu dibuat oleh Dadang yang mewakili Kampung Cireundeu. Kampung Cireundeu berada di Leuwigajah Cimahi Selatan. Masyarakatnya mengkonsumsi singkong atau *sampeu* sebagai pengganti nasi. Di kampung tersebut pohon singkong dapat dimanfaatkan semuanya, seperti daun yang masih muda dapat digunakan untuk masakan, singkongnya dapat dibuat penganan atau pun makanan pokok pengganti nasi yang disebut *rasi*, ranting-ranting daun yang tua digunakan sebagai makanan ternak, dan pohonnya dipotong-potong dan dapat ditanam kembali.

Gambar 6
Motif Cireundeu



Sumber: Dok BPSNT Bandung
2011

Dalam kesehariannya masyarakat Cireundeu mengkonsumsi singkong. Kampung tersebut mendapatkan penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan.

Menurut Abah Emen pada masa revolusi fisik, masyarakat Cireundeu mengungsi ke tempat yang aman, di kaki bukit mereka bersembunyi dari kejaran tentara Belanda. Selama di pengungsian, mereka kehabisan beras untuk makan sehari-hari. Satu-satunya jalan mereka menanam singkong (ubi jalar). Ternyata singkong yang mereka tanam dapat tumbuh, dan dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Dari singkong yang mereka tanam kemudian dapat dijadikan sebagai makanan pokok, singkong tersebut diolah menjadi

nasi, mereka menamakannya *rasi*. Daunnya juga dapat dijadikan sebagai sayur, lauk pauk, dan dapat dibuat jenis penganan lainnya.

Beralihnya makanan pokok masyarakat Kampung Cireundeu dari nasi menjadi beras singkong dimulai kurang lebih tahun 1918. Ibu Omah Asnawah merupakan pelopor yang kemudian diikuti oleh saudara-saudaranya di Kampung Cireundeu Leuwigajah (www.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article) Dadang kemudian terinspirasi untuk membuat motif batik yang didominasi motif daun singkong dan ketela.

Motif Curug Cimahi

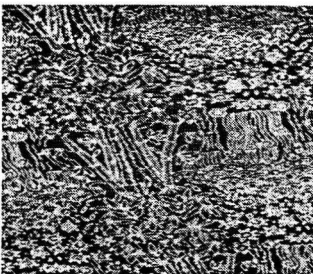
Curug Cimahi merupakan salah satu objek wisata air terjun yang berlokasi di Cisarua. Pada hari libur banyak masyarakat mengisi liburannya di *curug* tersebut.

Menurut Haryoto Kunto pada 6.000 tahun yang lalu Gunung Tangkubanperahu mengalami erupsi besar disertai muntahan abu dan lava. Letusan vukaniknya sangat dahsyat, daerah yang

terkena muntahan lava tersebut adalah sebelah barat *Ciumbeuleuit*. Muntahan tersebut telah memblokir alur sungai Citarum yang dahulunya mengalir Sungai Cimeta yang terletak di utara Padalarang sekarang. Akibat terbandungnya Sungai Citarum Purba terbentuklah telaga Bandung.

Pada 3.000 – 4.000 tahun yang lalu, telaga Bandung secara bertahap mulai surut lewat

Gambar 7
Motif Curug Cimahi



Sumber: Dok BPSNT Bandung 2011

Sanghiyang Tikoro, yaitu pintu air telaga Bandung yang terletak di sebelah barat Batujajar, Telaga pun menjadi kering dan terbentuklah Dataran Tinggi Bandung (Kunto, 1982: 31-32). Meskipun telaga Bandung telah mengering, Gunung Tangkubaperahu masih mengalami erupsi yang menghasilkan aliran lava sepanjang Cikapundung dan Cisarua yang membentuk air terjun Dago dan Curug Panganten.

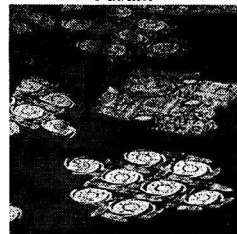
Menurut Imat Rochimat Sungai Cimahi tersebut berhulu atau bersumber dari Gunung Tangkubanperahu dan Gunung Burangrang, melalui Curug Bugbrug, Curug Jompong, Curug Dadap, Curug Goong, Curug Gajah, Curug Cimahi dan Curug Panganten, lalu mengalir menjadi sungai yang mengairi Cimahi.

Seiring dengan perkembangan waktu dan pembangunan yang semakin pesat, tumbuhnya beberapa pabrik dan rumah penduduk, sungai Cimahi mulai menyempit, airnya pun menjadi berkurang. Dari beberapa curug yang ada Curug Cimahi menjadi primadona sebagai objek wisata di Kota Cimahi. Salah satu peserta kompetisi kemudian mengabadikan Curug Cimahi menjadi batik motif Curug Cimahi.

Motif Pusdik

Motif Pusdik diambil sebagai gambaran bahwa Cimahi merupakan kawasan militer, yang wilayahnya mencapai 375 hektar atau 9,14 persen dari total wilayah Kota Cimahi. Memasuki Kota Cimahi bagaikan memasuki kota militer. Fasilitas militer dapat ditemui di kota tersebut mulai dari kantor pusat pendidikan, rumah dinas

Gambar 8
Motif
Pusdik



Sumber: Dok BPSNT
Bandung 2011

TNI, rumah sakit, penjara peninggalan Belanda.

Dari beberapa bangunan milik TNI tersebut terdapat tujuh pusat pendidikan militer, yaitu Pusat Kesenjataan Artileri (Pussenart), Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed), Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub), Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal), Pusat Pendidikan Pembekalan dan Angkutan (Pusdikbekang), Pusat Pendidikan Jasmani Militer (Pusdikjas), dan Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom), Pusdikgumil dan Tih Pangmilum.

Selain itu di Cimahi juga terdapat Bengmatri, Denpom Cimahi, Kodim 0609/Bandung-Cimahi, Koramil Ciawitali dan Keborumpit, Danbekang, Domatzi (Depot Material Zeni), Brigif 15 Kujang II Dam II/Siliwangi, Rumah Tahanan Militer Poncol, RS Dustira, Lapangan Tembak Militer Gunung Bohong, Perumahan Dinas TNI AD, Kolam Renang Katak Riang, Masjid Abri, Perumahan Dinas TNI AD yang baru (Komplek Psopati/Artileri, Sriwijaya Lapangan, Pusdikhub, Kalidam, Pusdikpal dan Kebon Rumpit (Lubis, 2004: 42). Mengacu pada beberapa bangunan yang ada di Cimahi tersebut salah satu peserta sarasehan dan kompetisi mengabadikan pusdik (pusat pendidikan) militer sebagai motif batik. Batik motif Pusdik identik dengan tank baja, granat dan peluru, latihan militer dan kawah Candradimuka yang merupakan simbol pendidikan militer.

PENUTUP

Tahun 2009 para budayawan berkeinginan agar Cimahi yang baru saja terbentuk sebagai sebuah kota namanya terangkat di tingkat nasional. Ny. Atty Suharti Tochija selaku ketua Dekranasda Kota Cimahi mengajak budayawan, seniman, dan tokoh masyarakat untuk menggali potensi Kota Cimahi agar dapat menemukan corak

batik Cimahi yang dapat disesuaikan dengan potensi yang ada. Kompetisi tersebut menghasilkan: lima motif batik yaitu Kujang, Ciawitali, Cireundeu, Curug Cimahi, dan Pusdik (Pusat Pendidikan) Militer.

Lima motif batik Cimahi tersebut menggambarkan nuansa alam seperti air terjun, daun dan batang bambu, daun singkong, air terjun, pohon, benda-benda lainnya serta lingkungan Kota Cimahi sebagai kota militer. Motif-motif tersebut merupakan wujud kedekatan mereka dengan alam lingkungannya.

Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk mengenakan baju batik pada hari Kamis dan Jum'at, Pemerintah Kota Cimahi telah mewajibkan pegawainya baik di lingkungan pegawai negeri maupun swasta untuk mengenakan baju batik pada hari tersebut. Pada acara-acara tertentu Ny. Atty Suharti Tochija melalui wadah Dekranasda menyertakan batik Cimahi melalui pameran atau pun bazar agar batik Cimahi lebih dikenal di kalangan masyarakat. Untuk memperkenalkan batik Cimahi kepada para pelajar, setiap sekolah tingkat dasar diwajibkan mengenakan baju batik Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

Sugono, Dendy (red), 2011

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 3, 1989. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Kunto, Haryoto, 1986

Semerbak Bunga di Bandung Raya. Bandung: Granesia.

Lasmiyati, 2006

Sejarah Perkembangan Kota Cimahi, dari Kota Kecamatan menjadi Kotamadya. Laporan Penelitian. Bandung: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.

Lubis, Nina Herlina, 2004

Sejarah Kota Cimahi. Bandung: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran.

Suryadi, 2008

Kujang: Rupa dan Makna, dalam buku *Kujang, Bedog, dan Topeng, dan Esai-Esai Lainnya mengenai Kebudayaan Sunda*. Bandung: Pusat Studi Sunda.

Sumber Elektronik

Batik Cimahi

dalam <http://citeureupkelurahan.wordpress.com/2010/10/19/batik-cimahi/#more-209> diakses: hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012
Wisata Budaya dan Kesenian

dalam [http:](http://www.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=274:wisata-budaya-dan-kesenian&catid=39:objek-wisata&Itemid=)

www.cimahikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=274:wisata-budaya-dan-kesenian&catid=39:objek-wisata&Itemid= diakses: hari Minggu, tanggal 12 Februari 2012

MAKANAN KHAS DAERAH CIREBON

Hermana

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail: hermanacrbn@gmail.com

ABSTRACT

Every society has its own menu. These foods typically come from their own environment and almost certainly do not know the origins of their makers. But we can ensure that these foods are legacy from generation to generation, as well as the Traditional foods from Cirebon. Traditional foods from Cirebon are not just made from rice as their basic material but also can be made from glutinous rice or soybeans. Traditional foods from Cirebon are blend of indigenous cuisine with Arabic and Chinese. Initially all kinds of Traditional foods from Cirebon are consumed by middle-to lower social status. However currently all kinds of traditional foods from Cirebon are consumed by all levels of society. This is indicated by many traders who not only sell Traditional foods from Cirebon in the street but also sell to the supermarkets in Cirebon. In fact the Traditional foods from Cirebon are widely used as complementary foods to the menu in certain events in luxury hotels.

Keywords: traditional foods, Cirebon

PENDAHULUAN

Sandang, papan, dan pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Sandang diperlukan agar manusia berbudaya, artinya sandang ini untuk mempercantik, memperindah dan menyasakan penampilan manusia di depan umum, dengan mengacu kepada aturan dan adat istiadat setempat. Manusia memerlukan sandang ini selain untuk memperindah dan mempercantik dirinya juga berguna untuk kesehatan dirinya. Sandang dilihat dari artinya yang sangat sederhana adalah sesuatu yang dipakai oleh manusia untuk kepentingan dirinya, misalnya, pakaian (sesuatu yang melekat di badannya), kendaraan, perhiasan dan lain-lain. Pakaian adalah sesuatu yang melekat di badan untuk melindungi diri dari cuaca panas dan dingin agar manusia bisa bertahan hidup. Sesuai dengan perkembangan zaman manusia memiliki inovasi dan kreatifitas untuk menciptakan pakaian bukan saja untuk melindungi tubuh, tetapi agar pakaian tersebut nampak indah dan mengandung estetika. Pakaian selain memiliki nilai-nilai estetika, juga memiliki simbol-simbol yang bermakna pada acara-acara tertentu, misalnya pada acara perkawinan, kelahiran, kematian atau pun pada acara adat lainnya.

Kebutuhan akan papan merupakan sesuatu faktor yang utama. Papan di sini diartikan secara umum adalah yang didiami. Rumah dalam bahasa Cirebon disebut *Umah*. Menurut sebagian masyarakat Cirebon rumah merupakan wilayah bumi dan langit, artinya satu kesatuan di alam semesta ini. Rumah merupakan pusat kehidupan manusia atau keluarga sebagai penyeimbang di alam semesta ini. Rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung dari cuaca, tetapi rumah juga mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya.

Kebutuhan primer lainnya adalah pangan. Kebutuhan manusia akan pangan adalah untuk kelangsungan hidupnya, karena pangan diperlukan sebagai sumber energi untuk mengatur

metabolisme di dalam tubuh. Oleh karena itulah manusia memerlukan berbagai bahan makanan untuk menjaga agar kebutuhan semua zat makanan di dalam tubuh terpenuhi. Menurut orang Cirebon makanan adalah *kang dipangan*, sedangkan menurut orang Sunda adalah *kadaharan*, yaitu sesuatu benda yang dimakan (Satjadibrata,1976: 101).

Pada umumnya setiap masyarakat mempunyai menu makanan sendiri, menu makanan ini biasanya asli timbul dari lingkungannya, dan hampir tidak diketahui asal mula pembuatnya, yang pasti dapat ditelusuri dan merupakan warisan yang turun temurun.

Sebelum zaman kesultanan Cirebon berdiri, Cirebon sudah menjadi kota pelabuhan yang ramai dengan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan di Muara Jati mengundang perhatian dari berbagai etnis di Nusantara, Arab, Cina, India, dan kemudian dilanjutkan dengan bangsa Eropa yang datang ke Cirebon. Di Cirebon mereka bukan saja untuk berniaga, tetapi mereka juga membawa kebiasaan-kebiasaan memasak dan cara penyajiannya sesuai dengan selera mereka sewaktu di tempat asalnya, terus berlanjut sampai saat ini. Misalnya orang Sumatra (Minang) dengan masakan Padang, Sunda dengan masakan Sundanya, Jawa dengan masakan Jawanya, dan banyak lagi makanan khas daerah lain di Nusantara yang ada di Kota Cirebon. Kemudian bangsa Arab, Jepang, Cina dan Eropa, mereka datang dengan berbagai jenis makanan khasnya, yang kesemuanya berbeda-beda dalam cara memasak dan menyajiannya meskipun dengan bahan pokok yang sama.

Secara historis Cirebon merupakan daerah penghasil beras yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, lahan pertanian yang ada saat ini sudah banyak beralih fungsi, mulai dari pembangunan perumahan sampai

dengan pembangunan sarana perniagaan, sehingga saat ini Cirebon bukan lagi sebagai daerah agraris, tetapi sudah berkembang menjadi pusat perniagaan dan jasa.

Beras selain sebagai bahan makanan pokok masyarakat Cirebon, juga mempunyai nilai ekonomis dan juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya. Masyarakat Cirebon percaya bahwa beras mempunyai nilai religius, yang dituturkan secara turun temurun dari nenek moyangnya bahwa beras merupakan penjelmaan dari Dewi Sri Pohaci sebagai lambang dewi kesuburan. Dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bila anggota keluarga makan nasi, maka nasi tersebut harus dihabiskan. Hal ini secara tidak langsung mendidik anggota keluarga agar tidak membuang-buang makanan terutama nasi, yang tercermin dalam ungkapan *Aja sok buang sega, bokat kena bendu*, artinya jangan suka membuang nasi, barangkali kena marah.

Beras mempunyai berbagai jenis dan warna. Jenis beras bermacam-macam, misalnya beras Cianjur, beras Rojolele, beras Jago dan lain-lain, di tambah dengan beras import dari Thailand dan Vietnam. Warna beras ada dua macam, yaitu beras putih dan beras merah. Kedua macam beras tersebut mempunyai nilai dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Beras (nasi) putih (Bhs, Cirebon: *sega putih*) dianggap lebih baik dan terhormat untuk menghormati tamu, sedangkan beras merah (Bhs, Cirebon: *sega abang*) lebih banyak dikonsumsi para buruh. Kedua jenis beras jika ditanak mempunyai sifat yang berbeda, beras putih mempunyai sifat pulen sedangkan beras merah sedikit keras. Selain dari itu juga terdapat jenis beras ketan yang dapat diolah menjadi makanan cemilan.

Pada makanan khas Cirebon bukan hanya beras sebagai bahan pokoknya, bisa juga dari ketan dan kedelai. Makanan khas Cirebon merupakan perpaduan antara masakan pribumi dengan etnik Arab dan Cina yang datang pada abad ke 12 Masehi di Muara Jati.

Cirebon adalah kota pantai dan penghasil ikan. Ikan banyak diolah menjadi makanan jenis lain, misalnya ikan asin, terasi, petis dan kerupuk yang kemudian menjadi makanan oleh-oleh khas Cirebon. Olahan dari ikan segar banyak dijumpai di warung kaki lima dan di restoran dengan nama seafood.

Cirebon mempunyai beberapa macam makanan khas, di antaranya adalah *sega (nasi) jambang*, *sega lengko*, *empal gentong*, dan *docang*, sedangkan camilan antara lain yaitu *raragudig*, *dongkal*, *bugis*, *kelepon*, dan lain lain.

NASI JAMBLANG

Nasi Jamblang dikenal oleh masyarakat Cirebon dengan nama *Sega Jamblang*. Nasi Jamblang adalah nasi putih yang dibungkus dengan daun jati dan besarnya tidak lebih dari kepalan tangan orang dewasa. Awal pembuatan nasi jambalang hanya untuk konsumsi orang-orang yang kurang mampu, dan hanya di jual di sekitar daerah pembuatannya. Sejauh ini belum diketahui secara pasti siapa orang pertama yang membuat nasi jambalang, hanya secara umum diketahui bahwa pembuatan nasi jambalang itu dibuat oleh orang-orang yang tinggal di daerah Jamblang (Kabupaten Cirebon).

Pada awal tahun 1970-an, para pedagang nasi jambalang mulai berjualan ke luar daerah, terutama ke kota Cirebon. Para pedagang ini berjualan hanya sebatas di emperan toko atau trotoar di pinggir jalan dengan cara memasang tenda sebagai pedagang kaki lima. Mereka berjualan selepas magrib sampai pagi hari. Sejalan dengan perkembangan zaman, pada masa sekarang ini nasi jambalang bukan hanya berjualan di emper toko atau trotoar saja, tetapi sudah banyak yang menempati bangunan permanen, meskipun mereka harus sewa atau pun membeli tempat. Di samping itu waktu berjualan tidak hanya pada malam hari, tetapi sepanjang hari pun tersedia makanan nasi jambalang. Perkembangan selanjutnya nasi jambalang

bukan hanya sebagai konsumsi masyarakat kelas bawah, tetapi juga sudah merupakan konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas.

Lokasi pedagang nasi jamblang bisa ditemui di banyak tempat di kota Cirebon, misalnya, Nasi Jamblang “Mang Dul” di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, di Jl. Tentara Pelajar (Gunungsari), di sini juga banyak ditemui warung nasi jamblang yang berjualan di atas trotoar dengan menggunakan tenda, sekitar Pasar Pagi, di Jl. Yos Sudarso (Pelabuhan Cirebon), dan di banyak tempat di seluruh pelosok kota Cirebon. Selain itu, para pedagang berjualan di tempat-tempat keramaian, misalnya, di tempat pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau perayaan Mauludan yang diselenggarakan oleh pihak keraton Cirebon di arena pasar malam. Bahkan pada saat ini pedagang nasi jamblang sudah menyebar ke berbagai kota lainnya, seperti Bandung, Jakarta, dan daerah lain di Pulau Jawa.

Prosedur Pemasaran

Prosedur pemasaran yang dipakai oleh pedagang nasi jamblang ada dua cara, yaitu *pertama*, para pedagang memasak sendiri dagangannya dan kemudian memasarkan di sekitar tempat tinggalnya. Hal yang sama dilakukan juga oleh para pedagang yang memasang tenda secara semi permanen (ini bisa dijumpai di sekitar jalan Tentara Pelajar) di pinggir jalan, mereka memasak masakannya di tempat tersebut.

Kedua adalah pedagang memesan barang dagangan kepada orang lain, kemudian dipasarkan di daerah lain. Caranya adalah sehari sebelumnya, para pedagang memesan nasi jamblang beserta lauk-pauknya, untuk kemudian diambil keesokan harinya. Setelah masakan yang dipesan tersedia, masakan tersebut diangkut ke daerah tujuan dengan memakai kendaraan sendiri atau sewa. Kemudian jika

ada barang dagangan yang tidak laku terjual, maka makanan tersebut dapat ditukar kembali dengan jenis makanan yang sama dan baru.

Pada masa lalu para pedagang nasi jamblang identik dengan orang Jamblang, tetapi pada saat ini pedagang nasi Jamblang bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang yang berasal dari daerah Jamblang, tetapi juga oleh orang-orang yang bukan asli dari daerah Jamblang.

Menu masakan nasi jamblang di antaranya adalah:

- Nasi jamblang atau *Sega Jamblang* sebagai menu utama.
- Lauk-pauknya antara lain adalah: sambel masak, rendang daging sapi, jeroan, ati dan ampela ayam (goreng maupun kuah), tempe bacem, tempe goreng/tepung, tahu goreng/kuah, sate kentang, perkedel kentang/jagung, urab, pepes udang/ayam/jamur, sate usus, goreng emping, ikan asin panjelan/jambal, sate kerang, dadar telur, cemplung, otak sapi, dan sebagainya.

Cara pembuatan Nasi Jamblang.

Pada awalnya nasi jamblang terasa gurih, hal ini karena pengolahan nasi jamblang dicampur dengan air santan, tetapi untuk saat sekarang pengolahan nasi jamblang tidak memakai santan.

Bahan:

- Beras
- Air secukupnya.

Cara pengolahan :³

1. Beras dicuci hingga bersih, setelah itu beras diaron sampai mendidih kemudian diangkat.
2. Setelah diaron, siapkan dandang kemudian dipanaskan masukan beras yang sudah diaron tadi kemudian dikukus.

3. Setelah matang nasi diangkat, nasi dikipas sampai hangat kemudian dibungkus dengan daun jati.

Sebagai contoh pembuatan menu tambahan di antaranya sebagai berikut:

Sambel Goreng.

Bahan:

Cabai merah, buang bijinya dan iris tipis. banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan. satu butir kelapa untuk dijadikan santan.

Bumbu yang dihaluskan:

Bawang merah, bawang putih, kemiri dihaluskan. Serai, daun salam, lengkuas di memarkan.

Terasi, garam dan gula secukupnya.

Cara pembuatannya:

Pertama, tumis bumbu hingga harum, lalu masukan irisan cabai, kemudian aduk sampai agak matang. *Kedua*, masukan santan, lalu biarkan hingga matang dan sampai mengental. Setelah matang sambal goreng ini dibungkus dengan daun pisan dan ada juga yang ditempatkan di *baskom*.

Rendang Kecap.

Bahan:

Daging sapi, minyak goreng, kecap, serai dan jahe dimemarkan, daun salam, air, garam dan gula secukupnya.

Bumbu yang dihaluskan:

Bawang merah, bawang putih, ketumbar dan kemiri.

Cara pembuatannya:

Pertama, tumis bumbu hingga halus disertai dengan daun salam, serai dan jahe hingga setengah matang, masukan daging, masak hingga daging berubah warna. *Kedua*, tambahkan air, kecap, garam dan gula, masak hingga daging dirasa matang, kemudian angkat dan simpan di panci.

Tahu Kuah

Bahan:

Tahu putih, bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, air kecap, garam dan gula.

Cara pembuatannya:

Tahu digoreng sampai berwarna kecoklatan, bawang merah/putih diiris tipis, cabe merah buang bijinya dan diiris serong, tomat besar dipotong.

Pertama, tumis bawang merah dan bawang putih, kemudian masukkan irisan cabai, aduk hingga layu. *Kedua*, masukan tahu goreng, aduk sebentar kemudian tambah air, kecap, garam dan merica, biarkan sampai kental.

Sate Kentang.

Bahan:

Kentang, kelapa, salam, kayu manis, salam, kecap manis, dan minyak goreng.

Bumbu:

Bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula merah, gula putih dan garam.

Cara Pembuatannya:

Kentang direbus kemudian dikupas dan dipotong-potong sebesar dadu, kelapa diparut dan disangrai.

Pertama, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, masukan kelapa parut, salam, dan kayu manis aduk hingga matang, kemudian tambahkan kentang air dan kecap manis biarkan sampai kering. *Kedua*, setelah matang kentang ditusuk dengan tusukan sate (paling banyak 3-4 potong).



Foto1:Nasi Jamblang siap santap
(Sumber: Dok. Pribadi, 2011)

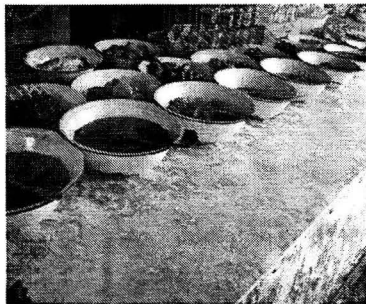


Foto 2: Lauk pauk Nasi Jamblang
(Sumber: Dok. Pribadi, 2011)

EMPAL GENTONG

Pada awalnya masakan empal gentong adalah masakan dari daging atau jeroan daging kerbau. Empal gentong berasal dari kata *empal* dan *gentong*, empal adalah daging atau jeroan daging kerbau yang dimasak, sedang gentong adalah sebuah wadah yang terbuat dari gerabah. Jadi, empal gentong adalah daging yang dimasak dalam wadah berupa gentong yang terbuat dari gerabah.

Menurut beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa empal gentong awalnya berasal dari daerah Plered (Kab. Cirebon). Empal gentong bisa disantap dengan nasi atau lontong serta *kerupuk rambak* (kerupuk yang terbuat dari kulit

kerbau). Empal gentong merupakan perpaduan antara masakan India, Cina, dan pribumi. Sejalan dengan perkembangan zaman, dengan semakin sedikitnya hewan kerbau, kemudian para pedagang menyesuaikan dengan keinginan para pelanggan, maka panjaul empal gentong mengganti daging kerbau dengan daging sapi.

Pada awalnya pedagang Empal Gentong hanya berjualan di daerah sendiri dengan membuka warung atau berjualan di depan rumahnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan didorong oleh keinginan agar mengalami kemajuan dalam berdagang, maka mulailah mereka ke luar daerahnya sendiri. Mereka berjualan dari kampung ke kampung dengan cara dipikul, satu tempat untuk masakan empal dan satu lagi untuk bumbu dan peralatannya. Untuk memasarkan dagangannya, para pedagang ini berangkat dari rumah pada pagi hari dan pulang pada sore hari, hal ini tidak terkait dagangannya laku terjual semua atau tidak, tetap mereka pulang pada sore hari. Berbeda dengan masa sekarang, pedagang empal gentong tidak lagi memakai pikulan untuk memasarkan dagangannya, tetapi sudah memakai gerobag dorong. *Pikulan* sebagai ciri khas jualan empal gentong masih dipertahankan, tetapi hanya ditempatkan di muka warung tempat jualan.

Untuk memenuhi selera makan masyarakat, saat ini empal gentong dapat dijumpai di rumah makan atau warung kaki lima di seluruh pelosok kota Cirebon, dan juga masih banyak dijumpai pedagang yang berkeliling antarkampung. Masyarakat Cirebon sendiri atau para wisatawan yang menggemari makanan Empal Gentong dapat menikmatinya di daerah mana saja di Cirebon, misalnya, di Jl. Crukuk dengan empal gentong “Mang Darma”nya, Jl. Tuparev (Daerah Gunungsari), Jl. Tentara Pelajar, Pasar Pagi, Pasar Kanoman, dan juga bisa ditemui di arena pasar malam dalam rangka peringatan Maulud Nabi yang diselenggarakan di keraton-keraton Cirebon atau pun di banyak tempat lainnya.

Prosedur Pamasaran

Pada awalnya pedagang empal gentong memasak sendiri barang dagangannya dibantu oleh anggota keluarganya. Dagangan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya saja Mereka berjualan di depan rumah. Secara perlahan, tapi pasti mereka berjualan keluar daerah. Banyak pedagang dari daerah Plered berjualan ke daerah lain (Sumber dan kota Cirebon). Mereka berjualan dengan mendorong gerobak dagangannya. Tempat mereka berjualan bisa di pinggir jalan atau trotoar dengan membuat tenda sebagai pedagang kaki lima.

Pada masa sekarang pedagang Empal Gentong sudah banyak menempati bangunan semi permanen atau permanen dengan cara sewa atau membangun sendiri tempat jualannya. Para pedagang yang menempati bangunan milik sendiri atau pun sewa, memasak sendiri makanannya, tanpa harus membeli ke daerah Plered. Para pedagang jenis ini, biasanya mempekerjakan orang luar yang diberi upah. Mereka berdagang dengan skala yang lebih besar, artinya para pedagang ini menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memanjakan para pembeli, misalnya tempat yang nyaman dengan tata ruang yang baik, dan menyediakan menu makanan tambahan yang lebih variatif. Hal ini berbeda jauh dengan pedagang yang mangkal di pinggir jalan (PKL), mereka menyediakan fasilitas yang seadanya.

Makanan empal gentong bukan hanya santapan masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi sekarang sudah merupakan menu makanan semua lapisan sosial masyarakat. Pada saat ini makanan empal gentong sudah merupakan menu makanan tambahan dalam acara pernikahan, khitanan, baik yang diselenggarakan di rumah ataupun di hotel-hotel berbintang.

Cara Pembuatan dan Penyajian

Bahan pokok:

- a. Daging dan jeroan sapi (daging kerbau sudah jarang yang menggunakan)
- b. Minyak goreng
- c. Kelapa
- d. Serai, kucai, dan daun salam.

Bumbu-bumbu:

Bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, ketumbar, jinten, cengkeh, kapolaga, gula pasir, dan garam.

Cara Pembuatan:

1. Daging dan jeroan yang sudah dibersihkan direbus sampai setengah matang.
2. Rebus air dalam gentong, masukan kaldu di tambah bumbu yang sudah dihaluskan (bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, ketumbar, jinten, cengkeh dan kapolaga) masukan gula pasir dan garam. Sebelumnya bumbu ini digoreng/ditumis disertai daun salam dan serai.
3. Masukkan daging dan jeroan ke dalam gentong yang sudah berisi kaldu, kemudian diaduk sampai kental, tunggu sampai matang dan siap disajikan.

Cara Penyajian:

Pertama Setelah daging dan jeroan matang, api di dalam tungku dikesilkan. Pembeli bebas memilih kesukaannya, daging, jeroan atau pun dicampur keduanya. *Kedua*, daging dan jeroan ditiriskan, kemudian dipotong-potong sebesar dadu atau menurut selera. *Ketiga*, Ditempatkan ke dalam mangkok setelah diisi nasi atau lontong, kemudian ditaburi goreng bawang dan irisan kucai ditambah dengan sambal kering, dan empal gentong siap dihidangkan.

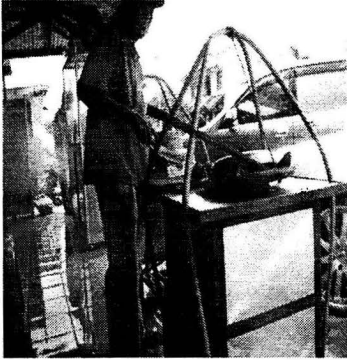


Foto 3: alat meracik Empal Gentong.
(Sumber:Dok.Pribadi,2011)



Foto 4: Empal Gentong siap santap
(Sumber:Dok,Pribadi,2011)

NASI LENGKO.

Pada awalnya keberadaan nasi lengko ini merupakan daya kreativitas masyarakat Cirebon, atas kelangkaan bahan makanan pasca kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa itu bagaimana caranya agar bisa makan dan tidak kelaparan, dengan bahan-bahan yang dianggap murah dengan persediaan yang cukup melimpah hanya ada tempe, tahu, dan taoge, maka dibuatlah jenis makanan yang terbuat dari berbagai jenis bahan tersebut dan dikemudian hari jenis makanan ini disebut Nasi Lengko.

Dilihat dari kosa katanya Nasi lengko berasal dari nasi (sega) dan Langko. Lengko berasal dari kata "*langka*" dalam bahasa Cirebon berarti tidak ada. Kata langka ini bukan berarti yang berjualan itu jarang ditemui, tetapi kata langka di sini adalah karena nasi lengko ini adalah makanan yang sangat sederhana. Ada juga pendapat yang mengartikan bahwa nasi lengko itu adalah akronim

dari kata *lengkap* dan *ekonomis*, dilihat dari kesederhanaan menu yang disajikan.

Sama seperti pedagang makanan tradisional lainnya, nasi lengko ini dijual di rumah untuk konsumsi warga di sekitarnya saja. Kemudian pada tahun 1950-an, di kota Cirebon terdapat pasar malam yang dipusatkan di daerah Lawanggada dengan sebutan Pasar Mambo, mulailah para pedagang ini menjual masakan nasi lengko di Pasar Mambo. Sejalan dengan perjalanan waktu, pedagang nasi lengko bukan hanya di Pasar Mambo, apalagi setelah Pasar Mambo tidak ada lagi sekitar tahun 1970-an, lambat laun karena kederhanaan menu yang disajikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat kebanyakan, maka daerah penjualannya menyebar ke seluruh pelosok Cirebon. Mereka berjualan nasi lengko menggunakan trotoar jalan/pinggir jalan dengan memasang tenda, dan juga dengan gerobak dorongnya. Pedagang semacam ini bisa ditemui di Jl. Tentara Pealajar, Jl. Perjuangan, Jl. Tuparev, dan juga di banyak tempat di daerah Cirebon.

Dalam perkembangan selanjutnya, para pedagang nasi lengko yang mempunyai modal cukup besar mereka membuat tempat usaha yang cukup representatif untuk melayani para pelanggan. Selain mempunyai tempat*sendiri, mereka juga menyewa kios-kios yang disediakan oleh para pemodal. Sebagai contoh, di pusat keramaian “Grage Mall”, “PGC” dan “Yogya Grand Centre” jl. Siliwangi, di stasion kereta api Kejaksan, dan yang paling terkenal ada di Jl. Pagongan kota Cirebon.

Proses Pembuatan dan Penyajian:

Bahan-bahannya:

Nasi putih, tempe, tahu, mentimun, tauge, kucai, bawang merah, kacang tanah, sambal, kecap manis/asin.

Prose pembuatan:

- Tempe digoreng kemudian dipotong-potong.
- Tahu digoreng di potong berbentuk dadu.
- Tauge direndam di air panas, kemudian tiriskan
- Mentimun diiris kecil-kecil.
- Kucai diiris kecil-kecil,
- Bawang diiris kemudian digoreng.
- Kecap manis/asin
- Kacang tanah digoreng kemudian dihaluskan.

Cara Penyajian:

Nasi putih disiapkan di atas piring, tahu dan tempe yang sudah diiris-iris ditaburkan di atas nasi putih, ditambah tauge, kucai, bawang goreng, sambal kacang dan kecap, kemudian makanan ini siap dihidangkan. Tempe dan tahu akan lebih enak rasanya, jika digoreng menggunakan bara arang atau kayu bakar.



Foto 5 : Bahan matang Nasi Lengko
(Sumber:Dok.Pribadi,2011)

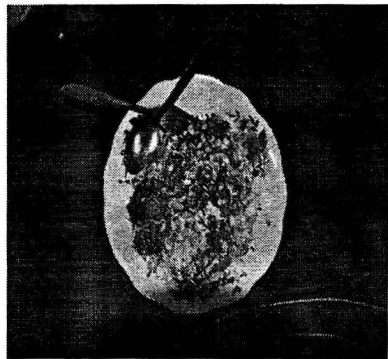


Foto 6 : Nasi Lengko siap santap.
(sumber:Dok.Pribadi,2011)

TAHU GEJROT

Pada awalnya pedagang tahu gejrot hanya dijual di sekitar daerah Ciledug. Ciledug secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Cirebon. Daerah Ciledug adalah daerah sentra pembuatan tahu yang merupakan tempat bahan pokok jajanan tahu gejrot. Sekitar awal kemerdekaan daerah ini merupakan area pertanian yang berhasil, penghasilan terbesar ke dua setelah padi adalah kedelai. Atas dasar kreativitas penduduk setempat, maka hasil panen kedelai selain dijual secara utuh, mereka juga mengolah kedelai tersebut menjadi komoditas lain yaitu tahu, yang kemudian terkenal menjadi jajanan tahu gejrot.

Pada dasarnya makanan tahu gejrot ini merupakan santapan masyarakat biasa, atau boleh dikatakan merupakan makanan pedesaan. Seperti makanan khas lainnya, semula hanya dikonsumsi oleh orang biasa, tetapi pada saat sekarang jajanan tahu gejrot diminati oleh semua kalangan. Bukan hanya dijual di pinggir jalan/trotoar (bisa dijumpai di pasar Kanoman) atau dijual sambil berkeliling kampung, tetapi sudah banyak yang mangkal dengan menyewa tempat di pusat keramaian, misalnya, di Mall “Grage Mall”, “Yogya Dept Store”, dan lain-lain. Selain sebagai jajanan yang dijual bebas, tahu gejrot juga dipesan oleh orang yang punya hajatan sebagai makanan tambahan, baik yang diadakan di rumah, di balai pertemuan, atau pun di hotel-hotel.

Makanan tahu gejrot ini merupakan perpaduan masakan Cirebon dengan Cina. Saat ini belum ada keterangan yang pasti siapa dan kapan tahu gejrot mulai dibuat, dan sampai sekarang masyarakat mengetahui bahwa makanan tahu gejrot adalah asli dari daerah Ciledug.

Prosedur Pemasaran

Pedagang tahu gejrot bukan hanya didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi banyak juga kaum perempuan. Cara mereka berjualan itu sangat berbeda, jika kaum lelaki jualan tahu gejrotnya dipikul, sedangkan kaum perempuan dengan cara *disunggi* (meletakkan dagangan di atas kepala). Mereka berjualan dari kampung ke kampung, berangkat pagi dan pulang pada sore harinya.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan semakin meningkat, mereka mulai memasarkan dagangannya ke luar daerah Ciledug. Mereka berangkat dari Ciledug dengan menggunakan kendaraan kereta api atau pun menggunakan angkutan kota/elf jurusan Cirebon-Ciledug. Pada masa sekarang banyak pedagang tahu gejrot yang berdiam di kota Cirebon, mereka mendapat bahan tahu diantar oleh pemasok dari daerah Ciledug, yang khusus datang untuk memenuhi pesanan para pedagang. Ruang lingkup wilayah pemasaran tahu gejrot bukan hanya di daerah sekitar Cirebon, tetapi sudah merambah ke kota lainnya, misalnya; daerah Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah.

Ada dua cara pedagang tahu gejrot dalam memasarkan dagangannya, pertama, para pedagangan memasarkan dagangannya hasil produksi tahunya sendiri. Kedua, para pedagang membeli tahu dari pabrik yang kemudian dipasarkannya. Setiap pedagang, terutama laki-laki membawa tahu sebanyak 5.000 biji, sedangkan bagi perempuan biasanya hanya 2.000 – 3.000 biji.

Proses Pembuatan dan Penyajian

Bahan:

Tahu matang/sudah digoreng.

Bumbu:

Cabe rawit, bawang merah, bawang putih, kecap manis, gula merah, garam dan air.

Proses pembuatan:

Bawang putih dan gula merah dihaluskan kemudian ditambah dengan kecap manis dan air kemudian diwadahi ke dalam botol.

Penyajian:

Tahu gejrot biasanya dihidangkan dalam dua buah *pisin* berbentuk bulat yang terbuat dari tanah liat, besarnya berukuran telapak tangan orang dewasa. Pisin pertama berisi ulekan bawang merah, cabe rawit dan garam, kemudian ditambah kuah air gula merah, pisin kedua berisi tahu goreng yang telah dipotong-potong. Pisin pertama ditumpahkan pada pisin kedua dan jajanan ini siap dihidangkan.

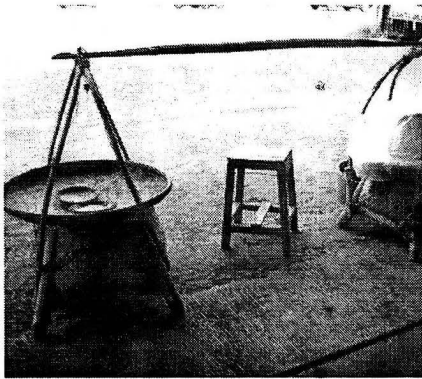


Foto 7 : Pikulan Tahu Gejrot
(Sumber: Dok, Pribadi, 2011)

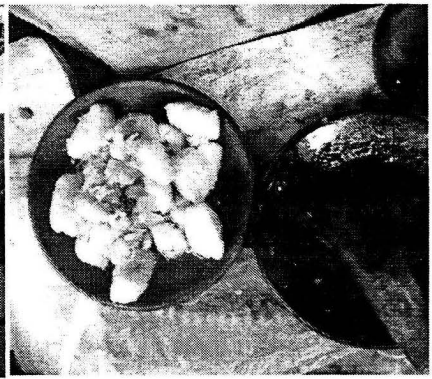


Foto 8: Tahu Gejrot siap santap
(Sumber:Dok. Pribadi, 2011)

DOCANG

Docang merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang ada di wilayah Cirebon. Jika ditelusuri siapa dan kapan pertama kali makanan docang ini dibuat, sampai saat ini belum ada

keterangan yang pasti, dan yang jelas makanan docang adalah konsumsi masyarakat umum. Makanan ini sudah ada di Cirebon sejak tahun 1960-an, dan sudah dijual di pasar-pasar tradisional. Docang merupakan singkatan dari kata *Do* dari *Godogang* dan *Cang* dari *Kacang* (oncom/dage) yang dihaluskan. Makanan docang dapat dijumpai di seluruh pelosok kota Cirebon, misalnya, daerah pasar tradisional Pasar Pagi, Pasar Kanoman, Pasar Jagasatru, Jl. Kesambi (pada sore dan malam hari), sekitar Jl. Tentara Pelajar (Gunungsari), dan di tempat lainnya.

Pada awalnya docang sebagai makanan orang dengan status sosial menengah ke bawah, tetapi pada saat ini makanan/jajanan docang sudah merupakan konsumsi dari semua lapisan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kendaraan roda empat yang parkir di pinggir jalan hanya ingin menikmati jajanan Docang yang dijual di kaki lima. Setelah jajanan docang ini masuk ke pusat perdagangan modern, harkat dan martabat pedagang docang yang semula hanya berdagang di rumah, di emperan toko dan di atas trotoar sebagai pedagang kaki lima menjadi naik.

Prosedur Pemasaran

Awalnya para pedagang docang hanya berjualan di depan rumahnya sebagai pekerjaan tambahan, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi tambahan penghasilan keluarga. Para pedagang docang kebanyakan didominasi oleh para wanita sedangkan laki-laki hanya sebagai pembantu dalam melayani pembeli.

Cara mereka berjualan, jika berjualan di halaman rumah bahan yang sudah dimasak bisa langsung digelar di tempatnya. Kemudian jika mereka berjualan jauh dari rumah, bahan yang sudah dimasak di rumah kemudian dibawa ke tempat mereka berjualan. Untuk berjualan di tempat lain misalnya di pinggir jalan/trotoar, mereka menggunakan gerobak dorong untuk memasarkan

dagangannya, di tempat tersebut pedagang membuat tenda dengan menyediakan tempat makan seadanya. Pedagang semacam ini bisa dijumpai di Jl. Tentara Pelajar, Jl. Kesambi, di pasar Kanoman dan pasar-pasar tradisional lainnya. Kemudian selain itu dapat juga ditemui di pasar malam yang diadakan oleh Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman dan Keraton Kecerbonan dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan tempat yang sudah disediakan, misalnya di pusat perbelanjaan “Grage Mall” di Jl. Tentara Pelajar atau pun “Yogya Grand Centre” di Jl. Karanggetas, dan di Stasiun Kereta Api Kejaksan, para pedagang ini hanya membawa bahan mentah untuk dimasak di tempat tersebut atau pun membawa bahan yang sudah matang.

Para pedagang Docang yang menggunakan gerobak dorong, mereka berangkat dari rumah pagi hari untuk memasarkan dagangannya, mungkin tidak sampai siang hari dagangannya sudah habis, pedagang ini bisa ditemui di Jl. Tentara Pelajar. Ada juga pedagang yang menjual docang pada malam hari, misalnya yang berada di Jl. Kesambi.

Proses pembuatan dan penyajian

Bahan:

Daun singkong, oncom (dage), beras, kelapa muda, tauge, dan kerupuk ikan.

Bahan kuah:

Santan, serai, daun salam, dan jahe.

Bumbu:

Ketumbar, bawang merah, dan bawang putih.

Proses pembuatan:

Daun singkong direbus hingga matang, oncom atau dage

dihaluskan, beras dibuat lontong, jahe dimemarkan, dan kelapa muda diparut. Ketumbar, bawang merah, dan bawang putih dihaluskan. Santan, serai, daun salam, oncom/dage, bumbu halus, serai dan jahe direbus hingga matang dan meresap sebagai bahan kuah.

Penyajian:

Irisan lontong, daun singkong, tauge, kelapa parut ditempatkan dalam mangkok atau piring, kemudian tuangkan kuah dengan taburan remasan kerupuk, dan jajanan docang siap dihidangkan dan paling enak dimakan dalam keadaan hangat.

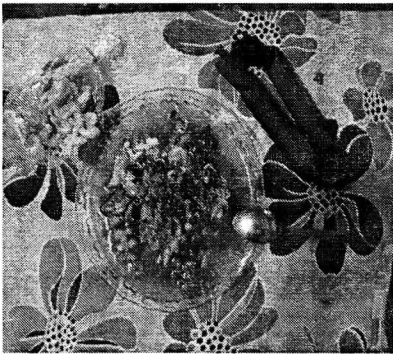


Foto 9 : Makanan Docang siap santap
(sumber:Dok. Pribadi, 2011)



Foto 10: Bahan Docang
(sumber:Dok. Pribadi, 2011)

KELEPON

Kelepon merupakan salah satu jenis jajanan pasar. Pada hari biasa jenis makanan ini bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional, misalnya di Pasar Pagi, Pasar Kanoman, dan Pasar Jagasatru.

Menurut pendapat beberapa pedagang, kelepon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau jauh sebelumnya, karena pada masa penjajahan Belanda makanan ini sudah diperdagangkan.

Ada suatu kepercayaan yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat yang masih memegang tradisi nenek moyangnya, jika telah sembuh dari penyakit bisul, maka pihak keluarga mengirimkan jajanan kelepon kepada para tetangganya sebagai rasa syukur. Meskipun demikian jajanan kelepon tidak termasuk dalam *sesajen* untuk upacara keagamaan.

Dalam perkembangan selanjutnya, penganan kelepon bukan hanya sebagai penganan untuk selamat (syukuran), tetapi saat ini sudah banyak diperdagangkan di pasar-pasar tradisional.

Cara Pembuatan dan Penyajian

Bahan:

Tepung beras ketan putih, kelapa sedang, daun pandan, gula merah, vanila, garam, air dan daun pisang klutuk.

Cara Pembuatan:

Bahan tepung beras ketan diayak. Gula merah diiris kecil-kecil. Daun pandan dihaluskan dan dicampur air kemudian disaring diambil airnya. Parutan kelapa dikukus agar tidak cepat basi. Tepung beras ketan yang sudah diayak, air pandan dan vanili dicampur kemudian diaduk sehingga menjadi adonan. Adonan ini dibentuk menjadi bulatan sebesar kelereng dan di dalamnya diisi dengan gula merah.

Siapkan air di dalam panci kemudian panaskan hingga mendidih, kemudian masukkan bulatan adonan tersebut satu per satu ke dalam air yang sudah matang sampai mengapung. Bulatan yang mengapung (matang) ditiriskan dan dibiarkan hingga dingin. Setelah bulatan (kelepon) yang sudah dingin kemudian disimpan di nampah

yang sudah dilapisi daun pisang klutuk.

Cara Penyajian:

Jika kelepon ini dibeli di pasar tradisional biasanya dibungkus dengan daun pisang, dan bisa langsung dimakan, tetapi jika dihidangkan untuk menyambut tamu atau pun sebagai camilan sendiri di rumah, kelepon ini bisa dihidangkan dengan pisin keramik dan lebih nikmat disertai dengan secangkir kopi/teh hangat.



Foto 11: Jajanan Kelepon siap santap
(Sumber: Dok, Pribadi, 2011)

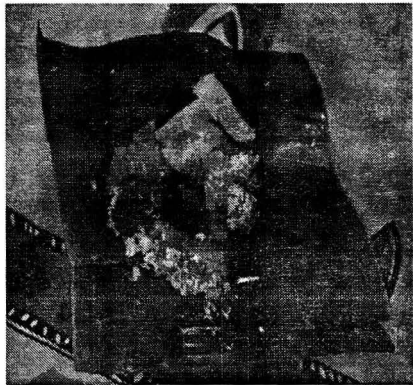


Foto 12: Jajanan pasar
(sumber:Dok, Pribadi, 2011)

PENUTUP

Sebelum Cirebon menjadi daerah kesultanan, Cirebon sudah menjadi daerah pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai etnis, baik nusantara, maupun mancanegara seperti: Arab, Cina, India, dan Eropa. Mereka membawa adat istiadat cara memasak dan menyajikan sesuai dengan selera masing-masing.

Masyarakat Cirebon mempunyai menu makanan sendiri. Menu makanan asli (khas) timbul dari lingkungan sendiri, dan hampir dipastikan tidak diketahui asal mula pembuatnya, serta pasti merupakan warisan yang turun temurun. Makanan khas Cirebon bukan hanya beras sebagai bahan pokoknya, tetapi bisa juga dari bahan pokok ketan atau pun kedelai. Makanan khas Cirebon merupakan perpaduan antara masakan pribumi dengan Arab dan Cina. Ada beberapa yang termasuk ke dalam makanan khas Cirebon, di antaranya adalah nasi (sega) jamblang, sega lengko, empal gentong, docang, tahu gejrot, dan lain-lain.

Nasi jamblang dikenal oleh masyarakat Cirebon dengan sebutan sega jamblang. Nasi jamblang merupakan nasi putih yang dibungkus daun jati dan besarnya tidak lebih dari kepalan tangan orang dewasa. Keberadaan sega lengko merupakan daya kreativitas masyarakat terhadap kelangkaan bahan makanan saat itu. Bahan pokok makanan yang tersedia saat itu hanya ada tempe, tahu, dan taoge. Bahan-bahan ini diolah dan di kemudian hari makanan itu disebut nasi lengko. Empal gentong merupakan masakan yang terbuat dari daging atau jeroan daging sapi/kerbau. Empal adalah daging atau jeroan yang dimasak, sedangkan gentong adalah wadah yang terbuat dari gerabah, jadi empal gentong adalah daging atau jeroan yang dimasak dalam wadah berupa gentong yang terbuat dari gerabah. Docang merupakan jajanan yang terbuat dari godogan oncom/dage yang haluskan. Tahu gejrot berasal dari daerah Ciledug, makanan ini merupakan perpaduan antara masakan Cirebon dengan Cina.

Pada awalnya semua jenis makanan khas Cirebon merupakan konsumsi masyarakat menengah ke bawah, tetapi pada saat ini semua jenis makanan khas tersebut sudah merupakan konsumsi semua lapisan masyarakat. Hal ini ditandai bukan hanya dijual di pinggir jalan sebagai pedagang kaki lima, tetapi sudah

masuk ke supermarket di Cirebon, bahkan banyak juga yang memakai menu pelengkap dalam rangka hajatan di hotel-hotel berbintang.

DAFTAR PUSTAKA

Rochani, Ahmad Hamam, 2008.

Babad Cirebon. Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon

Ranjabar, Jacobus, 2006.

Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu pengantar, Bogor: Ghalia Indonesia..

M. Noer, Nurdin, 2009.

Menusa Cerbon, sebuah Pengantar Budaya, Cirebon: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.

Dahuri, Rokhmin dkk, 2004.

Budaya Bahari, Sebuah Apresiasi di Cirebon. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Herayati, Yetti , dkk. 1986."

Makanan: Wujud Variasi dan Fungsi serta Cara Penyajian pada Orang Sunda Daerah Jawa Bara Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

PENGAJIAN NASKAH KUNA
Bergelut dengan Aksara dan Bahasa Daerah

Agus Heryana
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung
e-mail: agus.yanal7@yahoo.co.id

ABSTRACT

Manuscripts are a relic from the past in literal forms that informs the socio-cultural of human life in their times. Their propagations were done by copying the vulnerable and aberration scripts. The obstacle in reading and studying the manuscripts were that because they almost used unknown literacies and local languages. There are stages to study the manuscripts, i.e. manuscripts collection, provision of specific notes on each script that does not close the possibility of given rise to many versions, the comparison text, transliteration local literacy to the Latin, translation, and the disclosure of meaning or a spiritual message contained in a manuscript text.

~

Keywords: manuscript, text, manuscript collection.

A. PENDAHULUAN

Peninggalan masa lalu sebuah suku bangsa di Nusantara tidak saja dalam wujud benda melainkan pula dalam wujud non-benda. Wujud non-benda ini biasanya berupa gagasan, ide, atau perasaan leluhur bangsa yang banyak ditulis dalam aksara daerah. Salah satu tinggalannya berupa sastra lama yang berisi kisah dalam bentuk prosa atau puisi. Oleh karena itu sastra lama atau menurut Robson (1978: 5) disebut sastra klasik adalah perbendaharaan pikiran dan cita-cita para nenek moyang. Pentingnya sastra lama dalam kerangka membangun karakter bangsa belum disadari sepenuhnya oleh setiap orang. Penyebabnya, seperti dikemukakan Ikram (1997: 25): *pertama*, belum banyak digarap menjadi bacaan yang mudah dipahami dan diterima masyarakat sedangkan bukannya yang "asli" – yang berupa tulisan tangan- tersimpan dalam jumlah terbatas dan tempat penyimpanannya pun biasanya tidak diketahui khalayak ramai. *Kedua*, sastra lama disalin dengan tangan yang memakan waktu lama. Bahkan pembuatan bahan tulisannya kerap kali merupakan pekerjaan yang rumit. Hal ini juga yang menyebabkan karya sastra tidak pernah ada dalam jumlah besar. Di samping itu perlu ditambahkan pula sebab lain yang bersifat teknis, yaitu (1) Naskah ditulis dalam aksara non-Latin (aksara daerah: seperti aksara Sunda Kuna, aksara Cacarakan, dan atau aksara Pegon), dan tidak semua orang bisa membacanya; (2) Naskah ditulis dalam bahasa daerah yang memerlukan penguasaan bahasa teks; (3) Naskah berkaitan dengan konteks budaya pada saat naskah itu ditulis. Hal ini menunjukkan keterkaitannya dengan bidang ilmu lain, seperti: sosiologi, antropologi budaya, linguistik, dan sebagainya.

Teks naskah kuna merupakan sastra lama yang dikenal oleh sebagian masyarakat Sunda masa itu. Teks naskah ditulis menggunakan berbagai aksara daerah (Sunda) yang tidak semua

orang Sunda sekarang ini dapat membacanya apalagi bukan orang Sunda. Isinya pun dapat dibagi ke dalam 12 kelompok, yaitu adalah (1) agama, (2) bahasa, (3) hukum/aturan, (4) kemasyarakatan, (5) mitologi, (6) pendidikan, (7) pengetahuan, (8) primbon, (9) sastra, (10) sastra sejarah, (11) sejarah, (12) seni (Ekadjati, 1988: 34).

Makna cerita yang disampaikan nenek moyang melalui naskah itu tidak mungkin sampai kepada orang banyak apabila cerita tersebut masih dalam bentuk aksara dan bahasa daerah yang tidak dikenali umum lagi. Kondisi ini mengharuskan penelitian dilakukan melalui ilmu filologi yang menangani masalah pernaskahan. Buah dari ilmu filologi ini tidak lain adalah pengalihaksaraan dan penerjemahan. Pengalihaksaraan dilakukan untuk "mengganti" aksara teks (aksara daerah) ke dalam aksara Latin yang sudah dikenal umum. Demikian pula penerjemahan diperlukan untuk membuat orang mengerti dan memahami cerita yang diterjemahkannya itu. Apalagi dihadapkan pada ketuaan umur naskah yang biasanya diiringi dengan bahasa yang sudah tak dikenali lagi. Oleh karena itu tanpa terjemahan yang memadai isi naskah tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal baik oleh orang ahli, maupun yang bukan ahli. Jadi, langkah menghadirkan sebuah teks naskah (Sunda) dalam bentuk edisi teks adalah sebagai berikut: *pertama*, transliterasi atau alih aksara Pegon ke dalam aksara Latin; *kedua*, menerjemahkan teks dari bahasa sumber (bahasa Sunda) ke bahasa sasaran (bahasa Indonesia); *ketiga*, memerikan kandungan cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya (Sunda).

B. PENYALINAN DAN PENYIMPANGAN TEKS

Pada masa teknik percetakan belum mapan, karya sastra lama yang digemari atau dihargai tinggi biasanya ditulis dalam naskah. Naskah itu akan disalin berulang-ulang sehingga menimbulkan

turunan yang banyak. Dalam proses penyalinannya, para penyalin merasa memiliki kebebasan untuk menambah uraian pada cerita, mengurangi hal-hal yang mengganggu dan mengubah cerita di sana-sini agar lebih sesuai dengan selera atau selera masyarakat semasanya (Sujiman, 1988:59).

Penyalinan naskah memunculkan berbagai risiko yang sifatnya sangat manusiawi, seperti timbulnya berbagai perbedaan, perubahan, bahkan penyimpangan bacaan dari naskah aslinya, baik perubahan tersebut disengaja atau tidak (disengaja). Biasanya, bentuk penyimpangan bacaan yang diakibatkan oleh faktor kesengajaan (non-mekanis) dari penyalin itu berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan kata atau kalimat, sedangkan yang diakibatkan oleh faktor ketidaksengajaan (mekanis) dari penyalin di antaranya berupa penyimpangan dalam bentuk *ablepsie* (kesalahan bacaan atas huruf atau kata yang hampir sama bentuknya), *ditografi* (pengulangan penulisan beberapa kata atau kalimat), *haplografi* (hilangnya satu kata atau lebih karena ada kata atau rangkaian huruf yang sama terulang dua kali berturut-turut), dan *lakuna* (terlampauinya beberapa kata atau kalimat).

Kondisi semacam ini menimbulkan masalah dalam penelitian (studi) sastra. Peneliti dihadapkan pada sejumlah naskah salinan untuk sebuah judul cerita yang satu dengan yang lainnya berbeda. Padahal penelitian apa pun yang didasarkan atas sebuah teks seyogyanya menggunakan teks yang seasli, semurni, atau sesempurna mungkin (Sutrisno, 1981: 8). Apabila tidak demikian kemungkinan besar simpulan yang diperolehnya akan jauh menyimpang dari yang semestinya. Di sinilah pentingnya ilmu filologi yang menjadikan naskah-naskah sebagai objek penelitiannya.

Pengertian filologi menurut Pradotokusumo (2005: 9) adalah cabang ilmu sastra yang objek studinya secara tradisional

memasalahkan variasi teks. Dalam perluasan artinya, filologi adalah ilmu bahasa dan studi tentang kebudayaan bangsa-bangsa beradab seperti yang diungkapkan dalam bahasa, sastra, dan agama mereka, terutama yang sumbernya didapat dari naskah-naskah sehingga secara umum dapat disebut ilmu tentang naskah-naskah. Dalam pada itu inti kegiatan filologi adalah penentuan bentuk teks yang paling dapat dipercaya. Untuk menyusun kembali teks yang demikian diperlukan pengetahuan mengenai pengarangnya, kebudayaan, dan tradisi yang mempengaruhi karyanya (Sutrisno, 1979: 46-8)

Dalam pandangan sastra, sebuah karya sastra merupakan teks cerita yang memiliki "kerangka hidup" sendiri. Teks karya sastra adalah sesuatu yang konstan, mantap, tidak berubah sepanjang masa sesuai dengan ciptaan penulisnya. Artinya, perubahan dalam teks mengakibatkan perubahan dalam arti dan makna, baik keseluruhan maupun bagian dan anasir-anasirnya (Teeuw, 1984: 250).

Pandangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan; oleh karena pada teks sastra lama banyak ditemukan penyimpangan sebagai akibat penyalinan. Sesungguhnya penyalinan adalah salah satu upaya memperpanjang usia naskah dalam tradisi tulis. Di samping itu melalui penyalinan pula sekurang-kurangnya sebuah naskah menjadi hidup dan tersebar ke berbagai kalangan. Namun demikian sisi lain dari penyalinan naskah berkali-kali itu tidak tertutup kemungkinan timbulnya berbagai kesalahan atau perubahan. Bentuk kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam naskah dapat dirunut pada pandangan Reynold & Wilson (1967: 200-208) adalah sebagai berikut:

- 1) kesalahan yang disebabkan oleh tulisan tangan yang kurang jelas dalam naskah induknya
- 2) kesalahan yang berhubungan dengan pergeseran dalam lafal yang menimbulkan kecenderungan mengubah ejaan asli;
- 3) penghilangan beberapa huruf yang disebut *haplografi* atau

melompat maju dari perkataan ke perkataan yang sama yang disebut *saut du mème au mème* dan kadang-kadang melompat satu baris atau bait;

- 4) tambahan beberapa huruf / kata diulang yang disebut *dittography*;
- 5) pertukaran huruf atau terbalik atau garis puisi tertukar
- 6) perkataan terkena pengaruh perkataan lain yang baru saja disalin sehingga terjadi pengulangan.

Hal itu terjadi karena berbagai sebab, di antaranya penyalin tidak memahami bahasa atau pokok persoalan yang disalinnya, mungkin karena tulisan yang tidak jelas, mungkin pula “kreativitas” penyalin untuk memperbaiki teks yang menurutnya tidak tepat. Di sinilah sesungguhnya peran penting seorang filolog dalam membedah naskah. Peran penting yang disandang filolog adalah menyajikan (*to present*) dan menjelaskan (*to interpretate*) teks (Robson, 1994: 12), yakni membersihkan teks dari berbagai kesalahan dan penyimpangan yang diharapkan dapat mendekati teks asli sebagaimana penulis awal. Upaya mencapai maksud itu, seorang filolog akan melakukan kritik teks terhadap naskah-naskah yang akan digarapnya.

C. KRITIK TEKS

Filologi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari segala segi kehidupan di masa lalu seperti yang ditemukan dalam tulisan (naskah) sebab di dalamnya tercakup bahasa, sastra, adat-istiadat, hukum, dan lain sebagainya (Ikram, 1980: 1). Jadi, secara khusus filologi adalah ilmu yang mempelajari naskah-naskah beserta isi teksnya. Naskah adalah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa lampau (Baried, 1985: 54).

Pada masanya naskah-naskah disalin dengan berbagai keperluan. Penyalinan naskah akan berdampak pada berbagai kesalahan dan penyimpangan yang tidak menutup kemungkinan akan membiaskan makna cerita yang disalinnya.

Frekuensi penyalinan sangat bergantung kepada sambutan masyarakat terhadap naskah. Naskah yang digemari dan atau yang diperlukan masyarakat akan menunjukkan frekuensi penyalinannya tinggi dan sebaliknya bila fekuensi penyalinannya rendah menunjukkan naskah tersebut tidak populer atau tidak digemari atau tidak diperlukan masyarakat.

Penyalinan yang berulang-ulang akan membuka peluang kesalahan dan melahirkan varian-varian yang berbeda. Oleh karena itu guna meluruskan kembali penyimpangan dan kesalahan itu diperlukan peran kritik teks. Jadi, kritik teks adalah kegiatan filolog dalam menempatkan kembali varian yang menyimpang ke tempat yang sebenarnya. Artinya, kritik teks adalah kegiatan menelusur kembali suatu teks dalam bentuknya yang seasli mungkin dengan jalan membandingkan naskah-naskah sejenis dalam segala segi dan aspeknya, mulai dari bentuk tulisan, ejaan, leksikografi, morfologi, sintaksis, sampai kepada isi-ceritanya (Ikram, 1980: 1).

Studi filologi yang menjadikan naskah sebagai objek penelitiannya sudah sangat akrab dengan istilah kritik teks. Tujuan kritik teks adalah menemukan, memperhatikan, dan mengembalikan kata-kata di dalam teks sejelas dan sebaik mungkin (Robson, 1988: 4). Adanya kegiatan kritik teks diharapkan sebuah teks sudah dapat dibersihkan dari kesalahan-kesalahan dan telah tersusun kembali seperti semula sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber untuk kepentingan berbagai penelitian dalam bidang ilmu-ilmu lain. Karena itu, kritik teks dipandang dapat memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti, dan menempatkan teks pada tempatnya yang tepat (Ma'mun, 2008: 29). Sesungguhnya kegiatan

kritik teks merupakan bagian dari langkah kerja filolog dalam upayanya menghasilkan teks yang bebas dari kesalahan atau penyimpangan.

Guna memberi gambaran lebih jelas mengenai tata cara menggarap naskah, berikut dikemukakan secara garis besar penanganan dua naskah yang seversi, yaitu *Wawacan Buhaer* (WB).

Naskah WB merupakan milik *Museum Sri Baduga Bandung* dan EFEO Jakarta. Kedua naskah yang diperoleh di dua tempat tersebut merupakan naskah salinan yang masing-masing memiliki kesalahan dan penyimpangan. Kondisi ini menimbulkan masalah dalam penelitian (studi) sastra. Peneliti dihadapkan pada sejumlah naskah salinan dalam sebuah judul cerita yang satu dengan yang lainnya berbeda. Jika demikian manakah di antara dua naskah WB yang mendekati asli? Di sinilah pentingnya ilmu filologi yang menjadikan naskah-naskah sebagai objek penelitiannya. Inti kegiatan filologi adalah penentuan bentuk teks yang paling dapat dipercaya.

Secara garis besar langkah kerja kritik teks terhadap naskah WB adalah sebagai berikut. *Pertama*, adalah inventarisasi (pendataan) naskah-naskah. Dalam hal ini studi pustaka melalui penggunaan katalog naskah (Sunda) serta kunjungan ke museum sebagai tempat penyimpanan naskah menjadi langkah awal dalam upaya menemukan naskah WB.

Langkah berikutnya adalah pemerolehan naskah WB melalui pemotocopyan dan penginventarisasian naskah WB baik fisik maupun non-fisik (teks). Inventarisasi fisik naskah WB bertalian dengan pencatatan keberadaan naskah (lokasi, pemilik), jenis kertas, aksara, bahasa, ukuran, dan hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata. Inventarisasi non-fisik bertalian dengan isi kandungan naskah (teks). Di samping itu, dicatat pula keterangan lisan yang membantu atau bertalian dengan keberadaan naskah WB.

Kedua, memberikan catatan-catatan tertentu pada setiap naskah yang tidak menutup kemungkinan melahirkan versi-versi. Seyogyanya naskah-naskah yang ditemukan itu dikelompokkan dalam versi-versi dengan berbagai catatan pada masing-masing naskahnya. Namun karena naskah WB yang diperoleh itu hanya 2 buah naskah, maka upaya pengelompokannya tidak dilakukan secara maksimal. Perbandingan selintas dengan membandingkan bacaan yang sama antara kedua WB tidak menunjukkan perbedaan mencolok yang mengarah pada perbedaan versi. Artinya naskah WB yang ditemukan merupakan naskah seversi.

Ketiga, perbandingan teks, perbandingan antar-teks ini akan memperjelas persamaan dan perbedaan teks satu dengan yang lainnya termasuk di dalamnya mengenai sosial budaya pada setiap teks. Perbandingan teks ditujukan untuk memperoleh naskah unggul. Keunggulan naskah didasarkan pada perbandingan-perbandingan berikut, yaitu:

- (1) Perbandingan antarhalaman dengan tujuan mencari kekhasan bacaan dengan anggapan kata-kata atau frasa yang khas dapat menjadi dasar penentuan usia naskah.
- (2) Perbandingan pemenuhan persyaratan pupuh untuk melihat secara saksama konsistensi teks dengan aturan pupuh.
- (3) Perbandingan kuantitas jumlah bait dan pupuh.
- (4) Perbandingan episode ditujukan guna mengetahui alur cerita masing-masing naskah.
- (5) pertalian antarnaskah merupakan hasil himpunan perbandingan teks yang dapat merunut pada penelusuran keberadaan naskah autograp (naskah mula)

Keempat adalah mengalihaksarakan atau mentransliterasikan aksara daerah ke aksara Latin. Upaya ini menurut Baried (1985: 65) sangat penting guna memperkenalkan teks-teks lama yang ditulis dengan huruf daerah, mengingat kebanyakan orang sudah tidak

mengenal atau tidak akrab lagi dengan tulisan daerah itu. Di samping itu, upaya ini pun harus diiringi dengan patokan yang berhubungan dengan pembagian kata, ejaan, dan fonologi, mengingat teks-teks lama tersebut biasanya ditulis tanpa memperhatikan aspek-aspek tata tulis sebagai wujud kelengkapan dalam rangka memahami sebuah teks.

Alih aksara atau transliterasi secara umum diartikan sebagai usaha penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf dari tata tulis tradisional menjadi tata tulis moderen yang mempergunakan huruf Latin, tanpa mengubah bahasa teks. Dengan demikian, sebuah teks naskah kuno akan lebih banyak dibaca orang, lebih-lebih bagi mereka yang menaruh minat ke arah penelitian isi yang terkandung dalam teks naskah kuno tersebut. Oleh karena itu, tugas pokok alih aksara adalah berusaha mengalihaksarakan suatu teks dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

Teks WB ditulis dengan aksara Arab yang mempunyai sistem tersendiri dan berbeda dengan sistem aksara Latin. Dalam hal ini diperlukan pedoman guna penyeragaman penulisannya. Sehubungan dengan itu pedoman yang digunakan adalah *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987; Nomor: 0543 b/u/1987. Di samping itu, dalam hal ejaan digunakan *Pedoman Ejaan Bahasa Sunda yang Disempurnakan* mengingat teks ditulis dalam bahasa Sunda. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be

ت	Ta	t	te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'..'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Pedoman Transliterasi Arab-Latin di atas sebenarnya belum mengakumulasi kebutuhan pentransliterasian untuk naskah yang menggunakan bahasa daerah. Adanya penggunaan aksara-aksara khusus untuk bunyi /c/, /ny/, /g/, /ng/, dan /p/ belum diatur di dalamnya. Oleh karena itu, pedoman yang digunakan adalah kelaziman penuturan bahasa yang bersangkutan.

Naskah WB bukanlah naskah keagamaan melainkan naskah (kelompok) cerita. Tampaknya ada korelasi antara jenis naskah dengan penulisan aksaranya. Naskah keagamaan cenderung menggunakan kaidah-kaidah yang sudah baku di kalangan kelompok terpelajar (pesantren), tetapi untuk naskah-naskah non-keagamaan (cerita) penulisannya cenderung tidak beraturan, lepas dari kaidah-kaidah penulisan. Dasarnya mudah dibaca kembali oleh penyalinnya atau oleh beberapa rekan pembaca naskah lainnya (Iskandarwassid, 1993: 7). Oleh karena itu mudah dipahami naskah WB sebagai naskah non-keagamaan, tulisannya tidak menunjukkan keteraturan bahkan cenderung apa adanya tanpa upaya estetika.

WB yang ditulis dalam huruf Arab dan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantarnya telah melahirkan huruf-huruf tambahan. Kata-kata seperti: *ngedul*, *ngalap*, *candak*, *coba*, *gagak*, *gancang*, *nyai*, *nyieun*, dan sebagainya memerlukan penambahan huruf yang tidak terdapat padanannya dalam bahasa Arab. Menurut Iskandarwassid (1993: 8) huruf-huruf tambahan itu sebenarnya hanya merupakan variasi, "diciptakan" dari huruf-huruf yang telah ada. Seluruhnya ada empat buah, yaitu: /ny/ نَیْ, /g/ گَ , /c/ جَ, dan /ng/ غَ

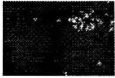
Penggunaan huruf-huruf *mad* (pemanjang) yaitu و آ dan ی yang di dalam Arab-Melayu sering disebut huruf saksi nampak tidak beraturan, misalnya di suku awal kadang-kadang digunakan kadang-kadang tidak, demikian pula di suku tengah dan suku akhir. Sebagai contoh dapat dilihat pada penulisan berikut :





(*Ari anu katiluna // rupa ali kasiatna hiji*)

Perhatikan penulisan *anu*, *tilu* yang menggunakan و saksi sedangkan pada kata *rupa* huruf saksi و tidak digunakan. Padahal menurut aturan wau saksi dipakai pada suku kata kedua dari belakang yang hidup dan berbunyi /u/ (Rosadi, 1960: 17). Demikian pula salah satu syarat ي saksi adalah dipakai pada akhir suku kata yang hidup dan berbunyi /i/ (Rosadi, 1960: 18). Penulisan *ari* sudah benar, tetapi penulisan *ali* tidak sesuai aturan penggunaan ي saksi.

Pemakaian tanda-tanda vokalisasi pada WB umumnya hanya menggunakan : dlamah (...), fatah (...), kasrah (...), sukun (...). Tanda (...) sekaligus digunakan untuk melambangkan bunyi /a/

seperti pada , bunyi /e/ bila huruf berikutnya ي bertanda

sukun seperti pada kata   bunyi /o/ bila huruf berikutnya و bertanda sukun, seperti pada kata



(*dionongkeun*) . Di samping itu digunakan pula tanda  untuk melambangkan bunyi /eu / atau /ö / seperti pada





(*teuing*)






(*ngedul*)

Beberapa tanda baca ditemukan sebagai tambahan. Pada naskah-naskah WB ditemukan tanda  yang berfungsi menandai pergantian padalisan (larik), tanda .  digunakan untuk

pergantian *pada* (bait) dan tanda ٢ (angka dua) sebagai tanda perulangan atau *rajekan*. Tanda  (tidak tetap jumlahnya) digunakan untuk menandai pergantian *pupuh*.

Menurut Hidayat, (1993: 7) tanda  berasal dari huruf ط yang sering digunakan dalam Al-Quran sebagai lambang waqaf mutlak, cepatnya penulisan menyebabkan perubahan aksara seperti huruf /b/ atau rangkaian ك (kaf) dan ا (alif). Keadaan seperti ini secara tradisional ditulis oleh para penyalin naskah, tanpa memahami penggunaannya dalam Al-Quran .

Dalam tulisan Arab huruf-huruf disusun berangkai, demikian pula tulisan pada naskah-naskah Sunda. Karena itu dalam perangkaian huruf umumnya huruf-huruf itu dapat ditempatkan pada semua posisi, baik awal, tengah, maupun akhir. Ada beberapa huruf yang hanya bisa dirangkai pada posisi akhir saja, yaitu : ز ر ذ آ و Dua huruf, yaitu ر dan و sering disambung dengan ه /h/ seperti pada  (*pasrah*) dan و /t/ seperti pada , (*ti kolot*)

Selanjutnya, tanda (/) sebagai tanda pemisah antara larik (*padalisan*) dan tanda  sebagai tanda penutup setiap bait (*pada*) diabaikan. Pengabaian ini disebabkan sistem penulisan disesuaikan dengan konvensi puisi yang ditulis secara per baris (*padalisan*).

Selain itu, huruf kapital digunakan pada setiap awal kata untuk masing-masing bait, kemudian untuk penulisan nama orang, nama tempat, nama gelar kehormatan yang diikuti nama orang, nama-nama

hari, nama-nama khas geografi, dan sebagainya sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku.

Corak bahasa yang menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa sehari-hari menjadi dasar penggunaan ejaannya didasarkan pada *Pedoman Ejaan Bahasa Sunda yang Disempurnakan* tahun 1974.

Kelima adalah terjemahan atau alih bahasa. Diharapkan melalui terjemahan WB dapat dinikmati oleh masyarakat luas yang meminatinya dan mungkin menjadi sumber inspirasi tertentu. Beberapa ilmuwan telah menelaah bermacam-macam cara terjemahan dan menulis tentang dasar-dasar terjemahan pada umumnya. Misalnya, Catford melalui Pradotokusumo (1986:172) berpandangan bahwa terjemahan yang paling mengenai sasaran ialah suatu perpindahan teks dari suatu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain (bahasa sasaran) dengan padanannya. Sedangkan Nida & Taber menyatakan bahwa terjemahan itu adalah pengungkapan kembali pesan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan padanannya yang paling alamiah, pertama artinya kemudian gayanya.

Ada pula yang berpendapat bahwa terjemahan secara harfiah dapat menjaga keaslian, yaitu agar terjemahan tidak menyimpang dari maksud pengarang semula, seperti yang dilakukan Ekadjati (1979: 21) dalam menerjemahkan sebuah teks Sunda dari abad ke-19. Akhirnya Pradotokusumo (1986: 173) mengambil kesimpulan bahwa terjemahan secara harfiah mungkin masih dapat mengungkapkan pesan, apabila teks yang diterjemahkan itu berbentuk prosa dan bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk satu rumpun bahasa, sehingga tidak banyak terjadi perubahan dalam bentuk dan gaya. Namun apabila teks berbentuk puisi, terjemahan secara harfiah akan menimbulkan kekakuan, terutama dalam gaya. Bahasa puisi mempunyai ungkapan-ungkapan yang khas, yang bertalian erat dengan latar belakang kebudayaannya.

Sehubungan dengan beberapa "cara" menerjemahkan sebuah teks seperti diungkap di atas, maka dalam menerjemahkan teks WB tidak dilakukan secara harfiah, tetapi diusahakan mencari padanannya yang sesuai dengan gaya dan artinya. Oleh karenanya, terjemahan yang dimaksud tidak akan memenuhi tuntutan konvensi persajakan sepenuhnya sebagaimana teks sumbernya. Namun diusahakan semaksimal mungkin agar pesan, kesan, dan amanat yang tersurat di dalam teks sumbernya terlukis kembali di dalam teks terjemahan.

Keenam, pengungkapan makna atau pesan rohani yang terdapat dalam sebuah teks naskah. Pengungkapan makna biasanya bertalian dengan sejumlah teori atau metode yang sangat bergantung pada teks naskah itu sendiri. Yang terpenting adalah seorang filolog, peneliti naskah, memiliki kemampuan dalam memahami keseluruhan teks naskah yang dihadapinya.

D. KESIMPULAN

Penggarapan naskah kuna selalu berkaitan dengan bahasa dan aksara yang digunakannya. Oleh karena itu, penguasaan atas bahasa dan aksara teks sebuah naskah –sekurang-kurangnya aksarannya– adalah mutlak. Kemutlakan penguasaan bahasa dan aksara teks naskah akan sangat berperan dalam memahami keseluruhan teks. Tanpa itu semua, nilai-nilai rohani dan informasi budaya sebuah bangsa akan tetap terkubur selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Baried, Baroroh.1985.

Pengantar Filologi. Jakarta: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Ekadjati, Edi S (ed). 1988.

Naskah Sunda. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran dengan The Toyota Foundation

Ekadjati, Edi S dan Undang A. Darsa.2000.

Direktori Edisi Naskah Nusantara. Jakarta : Masyarakat Pernaskahan Nusantara – Yayasan Obor Indonesia

Hidayat, I. Syarief. 2007.

Usul Al-Din Dalam Naskah Sunda: Suntingan Teks dan Kajian Pemikiran Kalami. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Hermansoemantri, Emuch. 1979

Sajarah Sukapura: Sebuah Telaah Filologis. (Disertasi). Jakarta: Universitas Indonesia.

-----1986.

Identifikasi Naskah. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.

----- 1984/1985. *Babad Cirebon: Sebuah Garapan Filologis*.

Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara

Ikram, A. 1980.

Kegiatan Filologi di Indonesia dan Beberapa Metode Kritik

- serta *Edisi Naskah*. Yogyakarta: Penataran Tenaga Ahli Kesusastraan Jawa dan Nusantara Tahap II. ----- 1997.
- Filologia Nusantara*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Iskandarwassid, Syarif Hidayat. 1993.
- Aksara Arab*. Sumedang: Kerjasama Proyek Penelitian Aksara-aksara Daerah, Fakultas Sastra Unpad, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan Yayasan Pembangunan Jawa Barat.
- Nurhayati Ma'mun, Titin. 2008.
- Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Naskah Sunda*. Bandung: Risalah
- Reynolds, L.D. & N.C. Wilson. 1978.
- Scribes & Scholars*. Oxford : Clarendon Press.
- Robson, S.O. 1978.
- Filologi dan Sastra-sastra Klasik Indonesia*. Jakarta: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1994.
- Prinsip-prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta : RUL
- Rosadi, Adit dan Moh. Suhud. 1960.
- Huruf Arab Melayu*. Bandung: Pelajar.
- Sujiman, Panuti. 1984.
- Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- , 1988.
- Memahami Cerita Rekaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- , 1995.
- Filologi Melayu*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sutrisno, Sulastin. 1981.
- Relevansi Studi Filologi*. Yogyakarta: Liberty.
- 1983.

Hikayat Hang Tuah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Teeuw, A. 1984.

Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya

Pradotokusumo, Partini Sardjono. 1984.

Kakawin Gajah Mada, Sebuah Karya Sastra Kekawin Abad ke-20: Suntingan Naskah serta Telaah Struktur, Tokoh, dan Hubungan Antarteks. Bandung : Binacipta.

-----2005.

Pengkajian Sastra. Jakarta : Gramedia

KOTA SUKABUMI DALAM LINTASAN SEJARAH

Herry Wiryono

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail: heri.bpsnt@gmail.com

ABSTRACT

Sukabumi was one area in West Java that has a great potential in agriculture and plantations. With its potential, Sukabumi became the struggle for other regional heads, such as Banten, Cirebon, Mataram and The Dutch colonial.

During its development, Sukabumi changed rapidly, starting from a place called Cikole to an independent district, apart from Cianjur. In order to composite the existing development with the Dutch Colonial, Sukabumi was upgraded to Stadgemeente which has an independent Mayor and city fathers (Gemeenteraad).

Keywords: Sukabumi, development, Dutch colonial.

A. PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah pemerintahan Kota Sukabumi diwarnai dengan perubahan bentuk pemerintahan, yaitu dari bentuk pemerintah lokal dan kabupaten. Perubahan itu sudah berlangsung sejak abad 18 yaitu sejak Wiratanoedatar VI diangkat menjadi Bupati Cianjur dengan pusat pemerintah terletak di Cikole. Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 19 September 1870, pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan struktur pemerintahan, berupa pembentukan beberapa

afdeling di Jawa Barat. *Afdeling* itu antara lain *Afdeling* Sukabumi yang berada di bawah *Residentie Preanger Regentchappen*, yang dipimpin oleh seorang *Assisten Resident*.

Dengan adanya perubahan tersebut, perkembangan perkebunan di daerah Sukabumi meningkat pesat dan kegiatan masyarakatnya pun semakin berkembang. Keadaan demikian mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memisahkan wilayah Sukabumi dari Kabupaten Cianjur dan menjadikan Sukabumi menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Keputusan Sukabumi sebagai Kabupaten tersendiri berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 25 April 1921 Nomor 71 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1921.

Berdasarkan surat keputusan tanggal 1 April 1924, secara resmi Sukabumi ditingkatkan menjadi *Stadgemeente* yaitu daerah otonom yang mempunyai Walikota dan Dewan Kota (*Gemeenteraad*) dengan * Mr. GF Rambonet diangkat sebagai *Burgermeester* pertama pada bulan Mei 1926.

Sebagai sebuah kota, pemerintahan Sukabumi berkewajiban mengurus, mengatur, melayani, membina, dan mengembangkan daerah beserta rakyatnya. Tugas yang menjadi beban pemerintahan Kota Sukabumi berhasil dilaksanakan oleh Rambonet. Keberhasilan Walikota Sukabumi menata dan mengembangkan daerah Sukabumi mendorong pemerintah Belanda menjadikan Sukabumi menjadi ibu kota Priangan Barat dengan surat keputusan nomor 386 tahun 1925.

Sejarah pemerintahan di Indonesia, khususnya di Kota Sukabumi mengalami perkembangan baru sehubungan dengan masuknya balatentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah menaklukkan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal 7 Maret 2602 (1942), keluar Undang-undang Nomor 1 Tahun 2602 (1942) yang berisi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu dan

berlaku di seluruh (bekas) wilayah jajahan Belanda.

Melalui perjuangan yang terus menerus dan tidak kenal lelah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, teks Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Moh. Hatta di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Dengan Proklamasi itu tercapailah Indonesia Merdeka yang telah lama diimpikan oleh bangsa Indonesia (Marwati Djoned Poesponegoro, 1990:89-90).

Dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Kota Sukabumi perlu dilakukan kajian terhadap perubahan-perubahan tersebut dari segi historis. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai sejarah Kota Sukabumi yang difokuskan kepada studi perkembangan pemerintahan yang pernah ada dan terjadi di Kota Sukabumi

Tujuan penulisan sejarah Kota Sukabumi adalah untuk mengungkap latar belakang sejarah Kota Sukabumi sejak lahir sampai tahun 1950 dari berbagai aspek kesejarahan termasuk di dalamnya keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

BAHASAN

1. Kota Sukabumi dari Pra-Sejarah sampai Pemerintah Kolonial Belanda

Di daerah Kabupaten Sukabumi, seperti juga di daerah lainnya di Jawa Barat, tidak pernah ditemukan fosil manusia. Walaupun demikian kehidupan manusia di daerah ini sudah cukup berlangsung lama dengan ditemukannya alat kebudayaan berupa *Kapak Genggam* di daerah Jampang yang sama seperti ditemukan di daerah Sangiran Trinil. Tidak mustahil bahwa kehidupan manusia di daerah Kabupaten Sukabumi sudah berlangsung sejak jaman *Pleistosen Tengah*.

Selain kapak genggam yang ditemukan di daerah Jampang, di daerah lainnya di Sukabumi ditemukan pula hasil kebudayaan manusia lainnya yaitu kapak yang berukuran besar yang mirip fungsinya seperti cangkul yang ditemukan di daerah Cibadak.

Kebudayaan Perunggu Besi yang tumbuh dan berkembang di Asia Tenggara berlangsung sekitar 500 sampai 300 tahun SM, hampir terdapat di seluruh Nusantara. Demikian pula di daerah Sukabumi, kebudayaan perunggu pernah menjadi pelengkap kehidupan manusia dengan diketemukannya nekara berukuran kecil dan patung atau arca binatang yang dapat dipandang sebagai obyek pemujaan atau sebagai jimat.

Peninggalan kebudayaan batu besar atau *Megalithikum* berupa *Menhir*, *Dolmen*, *Punden Berundak*, juga ditemukan di daerah Sukabumi yaitu di daerah Salakdatar, Cengkuk, dan Cikonde (sebelah utara Pelabuhan Ratu).

a) Sukabumi pada Masa Pemerintahan Kerajaan

Sekitar abad kedua Masehi, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Sukabumi termasuk kekuasaan Raja Dewawarman (130-168). Raja Dewawarman adalah raja pertama dari Kerajaan Salakanagara di sekitar Teluk Lada Kabupaten Pandeglang Banten.

Salah satu bukti yang dianggap bahwa Sukabumi termasuk wilayah kekuasaan Raja Dewarman adalah adanya nama Argabinta yang merupakan kata lain dari Argabintaru. Di samping itu, terdapat situs yang dianggap sisa-sisa peninggalan Kerajaan Salakanagara antara lain berupa altar batu Situs Tugugede di daerah Cisolok, arca Siwa dari Jampang Tengah yang kini tersimpan di Museum Negeri Sribaduga Bandung, makam kuno di Gunung Rompong Cigaru Ciemas, Situs Embah Doong di Parakansalak, situs gunung Manglayang di Sukaraja, situs kubur batu Buyut Dalem Sapujagat di Bantarmuncang Cibadak, dan situs

lainnya yang ada di Sukabumi.

Sejak berakhirnya kekuasaan Raja Dewarman, keterangan mengenai daerah Sukabumi sangat sulit diketahui. Demikian pula pada masa pemerintahan Tarumanegara keterangan mengenai daerah Kabupaten Sukabumi pun tidak diperoleh, karena kurangnya sumber atau bahkan tidak ada sama sekali

Keterangan mengenai daerah Sukabumi baru diperoleh sekitar abad ke 11, sebelum munculnya Kerajaan Pajajaran dan sesudah berakhirnya Kerajaan Galuh. Kenyataan ini diperjelas dengan ditemukannya empat buah prasasti di daerah Kabupaten Sukabumi. Keempat prasasti ini terdapat di pinggir aliran Sungai Cicatih, satu buah prasasti terdapat di Kampung Pangcalikan, sedangkan yang tiga lainnya terdapat di Kampung Bantar Muncang Kelurahan Sekarwangi Cibadak.

Bahasa yang digunakan dalam keempat prasasti ini adalah Jawa Kuno dan Huruf Kawi. Pada prasasti tertulis *Syri Jayabhupati Jayamanhen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabhuwanamandaleswaranindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa*, sebagai raja Sunda yang memerintah tahun 1030 M (952 Syaka). Kekuasaan dari kerajaan ini disebut *Prahajyan* Sunda (Danasasmita, 1983-1984: 12).

Prasasti yang ditranskripsikan oleh Pleyte sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor kode D 73, D 97, dan D 98 menegaskan tahun 952 Syaka bulan *kartika* tanggal 12 bagian hari Hari yang *kaliwon Ahad wuku tambir*, Jayabhupati membuat *tepek* (semacam daerah larangan) di sebelah timur Sanghiyang Tapak. Daerah larangan tersebut berupa sebagian dari sungai, jangan ada yang menangkap ikan mulai dari daerah Sanghiyang Tapak tempat pemujaan (kabuyutan) di hulu, sampai batas daerah kabuyutan Sanghiyang Tapak di hilir. Untuk memperkuat tujuan larangan tersebut dibuat piagam yang dikukuhkan dengan seruan,

kutukan, dan sumpah. Isi sumpah tersebut adalah permohonan kepada kekuatan gaib, bahwa siapa yang menangkap ikan agar dibunuh, isap otaknya, belah dadanya, dan minum darahnya, putuskan ususnya, dan habisi jiwanya.

b) Sukabumi di Masa Pemerintahan Kabupaten Cianjur

Sepanjang abad ke 17 daerah Jawa Barat, termasuk di dalamnya daerah Sukabumi, merupakan daerah yang menjadi rebutan penguasa daerah lain seperti; Banten, Mataram, dan Cirebon. Para Sultan Banten sebagai ahli waris Kerajaan Pajajaran menuntut hampir seluruh bagian wilayah Jawa Barat sampai Sungai Citarum.

Pada mulanya wilayah Jawa Barat yang menjadi rebutan tersebut, hanyalah daerah yang mempunyai potensi tinggi dalam bidang ekonomi, yaitu daerah pantai atau pusat-pusat perkebunan, perdagangan, dan daerah yang mempunyai penduduk yang cukup padat. Akan tetapi, pengembangan kekuasaan merambat hingga daerah yang penduduknya kurang dengan nilai ekonomi rendah, termasuk di dalamnya adalah daerah Sukabumi.

Adanya perjanjian 5 Oktober 1705 antara Paku Buwono I Susuhunan Mataram dengan Kompeni Belanda, yang isinya adalah pengakuan Paku Buwono atas kekuasaan Kerajaan Hindia Belanda atas wilayah Jawa Barat, sebagai imbalan bantuan VOC kepada Mataram dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo dan Surapati. Setelah diserahkan kepada VOC situasi Jawa Barat betul-betul berubah, dan sudah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. JP Coen membagi daerah Jawa Barat menjadi wilayah *Batavia en Ommenlanden* yang meliputi sekitar Kota Batavia dan Kampung Baru (Bogor); *Batavia Bovenlanden* yang meliputi daerah Cianjur, Sukabumi, dan Jampang; dan *Preanger Bovenlanden* yang meliputi daerah Kabupaten Bandung,

Sumedang, Karawang, Ciasem, Sukapura, Cirebon, Galuh, dan Gebang.

Pada masa pemerintahan Bupati Cianjur yang keenam yaitu Raden Wiratanudatar (Dalem Condre), tepatnya tahun 1776 dalam wilayah Kabupaten Cianjur diangkat seorang Patih yang membawahi Distrik Gunungparang, Cimahi, Ciheulang, Cicurug, Jampangtengah, dan Distrik Jampangkulon.

Pusat pemerintahan distrik ini terletak di Cikole. Oleh karena itu kepatihan ini disebut Kepatihan Cikole. Dipilihnya Cikole sebagai Ibu kota atau pusat pemerintahan kepatihan, karena lokasi Cikole sangat strategis bila dilihat untuk komunikasi antara Priangan dan pusat pemerintahan Hindia di Batavia. Selain itu, Cikole memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi khususnya di bidang perkebunan.

Sebetulnya tahun 1696, tanaman kopi sudah masuk Pulau Jawa. Saat itu pemerintahan Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Van Riebeeck dan Gubernur Jenderal Zwadecroon menjadikan daerah Priangan atau *Priangerregentchappen* yang meliputi wilayah Bogor, Cianjur, Bandung dijadikan pusat perkebunan kopi yang akan memenuhi kebutuhan pasaran dunia. Dijadikannya wilayah Cianjur, termasuk di dalamnya daerah Cikole pusat perkebunan kopi, mendorong para penguasa Eropa menginvestasikan modalnya di daerah ini. Dengan dibukanya daerah Cikole sebagai pusat perkebunan kopi, sudah barang tentu memerlukan banyak tenaga kerja baik tenaga ahli di bidang tanaman kopi maupun buruh kasar.

Salah seorang pengusaha Belanda yang menanamkan modalnya di daerah Cikole adalah Dr. Andreas de Wilde. Pada tanggal 25 Januari 1813 Andreas de Wilde membeli tanah di Cikole yang sangat luas dengan batas-batasnya, antara lain sebelah timur berbatasan dengan Sungai Cikupa; sebelah selatan dengan

sungai Cimandiri; sebelah utara dengan lereng Gunung Gede Pangrango; dan sebelah barat berbatasan dengan Keresidenan Jakarta dan Banten (Jaya, 2002: 22)

Banyaknya para pendatang dari daerah lain, baik yang datang secara sukarela maupun yang sengaja didatangkan oleh pengusaha perkebunan, membawa perubahan terhadap keberadaan daerah Cikole. Semula daerah Cikole merupakan daerah yang kekurangan penduduk, menjadi daerah yang padat. Apalagi dengan bermukimnya pengusaha, tenaga ahli yang berasal dari Eropa khususnya negara Belanda, harus mendapat perhatian, pengurusan, dan pelayanan yang istimewa.

Dengan semakin padatnya jumlah penduduk yang bermukim di Cikole baik pribumi terutama bangsa Eropa, mendorong warga masyarakat Cikole di bawah pemerintahan Patih Cikole mengusulkan kepada Andries de Wilde yang saat itu menjabat pula sebagai Administratur daerah ini, untuk dijadikan kepatihan tersendiri.

Dengan adanya usulan yang disampaikan oleh warga Cikole dan melihat kondisi yang ada, pemerintah pusat di Batavia yang saat itu dijabat oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles mengabulkan permohonan tersebut. Pada tanggal 8 Januari 1815 Gubernur Jenderal Raffles mengeluarkan surat keputusan yang mengubah nama Cikole menjadi Sukabumi dan dijadikan kepatihan tersendiri dengan nama Kepatihan Sukabumi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles tertanggal 10 September 1870 (staatsblad nomor 121), diadakan perubahan terhadap struktur pemerintahan, berupa pembentukan beberapa afdeling di Jawa Barat antara lain Afdeling Sukabumi di bawah Residentie Preanger Regenchappen. Afdeling Sukabumi beribu kota di Sukabumi, membawahi Distrik Gunung Parang, Distrik Cimahi, Distrik Ciheulang, Distrik

Cicurug, Distrik Pelabuhanratu, Distrik Jampangtengah, dan Distrik Jampangkulon. Saat itu pun, Afdeling Sukabumi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Cianjur, dengan patih pertamanya adalah Aria Wangsaredja yang diangkat pada tanggal 10 September 1870. (Jaya, 2002: 25)

Untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan di bidang perkebunan untuk bersaing dengan hasil perkebunan dari negara lain, pemerintahan Belanda mengeluarkan surat keputusan yang tertuang dalam Staatsblad Nomor 252 tanggal 16 Oktober 1882. Adapun isi keputusan itu adalah tentang pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah distrik yaitu onder distrik. Berdasarkan surat keputusan itu, distrik dipimpin oleh seorang wedana, dan onder distrik dipimpin oleh seorang camat atau assiten Wedana. Tujuan pemerintah Hindia membentuk struktur pemerintahan di bawah distrik, diharapkan pengelolaan pemerintahan semakin optimal.

Berdasarkan surat keputusan yang tertuang dalam *Statsblad nomor 252* tersebut, *afdeling* Sukabumi membawahi distrik dan onder distrik sebagai berikut:

1. *Distrik* Gunungparang berkedudukan di Sukabumi dengan *Onder Distrik* Sukabumi, Sukaraja, dan Baros.
2. *Distrik* Cimahi berkedudukan di Cisaat, dengan *Onder Distrik* Cisaat, Cikembar, dan Kadudampit
3. *Distrik* Ciheulang, berkedudukan di Karangtengah dengan *Onder Distrik* Karangtengah, Cisande, dan Ciambar.
4. *Distrik* Pelabuhanratu berkedudukan di Pelabuhanratu, dengan *Onder Distrik* Pelabuhanratu, Cipetir, Bantargadung, dan Cisolok.
5. *Distrik* Cicurug berkedudukan di Cicurug dengan *Onder Distrik* Cicurug, Cibodas, Benda dan Kalapanunggal.

6. *Distrik* Jampangtengah berkedudukan di Bojonglopang dengan *Onder Distrik* Bojonglopang, Nyalindung, dan Sagaraten.
7. *Distrik* Jampangkulon berkedudukan di Jampangkulon dengan *Onder Distrik* Jampangkulon, Lengkong, Ciemas, dan Ciracap.

Ketentuan pembagian wilayah administratif ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1913. Pejabat bupati Cianjur pada saat itu dipegang oleh R. Toemengoeng Wiranatakoesoemah yang lebih dikenal dengan sebutan Dalem Haji, yang memerintah sejak tahun 1910 sampai dengan tahun 1920. Bupati Cianjur selanjutnya adalah Raden Toemengoeng Soeridiningrat yang memerintah dari Tahun 1920-1935.

Afdeling Sukabumi pada saat itu menunjukkan kemajuan pesat, perkebunan kopi yang dikelola pemerintah Hindia Belanda maupun pengusaha swasta Belanda berkembang pesat. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan perkebunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya semakin berkembang. Pada saat aktivitas masyarakat Sukabumi berkembang maju, terjadi suatu peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat Sukabumi yaitu dipisahkannya *Afdeling* Sukabumi dari Kabupaten Cianjur dan berdiri sebagai kabupaten tersendiri. Keputusan Sukabumi sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan Gubernur Jenderal tanggal 25 April 1921 Nomor 71 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1921.

Sebagai Bupati pertama yang diangkat sebagai penguasa di Kabupaten Sukabumi adalah patih terakhir yang menjabat sebagai Kepala Kepatihan Sukabumi, yaitu R.A.A. Soertanatabrata yang terkenal dengan sebutan Aom Dolih atau Dalem Gentong, karena bertempat tinggal di Kampung Gentong Kecamatan Sukaraja.

Sebelumnya yang menjadi Patih pada Kepatihan Sukabumi

berturut-turut adalah

- 1 R. Aria Wangsaredja (1820)
- 2 R. Aria Kartadiredja
- 3 R. Aria Kartakoesoemah
- 4 R. Soerianatalegawa (1896-1906)
- 5 R. Soerianatapamekas (1906-1913)
- 6 R. Soerianingrat (1913-1918)
- 7 R.A.A. Soerianatadibrata (1918-1921) (Pemda Kota Sukabumi,1993:20)

2. Sukabumi sejak Berstatus Kota hingga Indonesia Merdeka (1921-1945)

a. Sukabumi Berstatus Kabupaten

Pada masa pemerintahan Bupati R.A.A. Soerianatabrata (1921-1930) tepatnya pada tahun 1923, *Residentie Preanger Regentschappen* dipecah menjadi 3 (tiga) wilayah keresidenan, antara lain *West Priangan* (Priangan Barat) yang berkedudukan di Sukabumi dan membawahi Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Sukabumi dipilih sebagai ibu kota Priangan Barat. Melihat perkembangan Kabupaten Sukabumi semakin pesat, pemerintah Hindia Belanda menata lebih lanjut dengan mengeluarkan surat keputusan yang tertuang dalam *Staatsblad* Nomor 386 Tahun 1925 tentang pembentukan Perwakilan Kabupaten.

Dewan Perwakilan Kabupaten Sukabumi, terdiri dari bupati sebagai ketua dan dilengkapi dengan 29 anggota. Dari 29 anggota dewan tersebut, 5 orang adalah warga Belanda, 22 orang warga pribumi, dan 2 orang warga asing bukan Belanda. Dari 22 orang anggota warga pribumi, 15 orang diangkat melalui pemilihan oleh masyarakat, sedangkan 7 orang anggota diangkat oleh Pemerintah Kabupaten. Anggota Dewan Perwakilan pribumi

yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi merupakan perwakilan dari tiap distrik.

Pada tanggal 1 April 1914, pemerintah Belanda membentuk *Gemeente* Sukabumi. Setelah segala sesuatunya telah memenuhi persyaratan untuk sebuah pemerintahan kota, baru pada bulan Mei 1926 Mr. GF Rambonet diangkat sebagai *Burgermeester* yang pertama di Sukabumi. Saat itu jumlah penduduk kota Sukabumi sekitar 23.520 orang terdiri :

1. Bangsa Eropa	1.520 orang
2. Pribumi	19.000 orang
3. Cina	3.000 orang

b. Kota Sukabumi di Masa Pemerintah Jepang (1942-1945)

Pemerintahan Kota Sukabumi mengalami perkembangan baru sehubungan dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah menaklukkan Belanda. Sejak itu pemerintah pendudukan Jepang mulai menancapkan kekuasaannya di Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2602 (1942) tanggal 7 Maret 2602 (1942). Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu dan berlaku di seluruh (bekas) wilayah jajahan Belanda. Struktur pemerintahan peninggalan Belanda untuk sementara waktu tetap dipertahankan. Jabatan-jabatan pemerintahan yang pada masa penjajahan Belanda tidak boleh dipegang oleh warga pribumi, dibukanya lebar-lebar, kecuali untuk jabatan residen dipegang oleh bangsa Jepang.

Pada tanggal 5 Agustus 2602 (1942) Panglima Balatentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2602 (1942) tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah.

Adapun isi dari undang-undang tersebut adalah:

Pasal 1

Seloeroeh Djawa, ketjoeali Kooti (vorstenlanden) terbagi atas Syuu, Si, Ken, Gun, Son, dan Ku

Pasal 2

Daerah Syuu sama dengan daerah "residenti" dahulu. Atoeran jang bersangkoetan dengan Syuu akan ditetapkan dalam oendang-oendang lain.

Pasal 3

Daerah Syuu dibagi atas Si dan Ken

Daerah Si sama dengan daerah "stadsgemente" dahoeloe. Daerah Si sama dengan daerah "regentshap" dahoeloe, ketjoeali daerah jang didjadikan Si. Daerah Ken terbagi atas Son. Sedangkan daerah Son terbagi atas Ku. Daerah Gun, Son, dan Ku masing-masing sama dengan daerah "distrik", onderdistrik, dan "desa" dahoeloe, ketjoeali daerah jang didjadikan Si.

Pasal 4

Di dalam memimpin daerah Si, Ken, Gun, Son, dan Ku masing-masing diangkat seorang Sityoo, Kentyoo, Guntyoo, Sontyoo, dan kutyoo.

Atoeran pemerintahan jang dahoeloe jang ditetapkan oentoek stadgemeente, regenshap, distrik, onderdistrik, dan desa berlakoe djoega boeat Si, Ken, Gun, Son, dan Ku, Ken, Son, dan Ku Ketjoeali kalaoe ada atoeran jang istimewa.

Pasal 5

Si jang ditoedjoekan oleh Gunseikan (pembesar pemerintah Bala Tentara Dai Nippon) dinamai Tokubetu Si (Stadsgemente loear biasa).

Oentoek Tokubetsu Si akan diadakan atoeran jang istimewa (Bayu Suryaningrat dan Harsono., 1972: 435)

Perubahan Tata Pemerintahan tersebut, khususnya terjadi pada nama-nama hierarki pemerintahan dan sebutan nama pejabatnya:

- a. Residen diganti menjadi *Syucokan*
- b. Assisten Residen diganti menjadi *Fuku Syucokan*
- c. Regentschap/Kabupaten diubah menjadi *Ken* dan dikepalai oleh seorang *Kenco*
- d. Patih atau Wakil Bupati disebut *Fuku Kenco*
- e. Kotamadya disebut *Shi* dan dipimpin oleh *Shico*
- f. Distrik diganti dengan *Gun* dan dipimpin oleh seorang *Gunco*
- g. Onder Distrik disebut *Son* dan dipimpin oleh seorang *Soneo*
- h. Desa disebut *Ku* dan dipimpin oleh seorang *Kuco*

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2602 (1942) menetapkan pula bahwa **Ken** dan **Ku** merupakan badan-badan yang berhak mengurus rumah tangga sendiri (Otonom). Adapun yang menjadi hak otonomi dari Ken tersebut, diatur dalam Osamu Seirei Nomor 12 2603 (1943), yaitu Undang-undang untuk sementara waktu tentang Ken dan Shi. Berdasarkan *Osamu Seirei* Nomor 12 dan 13 Tahun 2603 (1943) tersebut Ken dan Shi sebagai Badan Daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, boleh mengadakan *Zyoorei* (peraturan) tentang pekerjaan Ken dan Shi di daerahnya masing-masing. Terdapat 6 hal yang harus ditetapkan dalam *Zyoorei* (kecuali bila telah ditetapkan secara istimewa dalam Gunseirei) yaitu :

1. Cara mengenakan dan memungut pajak Ken, pajak Shi, sewa upah dan uang wajib lainnya.
2. Cara mengawasi harta benda Ken dan Shi dan bangunan-bangunan lainnya.

3. Banyaknya pegawai Ken dan Shi serta cara-cara pembayaran gaji, ongkos jalan, hadiah waktu (jam) kerja, santunan kematian, dan sebagainya.
4. Hal-hal yang menyangkut pengadaan Shiku.
5. Mengubah atau menghapus hal-hal yang ditetapkan dalam Ken dan Shi Zyoorei.
6. Hal-hal penting dalam menjalankan pemerintahan Ken dan Shi dalam mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai Kenco Sukabumi yang pertama, adalah R.A.A. Soeriadanoeningrat. Kemudian dilanjutkan oleh kenco yang kedua, R. Tirtasoeyatna. Kedudukan Ken pada saat itu terletak di jalan Cikole (Jalan R. Syamsudin, SH 52 sekarang) menempati bekas Kantor Regentschap.

Pemerintahan sipil ditingkat Ken yang dipimpin seorang Kenco tentu saja harus tunduk kepada Kebijakan Pemerintah Kolonial Jepang. Namun dalam hal struktur pemerintahan yang ditinggalkan Belanda tersebut masih tetap dipertahankan sampai saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

3. Kota Sukabumi Masa Revolusi Fisik (1945-1950)

a. Sambutan Masyarakat Sukabumi terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada 15 Agustus 1945, kota Jakarta berada dalam keadaan tegang sebagai akibat adanya desas-desus tentang penyerahan Jepang kepada Angkatan Perang Sekutu (Soebardjo, 1978: 72). Berita kekalahan Jepang tersebut, secara beranting dari mulut ke mulut menyebar ke pelosok kota Jakarta dan berbagai lapisan masyarakat. Reaksi pertama yang dilakukan oleh para pemuda, terutama dari golongan radikal dengan melakukan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi Universitas Indonesia Jalan Pegangsaan

Timur Jakarta. Hasil keputusan rapat yang dihadiri antara lain Chairul Saleh, Djohan Nur, Kusnandar, Subadio, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Armansyah adalah adanya tuntutan agar kemerdekaan RI dilaksanakan secepatnya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, tidak perlu menunggu rapat PPKI yang dianggap buatan Jepang (Poesponegoro, VI, 1990: 80).

Para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Adam Malik, dan Wikana menyampaikan berita kekalahan Jepang dan hasil keputusan rapat kepada Soekarno. Mereka mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di luar pengaruh pemerintah Jepang. Soekarno menolak, karena berita penyerahan Jepang kepada pihak Sekutu belum jelas, juga ia tidak mau mengkhianati organisasi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang ia pimpin. Apabila proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan saat itu, Soekarno khawatir akan menimbulkan korban di kalangan rakyat. Karena tentara Jepang yang masih memiliki persenjataan yang lengkap tidak akan begitu saja membiarkan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia (Soebardjo, 1978: 80-82).

Akan Tetapi, para pemuda menolak alasan yang disampaikan oleh Soekarno dengan alasan apabila melalui sidang PPKI, maka kemerdekaan RI dapat dianggap sebagai pemberian Jepang. Soekarno tetap pada pendiriannya dan tidak mau melaksanakan tuntutan dan desakan para pemuda tersebut. Bahkan kemudian Soekarno berusaha menemui *Gunseikan*, yaitu Kepala Pemerintah Pendudukan Jepang di kantornya bekas gedung "*Bataafsche Petroleum Maatschappij*" (BPM), untuk menanyakan berita yang sebenarnya. Namun *Guseikan* tidak ada di kantornya, begitu pula pejabat Jepang yang lainnya tidak ada (Soebardjo, 1978: 84).

Keadaan makin tegang, karena adanya perbedaan konsep perjuangan antara "golongan tua" di satu pihak dan "golongan muda"

di lain pihak. Wikana dan kawan-kawan dari golongan muda terus mendesak Soekarno-Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan disertai ancaman akan terjadi pemberontakan jika keinginan mereka tidak dilaksanakan. Mendengar ancaman itu, Ir. Soekarno menjadi marah. Ketegangan itu disaksikan oleh tokoh-tokoh nasionalis angkatan tua lainnya, seperti Drs. Hatta, dr. Buntaran, dr. Sanusi, Mr. Ahmad Subardjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri (Poesponegoro, 1990: 80-81).

Wikana dan kawan-kawan tetap pada keputusannya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta, dan akan melancarkan pemberontakan terhadap kekuasaan Jepang. Tetapi sampai tanggal 16 Agustus 1945 hal itu tidak terjadi. Walaupun para pemuda dalam upaya membebaskan rakyat Indonesia dari dominasi kekuasaan Jepang semangatnya cukup tinggi, namun untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa Soekarno-Hatta dari golongan tua kiranya masih sukar dilaksanakan.

Akibat perbedaan pendapat terjadilah peristiwa "Rengasdengklok", Soekarno sekeluarga dan Hatta "diungsikan" ke Rengasdengklok, sebuah kota kecil dekat kota Karawang yang dikuasai oleh Serdadu PETA.

Babak Rengasdengklok berakhir setelah Soekarno-Hatta kembali lagi ke Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Sesampainya di Jakarta rombongan Soekarno-Hatta terlebih dahulu singgah di rumah masing-masing, kemudian langsung menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Iman Bonjol No. 1 (sekarang Museum Perjuangan 1945). Di rumah itulah naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun dan dihadiri oleh anggota PPPKI, perwakilan pemuda, dan Ahmad Subardjo. Keesokan harinya pada 17 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Tokyo atau pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang, atau pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Moh.

Hatta di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Dengan Proklamasi itu tercapailah Indonesia Merdeka yang telah lama diimpikan oleh bangsa Indonesia (Poesponegoro, 1990: 89-90).

Berita Proklamasi segera disebarluaskan baik di Jakarta maupun ke kota-kota di Jawa Barat. Berita tersebut antara lain dikirimkan kepada kantor berita NIROM Bandung dan diterima oleh AZ Palindih, Mohamad Adam, Lalu Danila, dan Matulesy. Teks Proklamasi kemudian disalin dengan huruf-huruf besar dan ditempelkan pada papan tulis di depan kantor Domei di Jalan Dago Bandung (sekarang Jalan Ir. H. Juanda). Penyebarluasan berita teks Proklamasi itu, atas perintah Bupati Bandung, Suriasaputra (Ekadjadi, 1980/1981: 78).

Pemancar radio Bandung *Hosoo Kyoku* juga mengumandangkan bunyi proklamasi kemerdekaan melalui *Stationcall* Radio Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sakti Alamsyah, Hasyim Rakhman, Sofyan Junaed, Syam Amir, Abdul Razak, Odas Sumadilaga, R.A Durya, Sutarno Brotokusumo, dan lain-lain bertugas di pemancar radio Bandung. Penyiaran teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai pukul 19.00-20.00-21.00 waktu Jawa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan siaran ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Di samping itu, petugas RRI lainnya mengadakan penerangan keliling kota Bandung dan Cimahi, sehingga pihak Jepang harus turun tangan mengamankan, karena tidak senang melihat para petugas tersebut (Djajusman, 1986: 16).

Pada 17 Agustus 1945 malam hari, para pemuda radio Bandung bekerja sama dengan para pemuda Pos Telepon dan Telegraf (PTT) mengambil alih pemancar di Palasari (Dayeuhkolot) Kabupaten Bandung. Mereka kemudian menyiarkan berita proklamasi dari stasiun radio Tegallega. Penyiaran berita proklamasi

itu dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada pukul 19.00 - 20.00 dan pukul 21.00, yang diselingi dengan instrumentalia lagu Indonesia Raya (Poesponegoro, 1990: 89-90).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dicetuskan pada 17 Agustus 1945 dapat diartikan sebagai suatu perwujudan niat dan tekad seluruh rakyat Indonesia untuk segera mengakhiri penjajahan yang sekian lama membelenggu kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menggema diseluruh pelosok tanah air dan rakyat Indonesia saat itu dapat memahami arti kemerdekaan, sehingga berita proklamasi kemerdekaan disambut oleh seluruh rakyat Indonesia dari segala golongan dan lapisan dengan kegembiraan yang tak terhingga, karena pengumuman itu memang benar-benar menjelmakan keinginan dan cita-cita kemerdekaan dari seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia sadar bahwa tiap-tiap bangsa, yang mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri, harus menjadi bangsa yang merdeka.

Seperti yang diungkapkan oleh M. Muchtar sebagai pejuang 45 dari Sukabumi merasa terkejut dan merasa tidak percaya atas berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, karena mengangggap perlawanan terhadap pendudukan Jepang belum selesai, apalagi berita itu datang dari rekan seperjuangannya. Setelah kebenaran berita itu yakin, merasa "mimpi di siang bolong" saking gembiranya yang tak terhingga (Wawancara dengan M. Muchtar 14 Juni 1997).

Pak Subarna (Komandan Batalion Tentara Pelajar), merasa bangga dan terharu mendengar Proklamasi. Rasa bangga, karena perjuangan yang sekian lama dilakukan telah berhasil dan semangat juang untuk mempertahankan kemerdekaan lebih menggelora, daripada dijajah kembali oleh bangsa asing lebih baik mati. Rasa terharu, teringat kepada rekan seperjuangan yang telah gugur di medan perang dan tidak sempat menikmati udara kemerdekaan (Wawancara dengan Subarna 12 Juni 1997).

Di daerah Sukabumi, berita proklamasi menyebar dari mulut ke mulut dan ada juga dari siaran radio. Begitu mendengar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dengan teman seperjuangan meneriakan hidup "Merdeka... Merdeka... Merdeka..." berbau dengan rasa sedih dan gembira, bahwa kita telah lepas dari genggaman penjajah yang selama itu menghantui hidupnya dan telah dirasakan pahit getirnya udara penjajah (Wawancara dengan Bapak Taufik 13 Juni 1997).

Para pemuda pejuang dan masyarakat Sukabumi menyambut proklamasi dengan diikuti menempelkan bendera merah putih di rumah-rumah penduduk dan di gedung-gedung lainnya. Ada pula sambutan masyarakat dilakukan dengan mengundang orang untuk datang ke rumah. Mereka berdo'a bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah, mereka telah diberikan kenikmatan dan anugrah yang besar serta membaca doa bagi para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Acara ini dipimpin oleh ulama setempat.

b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan Badan-badan Perjuangan Sukabumi

Setelah teks proklamasi RI dikumandangkan ke seluruh pelosok tanah air, keesokan harinya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pembentukan alat perlengkapan pemerintahan sipil.

Selain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sidang PPKI mengangkat Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk membantu presiden (Nasution, 1991: 224-225). Bahkan pada sidang tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembentukan KNI daerah, dengan susunan pengurus yaitu seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus.

Adapun tujuan dibentuknya KNID selain merupakan perpanjangan tangan dari KNIP, juga dimaksudkan untuk memaksimalkan partisipasi seluruh rakyat dalam membantu para pemimpin dalam melaksanakan tugasnya di saat-saat genting (Ekadjati, 1980/1981: 80). Sejalan dengan maksud tersebut di atas, di daerah Jawa Barat dibentuk KNID yang dimulai dari Keresidenan Priangan.

Selanjutnya pembentukan KNID segera menyebar ke daerah-daerah di wilayah Jawa Barat. Pembentukan KNID itu tidak saja di tingkat provinsi dan keresidenan saja, tetapi terus dilanjutkan sampai ke tingkat kabupaten, kota praja, kewedanaan, dan kecamatan. Di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1945 pembentukan KNID dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili daerah-daerah Kotamadya dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Kemudian pengaturan KNID tersebut ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1945. Dalam Undang-undang tersebut KNID ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang bersama-sama dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi daripadanya. Untuk menjalankan tugas KNID memilih paling banyak lima orang sebagai Badan Eksekutif yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerah itu. (Nasution, 1992, 223)

Anggota KNID Sukabumi, yang saat itu merupakan bagian dari Karesidenan Bogor pada tanggal 1 April 1946 mengadakan rapat dan memutuskan untuk mengadakan museum untuk menyimpan dan memelihara barang-barang kesenian di bekas Villa van Delden. Di samping itu, rapat tersebut memutuskan memilih 3 orang wakil untuk

duduk di BPR (Badan Pekerja Rakyat) Karesidenan Bogor yaitu Bunyamin, Dr. Abu Hanfiah Sasmitadimaja, dan Abdulgani Iskandar (Ekadjati, 1980/1981 : 128).

Selain itu, Sukabumi segera melakukan pembenahan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan bidang lain yang ada hubungannya dengan kepentingan umum. Dalam bidang ekonomi, para pejabat Sukabumi terutama yang mendapat tugas pada Jawatan Pertanian dan Perkebunan berupaya meningkatkan pertanian dan perkebunan di daerah Sukabumi. Untuk itu dan dalam rangka merealisasikan rencana lima tahun Jawatan Pertanian Karesidenan Priangan, Sukabumi yang termasuk dalam Jawatan Perkebunan Daerah Perkebunan Inspeksi III segera melakukan perbaikan perkebunan-perkebunan yang ada di daerah Sukabumi, antara lain:

- a. Mengusulkan kepada pemerintah pusat perlu bantuan pembangunan perkebunan.
- b. Mendidik kader-kader yang akan disertai pimpinan tata usaha, teknik tata usaha, dan pengawas.
- c. Pemusatan kebun-kebun, setiap kebun yang bekerja sendiri akan dicobakan dalam satu pucuk pimpinan.
- d. Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, mengadakan hubungan yang erat dengan jawatan angkutan.
- e. Pengadaan tenaga buruh (Ekadjati 1980/1981 : 131).

Dalam bidang pendidikan, Bupati Sukabumi mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pendidikan kursus guru kilat, dalam rangka mengisi kekurangan tenaga pengajar di Sukabumi. Selain itu, diutus pula perwakilan dari Sukabumi dalam rangka pembentukan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karesidenan Bogor. Rapat pembentukan PGRI yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 1946, dengan mengambil tempat di ruang persidangan Kabupaten Bogor dihadiri pula oleh Residen Bogor, Walikota Bogor, Bupati Bogor, dan perwakilan guru dari seluruh Karesidenan

Bogor.

Tujuan utama pembentukan PGRI adalah untuk memperbaiki nasib guru. Pada tanggal 26 Mei 1946, terbentuklah susunan pengurus PGRI untuk Karesidenan Bogor yang diketuai oleh Uhud Sastra Prawira (Ekadjati, 1980/1981: 134).

Dalam bidang sosial, pada bulan Maret 1946 warga Cina Sukabumi menyerahkan derma kepada Walikota Sukabumi sebanyak f. 10.000 untuk disumbangkan kepada Rumah Perawatan dan Rumah Pemeliharaan Anak Yatim Piatu yang ada di Sukabumi.

Pada bulan Juli 1946, pengurus Gabungan Pemuda Islam Indonesia (GPII) daerah Karesidenan Bogor melangsungkan konferensi di Sukabumi. Konferensi yang dihadiri oleh GPII cabang Sukabumi, Cianjur, dan Bogor dapat diambil suatu keputusan yaitu: Pertama, menyempurnakan Badan-badan Usaha Ekonomi Pemuda Islam, badan ini berkedudukan di Sukabumi. Kedua, mengadakan perubahan masyarakat umat Islam supaya berhaluan selaras dengan kemajuan zaman dan kepada anggota GPII supaya memberi contoh (Ekadjati 1980/1981 : 136).

Pada bulan September 1946, di Sukabumi berdiri pula Majelis Pembela Perjuangan Rakyat (MPPR) dengan susunan pengurus yaitu Dr. Abu Hanafiah, R.S. Puraatmadja, R.M. Priatman. Tujuan dibentuknya MPPR adalah mempererat persaudaran, mengerahkan kesosialan, mengadakan gabungan dari beberapa perkumpulan, memperjuangkan politik ke luar negeri dan di dalam negeri, serta menegakkan negara Republik Indonesia.

C. PENUTUP

Perjalanan sejarah pemerintahan Kota Sukabumi diwarnai perubahan bentuk pemerintahan, yaitu dari bentuk pemerintah lokal dan kabupaten. Perubahan itu sudah berlangsung sejak abad ke-18 yaitu sejak Wiaratanoeatar VI diangkat menjadi Bupati Cianjur dengan pusat pemerintah terletak di Cikole. Dipilihnya Cikole sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur, sehubungan lokasi ini sangat strategis bagi komunikasi antara Priangan dan Batavia (Jakarta). Selain itu, Cikole merupakan tempat yang nyaman bagi peristirahatan serta memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi khususnya bidang perkebunan. Melihat kondisi Cikole seperti itu dan atas usul para pemimpin bumi putera, *administratur* perkebunan Cianjur merubah nama Cikole menjadi Sukabumi dan statusnya menjadi sebuah kepatihan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 19 September 1870, pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan struktur pemerintahan, berupa pembentukan beberapa afdeling di Jawa Barat. *Afdeling* itu antara lain *Afdeling* Sukabumi yang berada di bawah *Residentie Preanger Regentchappen*, yang dipimpin oleh seorang *Assisten Resident*.

Untuk mengimbangi dan mengembangkan potensi perkebunan di daerah Sukabumi, pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 7 Mei 1913 mengeluarkan surat keputusan nomor 60 tentang perubahan wilayah administrasi *Afdeling* Sukabumi. Dengan adanya perubahan tersebut, perkembangan perkebunan di daerah Sukabumi meningkat pesat dan kegiatan masyarakatnya pun semakin berkembang. Keadaan demikian mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memisahkan wilayah Sukabumi dari Kabupaten Cianjur dan menjadikan Sukabumi menjadi sebuah

kabupaten tersendiri. Berdasarkan surat keputusan tanggal 1 April 1914, secara resmi Sukabumi ditingkatkan menjadi *Stadgemeente* yaitu daerah otonom yang mempunyai Walikota dan Dewan Kota (*Gemeenteraad*) dengan Mr. GF Rambonet diangkat sebagai *Burgermeester* pertama pada bulan Mei 1926..

Sebagai sebuah kota, pemerintahan Sukabumi berkewajiban mengurus, mengatur, melayani, membina, dan mengembangkan daerah beserta rakyatnya. Tugas yang menjadi beban pemerintahan Kota Sukabumi berhasil dilaksanakan oleh Rambonrt. Keberhasilan Walikota Sukabumi menata dan mengembangkan daerah Sukabumi, mendorong pemerintah Belanda menjadikan Sukabumi menjadi ibu kota Priangan Barat dengan surat keputusan nomor 386 tahun 1925. Tidak cukup sampai di sana, untuk menata lebih lanjut pemerintahan Kabupaten Sukabumi pemerintah Belanda pun membentuk Dewan Perwakilan Kabupaten.

Sejarah pemerintahan di Indonesia, khususnya di Kota Sukabumi mengalami perkembangan baru sehubungan dengan masuknya balatentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah menaklukkan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak itulah Pemerintah Pendudukan Jepang mulai menancapkan kekuasaannya di Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2602 (1942) tanggal 7 Maret 2602 (1942). Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Militer untuk sementara waktu dan berlaku di seluruh (bekas) wilayah jajahan Belanda. Struktur pemerintahan peninggalan Belanda untuk sementara waktu tetap dipertahankan. Jabatan-jabatan pemerintahan yang pada masa penjajahan Belanda tidak boleh dipegang oleh warga pribumi, dibukanya lebar-lebar, kecuali untuk jabatan residen dipegang oleh Bangsa Jepang.

Pada 15 Agustus 1945, kota Jakarta berada dalam keadaan tegang sebagai akibat adanya desas-desus tentang penyerahan Jepang

kepada Angkatan Perang Sekutu (Soebardjo, 1978: 72). Namun dengan adanya kerja sama antara para pejuang Indonesia, terutama dorongan para pemuda kepada Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 20.00 waktu Tokyo atau pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang, atau jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, teks proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Moh. Hatta di tempat kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Dengan Proklamasi itu tercapailah Indonesia Merdeka yang telah lama diimpikan oleh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Adeng, dkk. 1995.

Peranan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Bandung dan Sekitarnya 1945-1950. Jakarta: Depdikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN.

Ariadi. 1971.

Ichtisar Sejarah Nasional (Awal-Sekarang). Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI

Ekadjadi, Edi S. 1980/1981.

Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat.

Jakarta:

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Jaya Ruyatna, 2002

Sejarah Sukabumi, Sukabumi

Muchtar, M. 1995.

Sejarah Gedung Juang'45 Kotamadya Sukabumi.

Sukabumi: Badan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi
Angkatan 45.

Nasution, A.H. 1970.

Sekitar Perang Kemerdekaan; Jilid I. Bandung: Angkasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten DT. II Sukabumi. 1993.

*Sejarah Singkat Pemerintahan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukabumi*. Sukabumi: Tanpa Penerbit.

Poesponegoro, Marwati Djoened, dkk., 1990

Sejarah Nasional Indonesia VI Jakarta,

Rusmanwijaya. 1996.

Perjuangan Rakyat Sukabumi. Bandung: IKIP Bandung.

Soebardjo, Mr. Ahmad. 1978.

Lahirnya Republik Indonesia. Bandung: PT. Kinta.

PERISTIWA BERDARAH DI RAWAGEDE
(Studi Kasus Kejahatan Perang Tentara Belanda
terhadap Rakyat Indonesia)

A d e n g

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail: adeng.tedja@gmail.com

ABSTRACT

The Dutch government refused to recognize the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The Dutch government still stated that the recognition of the independence of the Republic of Indonesia had been awarded on December 27, 1949. Meanwhile on August 17, 1945 Indonesia received only politically and morally, de facto, and not legally-de jure. Therefore with the Allied forces, the Dutch government came to Indonesia in order to regain Indonesia as it was before in the World War II where they are the rulers. To take over from Indonesia, the Dutch made two ways of warfare, first through political channels and last through diplomacy and military aggression. Both ways are always alongside each other. With military aggression, the Dutch do not hesitate to atrocities beyond the limits of humanity. Many innocent people of Indonesia became the victims of malignancy Dutch army. As happened in Rawagede, Karawang, innocent people brutally were slaughtered by the Dutch army in order to achieve its goals, Indonesia regain.

Keywords: Tragedy, Bloody, Rawagede

PENDAHULUAN

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah baru bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai, tetapi merupakan babak baru bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Hal ini salah satu bukti bahwa rakyat Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan sejenkal tanah yang telah dibasahi oleh harumnya darah para pejuang yang gugur di medan perang.

Belanda terus melakukan berbagai cara untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, baik melalui saluran politik maupun dengan cara agresi militer. Namun, segala cara yang pernah dilakukan Belanda dapat dipatahkan para pejuang Indonesia yang gigih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka berpendapat daripada dijajah kembali oleh Belanda lebih baik mati bersimbah darah. Oleh karena itu, dengan semangat juang yang tinggi, mereka tidak gentar menghadapi tentara Belanda.

Belanda telah melakukan berbagai cara untuk menguasai kembali Indonesia tidak membuahkan hasil, namun tidak patah arang atau putus asa. Bahkan sebaliknya Belanda terus melakukan teror terhadap rakyat Indonesia. Belanda tidak mempedulikan apakah yang mereka lakukan itu melanggar HAM (Hak Azasi Manusia) atau termasuk kejahatan perang. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak berdosa dibunuh oleh tentara Belanda, seperti yang terjadi di Rawagede, Desa Balongsari, Kabupaten Karawang. Tentara Belanda melakukan pembunuhan massal secara sadis dan kejam terhadap rakyat yang tidak berdosa.

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Rawagede

Rawagede merupakan sebuah kampung bagian dari daerah Karawang yang dihuni oleh penduduk yang sehari-harinya sebagai petani dan berladang. Untuk mencapai Kampung Rawagede dapat digunakan kendaraan roda empat dari berbagai jurusan, antara lain melalui Jalan Tunggakjati – Rawamerta dan Jalan Jatisatisari – Tempuran serta bisa juga menggunakan Kereta Api. Oleh karena itu, Rawagede yang sangat strategis oleh para pejuang dijadikan Markas Gabungan Pejuang (MGP). Markas utama yang digunakan adalah rumah milik warga keturunan Cina. Bangunan rumahnya cukup besar dan sudah permanen serta letaknya dekat dengan stasiun Kereta Api. Adapun badan kelaskaran yang ada di Rawagede, yaitu: Hisbullah yang dipimpin oleh Iyob Armada, Laskar Macan Citarum dipimpin oleh Natsir, Laskar Pesindo dipimpin oleh Wahidin, Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) dipimpin oleh Lurah Suminta, Satuan Pemberontakan “88” (SP 88) dipimpin oleh Suwidjo, dan lain-lain (Yayasan Wira Karya “88”, 1979: 3 dan Sukarman, 1999: 10).

Senjata yang dimiliki oleh para anggota laskar adalah golok, pedang, bambu runcing, dan senjata karaben. Ada juga anggota laskar yang memiliki ilmu kesaktian atau kekebalan dan mempunyai benda-benda pusaka. Menurut keyakinan mereka ilmu kekebalan tersebut untuk melindungi badan dari serangan benda tajam dan peluru sedangkan pemimpinnya memegang pistol. Kegiatan sehari-harinya para laskar rakyat melakukan olah raga, *tai so* (senam pagi), baris berbaris, latihan perang dan patroli (siang-malam). Dalam latihan perang mereka dididik oleh mantan anggota Heiho (mantan pasukan militer pada masa Jepang). Latihannya cara membuat granat *sundut*, memegang samurai, dan penggunaan senjata seperti menarik

pelatuk senjata api dan menembak sasaran yang tepat (Sukarman, 1999: 11).

Rawagede sebagai tempat MGP yang semula dianggap strategis dan aman dari musuh ternyata dapat diketahui pula oleh tentara Belanda berdasarkan informasi dari antek-antek Belanda yang mengkhianati perjuangan bangsa. Diketuhi Rawagede dijadikan sebagai tempat MGP, menyebabkan tentara Belanda berencana akan melakukan penyerangan untuk menghancurkan pasukan tersebut. Namun, rencana penyerangan tersebut dapat disadap oleh Kepala Desa⁸ Tunggakjati, Saukim yang berpura-pura memihak kepada tentara Belanda. Kemudian Lurah Saukim dengan cepat memberitahu kepada MGP yang ada di Rawagede, bahwa pasukan militer Belanda akan melakukan penyerangan. Setelah mendapatkan informasi tersebut mereka langsung menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi serangan tentara Belanda termasuk memblokir jalan yang menghubungkan Rawagede seperti: dari arah Barat memutuskan Jalan Cilempuh dan dari arah Selatan memutuskan Jalan Palawad, dari arah Utara dan Timur membongkar jembatan Garunggung. Namun jembatan tersebut tidak berhasil dibongkar karena bangunannya sangat kokoh. Agar jembatan tersebut tidak dilalui oleh tentara Belanda, maka memutuskan hubungan jalan sebelum menuju jembatan itu dari dua arah. Dalam penyerangan itu, para pejuang berhasil menghalau serangan tentara Belanda (Sukarman, 1995 : 12).

Setelah peristiwa tersebut para pejuang semakin meningkatkan kewaspadaannya bila tiba-tiba terjadi lagi penyerangan secara mendadak. Siang malam diadakan patroli secara bergiliran. Suatu ketika sedang berpatroli, para pejuang menangkap salah seorang intel Belanda berkebangsaan Indonesia yang berkhianat kepada bangsanya sendiri. Orang tersebut dibawa ke markas untuk dimintai keterangannya atau diinterograsi dan saat itu

pula di markas ada Lukas Kustario, Komandan Brigade I, Resimen 6 Divisi Siliwangi dengan pasukannya. Mereka adalah salah satu pasukan yang tidak ikut hijrah ke Yogyakarta dan bertugas menjaga front Karawang-Bekasi (Yayasan Wira Karya “88”, 1979: 4 dan Idris, 2001: 2).

Kedatangan Lukas Kustario ke Rawagede untuk menemui Lurah Suminta, Wakil Lurah Iyob, dan seluruh pimpinan lasykar dengan maksud untuk membicarakan tentang memindahkan semua senjata dan pasukan dari Rawagede ke Tunggakjati, mengingat markas mereka telah diketahui oleh militer Belanda. Selesai pembicaraan dengan Lurah Suminta Cs, kemudian Lukas Kustario dengan pasukannya melanjutkan perjalanan kembali menuju Tunggakjati dengan membawa senjata bren, empil, dan sten beserta sebagian pasukan dari berbagai badan kelasykaran. Sedangkan sisanya hanya pasukan yang tidak bersenjata dan para Pamong Desa (Sukarman, 1999 : 14).

Sementara itu, intel Belanda yang ditawan para pejuang berhasil melarikan diri dan kemudian melaporkan segala pengalamannya ke pihak Belanda termasuk melaporkan adanya Lukas Kustario dengan pasukannya di Rawagede. Adanya laporan tersebut, pihak Belanda pada malam itu juga mengadakan briefing untuk merencanakan penyerangan ke Rawagede. Rencana penyerangan dapat tersadap kembali oleh Lurah Saukim dan langsung diberitahukan kembali melalui surat kepada para pejuang yang ada di Rawagede. Isi surat tersebut menyebutkan bahwa tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 akan melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke Kampung Rawagede (Sukarman, 1995: 14).

2. Peristiwa Berdarah di Rawagede

Berdasarkan informasi tersebut pada malam itu juga para pejuang yang ada di Rawagede pergi ke kampung lain untuk

menyelamatkan diri dari serangan tentara Belanda, karena mereka sudah tidak bersenjata lagi. Pada malam itu kebetulan turun hujan sangat lebat, jadi sebagian pejuang tidak sempat berangkat dan memilih diam di rumah masing-masing dan juga di markas. Menurut anggapan mereka tidak mungkin tentara Belanda akan menyerang ke Kampung Rawagede dalam keadaan hujan yang lebat hingga sampai larut malam. Ternyata anggapan mereka itu salah, tepat pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1947 pukul 04.00 WIB Kampung Rawagede sudah terkepung oleh tentara Belanda dengan posisi siap tempur (Sukarman, 1999: 15).

Pengepungan tersebut diketahui oleh beberapa penduduk yang akan memulai aktivitasnya pada pagi hari seperti petani, anak-anak gembala, dan para pedagang. Mereka dicegat oleh tentara Belanda dan semuanya disuruh kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka sangat ketakutan dan lari ke rumahnya masing-masing sambil memberitahu kepada penduduk lainnya, bahwa tentara Belanda telah mengepung Kampung Rawagede. Ada berita tersebut membuat penduduk menjadi panik, apalagi setelah mendengar suara tembakan yang terus-menerus dari arah timur Kampung Rawagede. Penduduk berhamburan ke luar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun malang ketika mereka akan menyelamatkan diri banyak penduduk yang terkena peluru dan tewas seketika (Sukarman, 1999: 15).

Adapun petugas ronda yaitu Ki Ranta, Siang, dan Karna begitu mendengar suara tembakan langsung turun ke sungai untuk berlindung. Malang bagi Ki Ranta, ketika akan menyeberangi sungai terkena tembakan tentara Belanda tepat mengenai dadanya dan seketika itu langsung meninggal dunia. Adapun Siang dan Karna selamat dan bersembunyi di balik rerumputan di tepi sungai. Dari tempat persembunyian, mereka melihat dengan jelas tentara Belanda sedang membabi buta menembakan senjatanya yang diarahkan ke

Kampung Rawagede yang padat penduduknya. Jenis senjata yang digunakan oleh tentara Belanda adalah mortier, bregun, bren, dan sten (Sukarman, 1999: 15).

Selesai menembakan senjatanya, tentara Belanda mulai merangkak masuk ke kampung untuk mencari para pejuang, penduduk laki-laki dewasa, dan terutama Lukas Kustario beserta pasukannya. Mereka berjalan sambil menembakan senjata yang tidak tentu arahnya. Banyak peluru yang nyasar ke rumah-rumah penduduk, ke pohon-pohon yang ada di pekarangan, dan binatang peliharaan seperti domba, sapi, dan kerbau. Suara tumbang pohon dan desingan peluru, menambah kepanikan penduduk Rawagede. Mereka tidak ubahnya seperti: "tikus telah terkepung oleh kucing yang siap menerkam mangsanya" (Wawancara dengan Suhandi dalam Adeng, 1995: 18-19)

Tentara Belanda menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari para pejuang dan penduduk laki-laki dewasa. Menurut Ibu Kesah dan Ibu Cakim, tentara Belanda berdiri di depan pintu dan berteriak "Pintu buka!". Perempuan yang ada di dalam rumah segera membuka pintu dan memberi salam "Tabek Tuan!" (Salam Tuan). Kemudian tentara Belanda masuk dan langsung mencari laki-laki dewasa di dalam rumah. Tidak menemukan laki-laki dewasa, tentara Belanda menyuruh kepada para perempuan untuk masuk dan tetap tinggal di dalam rumah. Begitu pula kepada laki-laki lanjut usia disuruh diam di rumah (Wawancara dengan Ibu Kesah dan Ibu Cakim dalam Adeng, 1995: 13).

Bila ditemukan laki-laki dewasa disuruh ke luar sambil tangan di atas kepala. Apabila melawan atau melarikan diri langsung tidak segan-segan tentara Belanda menembaknya hingga mati. Adapun mereka yang tertangkap dikumpulkan di pekarangan rumah atau di tempat yang cukup luas. Mereka disuruh berbaris menghadap ke belakang sambil tangan di atas kepala. Sebelum dilakukan

penembakan, mereka ditanya satu per satu oleh tentara Belanda mengenai keberadaan para pejuang dan Lukas Kustario beserta pasukannya. Mereka tidak memberi tahu di mana para pejuang dan Lukas Kustario berada. Tentara Belanda makin murka atas jawaban tersebut kemudian dengan sadis penduduk ditembak dengan jarak sekitar tiga meter (Wawancara dengan Sai tanggal 19 Oktober 2010).

Kemudian menurut pengalaman Sai yang pernah dialaminya, ia tertangkap oleh tentara Belanda beserta teman-temannya sekitar 10-15 orang sambil ditendang disuruh baris satu persatu di pinggiran sungai. Setelah itu langsung ditembaki, namun ketika itu saya (Sai) nekad meloncat ke pagar kemudian menceburkan diri ke sungai dan langsung terbawa arus air yang deras. Namun tangan kiri dan paha saya (Sai) terkena tembakan tentara Belanda (Wawancara dengan Sai tanggal 19 Oktober 2010).

Menurut Bu Kesah dan Bu Cakim untuk mengelabui tentara Belanda, sebagian penduduk sengaja membuka pintu rumahnya dan bila tentara Belanda lewat mereka langsung memberi salam dengan menundukkan kepala. Dengan cara ini mereka bisa selamat, karena anggapan tentara Belanda rumah mereka sudah diperiksa oleh temannya. (Wawancara dengan Ibu Kesah dan Ibu Cakim dalam Adeng, 1995: 13).

Selain mencari laki-laki dewasa, tentara Belanda pun membakar rumah-rumah penduduk dan mencari lambang-lambang republik atau simbol-simbol dari badan kelasykaran. Adapun rumah-rumah yang dibakar antara lain milik Lurah Suminta, Iyob Armada, Gouw Kim Wat (keturunan Cina masuk WNI), dan beberapa rumah lainnya (Sukarman, 1999: 17).

Menurut Suhandi, Belanda seperti kemasukan setan, mereka "mengobrak-abrik" Kampung Rawagede untuk mencari laki-laki dewasa. Selain masuk ke rumah-rumah penduduk, tentara Belanda juga mencari ke kandang-kandang domba, semak/belukar, tepi-tepi

sungai sambil membawa anjing pelacak. Dengan menggunakan anjing pelacak, banyak penduduk yang sedang bersembunyi tertangkap dan langsung dibawa ke tempat yang agak luas kemudian dieksekusi dengan kejam. Ada juga yang langsung ditembak di tempat (Wawancara dengan Suhanda dalam Adeng, 1995: 18-19).

Menurut Suhanda seandainya tentara Belanda tidak menggunakan anjing pelacak, mungkin banyak penduduk yang selamat atau tidak tertangkap. Anjing di tepi sungai itu terus-menerus menggonggong, tentara Belanda langsung menembakkan senjatanya ke arah tersebut. Pada saat itu juga banyak yang tertembak mati. Melihat kejadian tersebut, Suhanda bersama kedua teman cepat-cepat muncul ke permukaan sambil tangan di atas kepala, karena takut ditembak. Suhanda dan kedua teman itu lalu dibawa ke lapangan dan dibariskan dengan teman-teman lain yang sudah terlebih dahulu tertangkap. Kemudian disuruh menghadap pagar sambil tangan di atas kepala. Tentara Belanda telah siap melakukan penembakan. Sebelum melakukan penembakan, komandannya terlebih dahulu memberikan aba-aba sambil berhitung. Untung Suhanda mengerti bahasa Belanda, pada saat itungan ketiga nekad melarikan diri dengan meloncat pagar dan diikuti oleh dua orang teman. Namun kedua temannya tertembak mati, sedangkan Suhanda berhasil meloloskan diri walaupun kaki kanannya terkena tembakan (Wawancara dengan Suhanda dalam Adeng, 1995: 18-19).

Tentara yang dikerahkan dalam aksi pembantaian berjumlah 300 orang dan diperkirakan serdadu-serdadu Belanda itu adalah mantan algojo-algojo yang telah membantai rakyat di Sulawesi Selatan dan ditempatkan di wilayah Cikampek dan Karawang. Oleh karena itu, dalam aksi pembantaian mereka sangat kejam, ganas, dan tidak ada perikemanusiaan. Nyawa manusia diibaratkan seperti nyawa binatang yang tidak ada artinya bagi mereka. (Sukarman, 1995: 14).

Walaupun Kampung Rawagede telah hancur, namun tentara Belanda masih kurang puas, karena sebagian pejuang terutama Lukas Kustario tidak berhasil dibunuh. Untuk mencari terus para pejuang dan Lukas Kustario, pihak Belanda mendatangkan lagi pasukannya sebanyak 9 truk. Dalam operasi militernya, Belanda mendapat bantuan dari orang-orang pribumi yang menjadi pengkhianat bangsa, dengan cara menunjukkan tempat-tempat persembunyian warga desa dan para pejuang, sehingga operasi ini berjalan dengan cepat. (Sukarman, 1995: 15).

Korban dalam peristiwa tersebut bukan hanya penduduk Rawagede, tetapi juga warga lain seperti penumpang Kereta Api jurusan Karawang-Rengasdengklok. Mereka tidak tahu di Rawagede sedang terjadi pembantaian yang dilakukan tentara Belanda. Para penumpang terjebak di Stasiun Rawagede dan menjadi sasaran keganasan tentara Belanda. Mereka ditangkap dan dibariskan di jalan kereta api sambil disuruh jongkok, setelah itu langsung ditembak dengan senjata bregun. Mereka roboh dan bergelimpangan di sepanjang jalan rel kereta api. Menurut saksi mata korban kebiadaban itu berjumlah sekitar 62 orang (Wawancara dengan Suhanda dalam Adeng, 1995: 18-19).

Penduduk yang selamat dari aksi pembantaian hanya beberapa orang, sedangkan sisanya menjadi korban keganasan tentara Belanda. Penduduk yang selamat antara lain Suhanda, kemudian ada penduduk yang terkena peluru di bagian lutut atau tangan langsung berpura-pura mati dengan jalan menjatuhkan diri bersama penduduk lainnya yang terkena tembakan. Ada juga penduduk yang selamat dengan cara menceburkan diri ke sungai seperti orang yang sudah mati terbawa arus deras, sehingga sampai ke Kampung Pasir Awi. Kemudian di Pasir Awi penduduk tersebut ditolong oleh warga setempat (Wawancara dengan Suhanda dalam Adeng, 1995: 18-19).

3. Rawagede Pasca Pembantaian

Setelah merasa puas membantai penduduk, tentara Belanda dengan antek-anteknya meninggalkan Rawagede pukul 16.00. Untuk beberapa saat penduduk belum ada yang berani ke luar dari tempat persembunyiannya. Baru sesudah benar-benar merasa aman penduduk mulai berani ke luar rumah itu pun ibu-ibu. Sedangkan bapak-bapak yang selamat tidak berani ke luar dari tempat persembunyiannya. Ibu-ibu tersebut hanya meratap, menangis saking bersedihnya melihat korban bersimpah darah dan bergelimpangan di mana-mana. Mereka kebingungan, panik dan segera mencari sanak saudaranya. Beberapa ibu rumah tangga berhasil menemukan keluarganya, walaupun lokasinya hanya berjarak 10 meter dari rumahnya. Posisi korban tersebut berjejer sedangkan kondisi korban semuanya tertembak pada bagian kepala bahkan separuh dari kepala korban hancur (Sukarman, 1999: 21).

Ada juga ibu rumah tangga menemukan sanak saudaranya di stasiun Rawagede dan di pinggir sungai. Menurut penuturan seorang ibu rumah tangga mayat yang paling banyak terdapat di pinggir sungai. Setiap tumpukan mayat berjumlah 20-30 orang dalam kondisi sudah kaku. Pencarian sanak saudara yang dilakukan oleh ibu-ibu mendapatkan kesulitan karena banyaknya mayat dan kondisi korban susah dikenali karena mukanya sudah rusak (Sukarman, 1999: 21).

Setelah para keluarga menemukannya, mereka mengurus jenazah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun dalam keadaan darurat, namun tata cara mengurus jenazah menurut ajaran agama Islam tetap dilaksanakan. Cukup sulit mendapatkan kain kafan untuk pembungkus jenazah, maka digunakan barang-barang yang ada seperti: kelambu, seprai, sarung atau tikar pandan. Setelah itu, jenazah langsung saja dikuburkan. Sholat jenazah tidak dilaksanakan

karena kurangnya tenaga laki-laki. Sedangkan jenazah-jenazah yang tidak ada keluarganya atau tidak ada identitasnya langsung saja dikuburkan sedalam lutut dewasa tanpa memakai kain kafan atau pembungkus. Tempat penguburannya pun hanya di sekitar rumah-rumah penduduk seperti di samping dan di belakang rumah atau pun di depan rumah (Wawancara dengan Ibu Kesah dan Ibu Cakim dalam Adeng, 1995: 15).

Adapun dalam peristiwa berdarah di Rawagede yang mejadi korban adalah laki-laki dewasa antara 15-50 tahun dan para penumpang kereta api jurusan Karawang – Rengasdengklok. Dari peristiwa itu tidak ditemukan korban kaum wanita, laki-laki lanjut usia, dan anak-anak. Korban peristiwa Rawagede tidak dapat dipastikan jumlahnya. Menurut keterangan penduduk Rawagede yang selamat, orang yang meninggal dunia dan yang luka-luka berjumlah sekitar 700 orang. Kemudian menurut versi Pemerintah Republik Indonesia, korban berjumlah 431 orang, sedangkan menurut versi Pemerintah Belanda yang meninggal dunia antara 150-200 orang (Sukarman, 1999: 20).

Kekejaman tentara Belanda mengakibatkan penderitaan penduduk Rawagede, baik moril maupun materil. Mereka mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena kehilangan sanak keluarganya.

4. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Rawagede

Terjadinya pembantaian yang dilakukan tentara Belanda telah mengakibatkan banyaknya laki-laki dewasa yang meninggal. Mereka rata-rata berusia antara 15 tahun sampai 50 tahun seperti yang telah dikemukakan di atas. Dilihat dari usia mereka yang meninggal itu adalah berusia produktif. Oleh karena itu, akan mempengaruhi pada kehidupan masyarakat setempat.

Pada umumnya masyarakat Rawagede bermata pencaharian petani. Jika banyak usia produktif meninggal, maka produksi hasil pertanian akan menurun karena berkurangnya tenaga kerja pengelola lahan pertanian. Akibat itu semua ibu-ibu yang ditinggal suami menjadi tulang punggung keluarga untuk anak-anaknya. Hal ini menjadikan beban ibu-ibu makin sulit dalam mengarungi hidup di masa depan.

Banyak lahan pertanian yang tidak tergarap dengan baik. Supaya produksi pertanian tetap baik, maka para pemilik sawah harus mencari tenaga penggarap ladang-ladang mereka. Akhirnya para pemilik lahan pertanian mengambil tenaga kerja dari luar desa. Anak bujang (pembantu) menggarap sawah dan diupah saat panen tiba. Setiap panen tiba, penggarap sawah akan memperoleh padi sebanyak 8-10 *gedeng* padi. Pada umumnya penduduk Rawagede mengambil pembantu-pembantu yang belum berumah tangga. Mereka tinggal bersama majikannya. Jadi, dengan adanya tenaga kerja yang diambil dari luar desa, produktivitas pertanian dapat kembali meningkat, sehingga penduduk tetap memperoleh hasil padi yang memuaskan (Sukarman, 1999: 26).

Dampak psikologis yang dialami oleh penduduk Rawagede adalah banyak yang mengalami trauma dan ketakutan yang berkepanjangan. Hal tersebut terjadi pada penduduk terutama kaum ibu yang menyaksikan peristiwa naas tersebut. Kaum ibu merasa ketakutan bila melihat tentara yang memakai seragam baju loreng. Mereka langsung akan teringat pada kekejaman tentara Belanda pada saat melakukan pembunuhan. Ada juga seorang penduduk yang bernama Satim mengalami *shock* bila mendengar suara tembakan langsung jantungnya berdebar-debar dan lemas seperti orang yang pingsan. Di samping itu, ada juga penduduk yang tidak mau makan daging domba (kambing) karena waktu itu banyak mayat-mayat yang di makan oleh domba.

Kemudian kerusakan-kerusakan materi seperti rumah-rumah penduduk banyak yang hancur akibat kena tembakan dan banyak yang habis terbakar. Akhirnya banyak penduduk yang terpaksa tinggal menumpang bersama kerabat dekatnya. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan adalah jembatan yang menghubungkan Rawagede dengan Ciwadas, sehingga transportasi kedua desa tersebut terhambat. Kesulitan tersebut sangat dirasakan terutama oleh para pedagang beras dan ayam.

Selain jalan-jalan desa mengalami kerusakan, hal lain juga dirasakan oleh penduduk adalah tidak beroprasinya alat transportasi kereta api jurusan Karawang – Rengasdengklok. Akibatnya, aktivitas pergerakan ekonomi penduduk yang biasa menggunakan jasa transportasi tersebut terhambat. Sejak kereta api tidak beroperasi, mereka terpaksa harus berjalan kaki sejauh 12 km jika akan pergi ke kota Karawang dan sebaliknya jika akan pergi ke Rengasdengklok. Akibat kerusakan-kerusakan tersebut bukan hanya dirasakan oleh penduduk Rawagede saja akan tetapi oleh penduduk di sekitarnya (Sukarman, 1999: 27).

Begitu juga aktivitas pendidikan jadi terhambat akibat peristiwa tersebut. Sekolah Rakyat (SR) di Rawagede praktis terhenti, guru-guru yang berasal dari luar desa tidak datang ke Rawagede. Sekolah di Rawagede baru dibuka kembali pada bulan Desember 1949 (dua tahun setelah peristiwa Rawagede).

C. SIMPULAN

Terjadinya peristiwa Rawagede tanggal 9 Desember 1947 suatu bukti Pemerintah Belanda ingin menguasai kembali Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda tidak segan-segan melakukan tindakan di luar perikemanusiaan untuk mencapai tujuannya. Kampung Rawagede salah satu daerah di Jawa Barat menjadi korban kebiadaban tentara Belanda. Dihancurkannya

kampung tersebut karena dijadikan tempat Markas Gabungan Pejuang dari berbagai kelasykaran yang ada di Kabupaten Karawang.

Dalam peristiwa itu, tentara Belanda secara keji membantai penduduk yang tidak berdosa. Banyak mayat bergelimpangan di mana-mana, namun tentara Belanda tidak puas sampai di situ kemudian rumah-rumah penduduk pun dihancurkan dan dibakar sampai habis. Hal ini mencerminkan betapa serakahnya Pemerintah Belanda demi tercapainya cita-cita yakni menguasai kembali Pemerintah Republik Indonesia.

Melihat kejadian tersebut tentara Belanda telah melakukan kejahatan perang karena Pemerintah Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu pihak janda korban peristiwa Rawagede menggugat Pemerintah Belanda telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Pada bulan September 2011 gugatan pihak janda korban berhasil dan pada bulan Desember 2011 Pemerintah Belanda memberikan dana kompensasi kepada janda korban peristiwa Rawagede.

DAFTAR PUSTAKA

Adeng, et al., 1995.

Peristiwa Rawagede 9 Desember 1947, Kecamatan Rawa Merta, Kabupaten Karawang (Langkah Awal Suatu Penelitian), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bandung.

-----, 2002.

Inventarisasi Sumber Sejarah Kabupaten Karawang, Departemen Kebudayaan & Pariwisata, Badan

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Daerah Bandung, Bandung.

Idris, HM, 2001.

Peristiwa Karawang dan Sekitarnya pada Masa Revolusi, Karawang.

Sukarman, H D., 1995.

Riwayat singkat Rawagede, Karawang.

-----, 1999.

Tragedi Berdarah Rawagede, Dalam Rangka Lomba Karya Tulis Memperingati HUT TNI ke 54, Karawang

“Yayasan Wira Karya 88”, 1979.

Sejarah Cikampek dan Sekitarnya, Cikampek, Jawa Barat

KEMANDIRIAN PANGAN PADA MASYARAKAT TRADISIONAL

Nina Merlina

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung

e-mail: merlinanina@gmail.com

ABSTRACT

Food is a very urgent need for the traditional societies or Kasepuhan. How people use and consume traditional foods depend on customs procedures and regulations. With the customs procedures and regulations, some traditional societies can survive with the food they get from their crops. The firmness of the traditional society in defending the customs procedures and regulations for the processing of agricultural products, especially rice, have made them become a food self-sufficient.

Keywords: Traditional society, costumes, food self-sufficient

PENDAHULUAN

Pertanian, sebagai mata pencaharian utama di beberapa bagian wilayah di muka bumi ini, telah mengalami suatu proses perkembangan yang cukup panjang dalam sejarah kehidupan manusia. Pada masa pertama usaha manusia untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan kehidupannya di dunia ini adalah dengan

mengumpulkan hasil bumi dan berburu binatang. Kegiatan tersebut disebut dengan istilah sistem mata pencaharian berburu dan meramu. Istilah tersebut biasa disebut ekonomi pengumpulan pangan atau *food gathering economic*. Namun sejalan dengan perkembangan waktu, maka pada abad ke-19 kegiatan berburu dan meramu mulai menghilang, kemudian muncul suatu tingkat perkembangan yang lain dari usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, yaitu mata pencaharian hidup dengan sistem bercocok tanam. Dengan sistem bercocok tanam ini, tanaman padi yang sesuai bagi mereka, terutama bagi kelompok masyarakat tradisional. Padi merupakan salah satu makanan pokok pangan yang utama di beberapa belahan dunia (Adimihardja, 1980 : 165).

Persoalan paling banyak mendapat perhatian dan menjadi topik bahasan di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat tradisional adalah masalah pangan. Berbicara mengenai pangan, tidak lepas dari perlakuan masyarakat tersebut terhadap bahan pangan, khususnya padi. Masyarakat tradisional merupakan suatu ciri masyarakat yang masih menjaga tradisi peninggalan nenek moyangnya baik dalam aturan hubungan antara manusia maupun dengan alam sekitarnya yang mengutamakan keselarasan dan keharmonisan. Masyarakat yang hidup di lingkungan petani tradisional tidak begitu pusing menghadapi masalah persediaan pangan, karena mereka sudah sejak dari leluhurnya dapat memanfaatkan pangan dan hasil bercocok tanam padi dengan aturan adat yang berlaku. Mereka sudah mengetahui bagaimana mengolah hasil bertani (panen padi) menjadi pangan yang mereka butuhkan.

Masyarakat tradisional bisa bertahan dengan hasil bercocok tanam padi atau bertani dari mulai musim tanam sampai dengan musim panen atau pangan yang mereka dapatkan. Dari hasil bertani tersebut masyarakatnya dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang tahun. Dengan aturan adat yang mereka

patuhi, pangan yang merupakan hasil produksi mereka sendiri, dipertahankan sebagai makanan pokok yang mereka konsumsi sehari-hari, sehingga tidak perlu mendatangkan atau membeli dari luar wilayahnya. Ketergantungannya pada padi yang menjadi sumber bahan makanan pokok menjadi sangat kuat.

Aturan adat yang mengikuti proses produksi padi dari mulai musim tanam sampai dengan masa panen berlaku hampir di setiap kelompok masyarakat atau kasepuhan yang ada di lingkungan masyarakat tradisional. Begitu pula kelompok-kelompok masyarakat yang berada di wilayah Jawa Barat dan Banten, terutama kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam “Kasatuan Adat Banten Kidul”. Mereka sangat menjaga dan melaksanakan segala aturan adat di sekitar produksi pangan atau cocok tanam.

Salah satu contoh proses adat pertanian yang menjadikan ketahanan pangan pada masyarakat tradisional, adalah pada masyarakat Kasepuhan Ciptamulya. Ada 3 simbol adat yang menunjukkan kesungguhan dan menyebabkan ketahanan pangan masyarakat Kasepuhan Ciptamulya, yaitu penggunaan bibit padi lokal, adanya *leuit* dan penyelenggaraan ritual atau upacara adat terkait dengan padi, mulai dari menanam sampai memanennya dan mensyukuri hasil panen, melalui upacara-upacara khusus seperti upacara Seren Taun.

Berkaitan dengan masalah ketahanan pangan ini, selain tiga simbol adat yang selalu dijalankan secara teguh, ada satu ungkapan yang sudah menjadi filosofi bagi masyarakat Sunda. Filosofi tersebut dikenal dengan *pitutur* (pepatah) adat *ngeureut jeung neundeun keur jaga ning isuk*, artinya menyingihkan rezeki untuk hari depan, jangan sampai ada pepatah *ngeureut miceun* atau dengan kata lain menghambur-hamburkan.

Pitutur atau pepatah adat lainnya menyebutkan *buncir leuit*, *lucir duit*. Pepatah ini menjelaskan begitu pentingnya menjaga ketahanan pangan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat tradisional. *Buncir leuit* (lumbung padi terisi penuh) dapat menjaga stok pangan untuk kebutuhan masyarakat kasepuhan. *Lucir* artinya uang utuh, tidak harus mengganggu keuangan rumah tangga karena kekurangan pangan atau beli pangan.

Hal ini menggambarkan bahwa *leuit*, sebagai sarana untuk menyimpan padi merupakan sebuah kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat tradisional, *leuit* merupakan wujud tabungan yang sesungguhnya. Hasil kerja keras bukan untuk dihabiskan sesaat, tetapi mesti disimpan untuk kebutuhan hidup selanjutnya.

Secara umum, tujuan dari penulisan naskah ini adalah, selain untuk mendokumentasikan mengenai budaya bercocok tanam, juga untuk mengenal lebih jauh tentang tradisi pada masyarakat tradisional mengenai kemandirian pangan beserta pengelolaannya.

BAHASAN

Sebelum melakukan pembahasan mengenai cadangan pangan dan ketahanan pangan, harus dipahami bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok umat manusia. Dengan posisi demikian, tentu saja, menuntut kita untuk menyikapinya secara arif dan bijaksana. Kita harus tanggap kondisi dengan situasi zaman dimana pangan dapat dijadikan senjata sekaligus komoditas politis dan strategis. Politis karena seperti beras yang menjadi alat bantu dalam proses pengambilan keputusan suatu pemerintahan seperti dalam penetapan angka inflasi, stok pangan dapat menentukan ukuran kemiskinan suatu bangsa dan berpengaruh secara kuat pada politik pangan di sebuah negara.

Krisis pangan terjadi karena penduduk terus bertambah, sedangkan produksi cenderung berkurang karena lahan penghasil pangan beralih fungsi untuk memenuhi kebutuhan papan (perumahan), tidak sedikit lahan (sawah) berubah menjadi pabrik atau sarana umum seperti jalan, sekolah, pasar, dan pertokoan. Adanya kecenderungan tidak tertariknya generasi muda untuk menjadi petani menambah sulitnya tenaga kerja di sektor pertanian.

Pembahasan selanjutnya dari persoalan pangan akan dibatasi pada makanan pokok sebagian besar penduduk negeri ini, yakni beras yang berasal dari padi yang dihasilkan petani. Padi atau beras merupakan komoditas andalan petani dibandingkan dengan tanaman-tanaman lainnya. Petani yang dimaksud di sini adalah para petani tradisional yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian atau bertani di lingkungan suatu komunitas adat.

Komunitas dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, yakni merupakan kesatuan sosial yang lebih didasarkan oleh rasa kesadaran wilayah tertentu atau pada ikatan tempat tinggal. Secara konkret, masyarakat setempat selalu menempati suatu wilayah tertentu dan istilah ini menunjuk pada warga sebuah desa, kota atau suku bangsa. Adapun adat (*custom*) merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem budaya. Norma, hukum, serta aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Untuk mengatur dan melaksanakan adat istiadat tersebut dalam sebuah masyarakat tradisional, biasanya terdapat lembaga adat yang dibentuk oleh komunitas itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, komunitas adat dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan sosial yang menempati suatu daerah atau wilayah tertentu dan berinteraksi secara kontinyu. Sesuai dengan sistem adat istiadat yang terikat oleh suatu rasa identitas, sehingga ada perasaan bahwa kelompoknya itu memiliki ciri-ciri

kebudayaan atau cara hidup yang berbeda dengan kelompok lainnya. Pada umumnya, komunitas yang mempunyai ciri-ciri tersebut terdapat di daerah terpencil, daerah yang masih memegang norma-norma adat. Dengan kata lain, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih sangat kuat memelihara dan menjalankan adat istiadat peninggalan leluhur mereka.

Berbagai pranata adat yang mengatur perikehidupan mereka masih ditaati dan dilaksanakan secara ketat dalam kehidupan keseharian mereka. Apabila dilihat dari keadaan alam, masyarakat tradisional yang masuk ke dalam kesatuan adat Banten Kidul, berada dekat ke pantai selatan dengan kontur tanah perbukitan, sehingga lahan untuk menanam padi sangat terbatas. Masyarakat tradisional yang dimaksud di sini adalah masyarakat tradisional yang terdapat di wilayah Propinsi Jawa Barat dan wilayah Propinsi Banten, khususnya komunitas yang termasuk ke dalam Kasatuan Adat Banten Kidul. Tidak seperti lahan di pantai utara yang datar dan merupakan daerah pesawahan produktif dengan irigasi teknis, yang memungkinkan dapat ditanami padi sepanjang tahun.

Pertanian adalah mata pencaharian hidup dan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar rakyat Jawa Barat dan Propinsi Banten, begitu pula dengan masyarakat tradisional. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat di lingkungan masyarakat tradisional adalah bertani atau bercocok tanam. Padi yang ditanam para petani, terutama bagi masyarakat tradisional, merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Menurut Rosyadi dkk (2005: 81), tanaman padi begitu dihormati oleh masyarakat *kaolotan* (masyarakat tradisional Cisungsang), sehingga kata-kata paling indah pun mereka tujukan untuk tanaman padi. Dalam ritual upacara pertanian, ruh tanaman padi dipanggil dengan sebutan *Nyi Pohaci Sanghiyang Sri*, ada juga yang memanggilnya dengan *Nyi Sri*. Hampir seluruh aktivitas kehidupan pada masyarakat tradisional diwarnai oleh

kegiatan dan upacara yang ada hubungannya dengan padi, mulai dari kegiatan bercocok tanam sampai dengan pengelolaan hasil tanam kemudian dimanfaatkan bagi kehidupan, semuanya mendapat perhatian dan perlakuan yang luar biasa. Berbagai aktivitasnya dalam mengelola padi ternyata membawa berkah bagi masyarakatnya, karena selama ini mereka tidak pernah kekurangan atau mengalami krisis pangan selama perjalanan hidupnya.

Krisis ekonomi global yang di dalamnya termasuk krisis pangan, sepertinya tidak pernah menyentuh masyarakat tradisional. Kearifan-kearifan masyarakat dalam mengelola pangan, seyogyanya kita perhatikan dan dapat dijadikan bahan pembelajaran. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan, mengapa kelompok-kelompok masyarakat tradisional mampu mandiri dalam mengelola pangan, khususnya padi? Bagaimana aktivitas masyarakat dalam mengelola pangan khususnya padi, sehingga mereka tidak pernah mengalami kekurangan atau krisis pangan dan menjadi masyarakat yang mandiri di bidang pangan.

Salah satu rangkaian pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki peran dalam menjaga ketersediaan atau cadangan pangan pada kelompok-kelompok masyarakat tradisional adalah sistem pertanian sawah. Bagi masyarakat tradisional, cadangan pangan ini adalah dalam rangka mengantisipasi keadaan-keadaan darurat karena adanya bencana alam, seperti: banjir, kemarau panjang, perang, bencana alam dan berbagai macam ketidakpastian lainnya. Bagi masyarakat tradisional, cadangan lebih pada persediaan pangan pada musim paceklik atau setelah musim tanam, karena di lingkungan masyarakat tradisional, musim tanam hanya satu kali dalam setahun. Sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat kasepuhan atau masyarakat tradisional berasal dari sawah dan selebihnya dari ladang atau *huma*. Hal itu disebabkan sistem pertanian yang dikembangkan pada masyarakat tradisional adalah pertanian sawah dan ladang atau

huma.

Khusus untuk bidang pertanian atau bercocok tanam, utamanya bertani padi, tradisinya masih kuat dipertahankan hingga sekarang. Dalam pengelolaan lahan pertanian tidak terlepas dari aturan adat yang berlaku. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pertanian khususnya padi masih bernuansa tradisional, mulai dari sistem teknologi, distribusi, penyimpanan, hingga cara mengkonsumsi. Proses ini masih dilakukan pada tahap-tahap kegiatan berikutnya sampai padi dipanen dan kemudian dimasukkan ke lumbung atau *leuit*. Namun, karena dalam tradisi mereka padi tidak hanya dianggap sebagai komoditas andalan, yaitu sebagai bahan makanan pokok, maka dalam setiap tahap kegiatan bertani selalu diikuti dengan penyelenggaraan upacara ritual melalui penyediaan sesajen.

Pada umumnya padi yang ditanam masyarakat di lingkungan kasepuhan atau masyarakat tradisional adalah padi gede atau *pare gede* atau *pare ranggeuyan*. Padi yang tumbuh di sawah masih menggunakan padi lokal dan masih menggunakan sistem tradisional dalam pengelolaan dan pengolahan sawah. Hal ini disebabkan *pare gede* relatif lebih tahan lama dan hasilnya banyak dan bagus.

Oleh sebab itu, hampir seluruh aktivitas kehidupan bertani pada masyarakat tradisional, sarat dan kental dengan ritual. Ritual tentang sistem pertanian bagi masyarakat tradisional merupakan warisan leluhur yang tidak pernah mereka tinggalkan. Dengan kata lain, ritual adat senantiasa menyertai setiap tahapan aktivitas dalam pertanian, mulai dari pengelolaan sawah sampai pada saat panen dan atau pasca panen.

Sebagian besar petani yang hidup di lingkungan masyarakat tradisional masih mempunyai keyakinan bahwa mereka hanya boleh menanam padi sekali setahun. Mereka beranggapan bahwa bumi adalah simbol *ibu*, dan tidak elok jika ia dipaksa melahirkan lebih

dari satu kali dalam setahun. Jika itu tetap dipaksakan, maka bumi akan rusak dan tak lagi sanggup memberikan hasil bagi manusia. Bertani atau bercocok tanam bagi masyarakat tradisional mempunyai arti penting karena sangat berkaitan dengan *Nyi Sri* atau yang kita kenal dengan Dewi Sri atau Dewi Padi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan *Nyi Sri* bagi masyarakat tradisional adalah sesuatu yang sakral oleh karena itu hal-hal yang berhubungan dengan *Nyi Sri* harus dilakukan dengan hati-hati dan ritualisasi. Selain itu, dalam pengelolaan sawah mereka juga mengenal larangan-larangan. Salah satu kelompok masyarakat yang ada di sekitar wilayah Banten Kidul melarang masyarakatnya untuk bekerja pada hari Sabtu, Minggu dan hari ke-15 ditambah hari ke-30 setiap bulannya berdasarkan sistem kalender Qamariyah (Islam) dan ditambah pada setiap hari Selasa di Bulan Maulid.

Berikut adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam pertanian pada salah satu masyarakat tradisional yang ada di wilayah Banten Kidul; ketika musim panen tiba, orang-orang sudah bersiap-siap untuk memanen sawah miliknya masing-masing. *Dibuat* atau memetik hasil panen masih menggunakan peralatan yang sederhana yaitu *etem* (ketam). *Ranggeuyan* pare (untaian padi) yang dikumpulkan di pinggir sawah kemudian *digedengan* (diikat masing-masing dua pocong jadi satu). Gedengan padi selanjutnya dijemur di *lantayan* di area dekat sawah sampai kering. Biasanya proses menjemur ini memakan waktu satu minggu hingga sebulan lamanya. Padi yang telah kering di *lantayan* kemudian diangkut dan disimpan, disusun di dalam *leuit*.

Leuit merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pertanian masyarakat tradisional. *Leuit* atau dalam istilah umum disebut “lambung” adalah bangunan tradisional yang diperuntukkan bagi penyimpanan padi pasca panen dari hasil bertanam padi pada lahan pertanian. *Leuit* hanya sebuah bangunan yang sangat

sederhana, baik bentuk, bahan, maupun cara pembuatannya. Di balik kesederhanaannya itu terdapat seperangkat pranata sosial budaya serta konsep-konsep “ideasional” masyarakat pemiliknya, yang mencerminkan bentuk masyarakat bagaimana yang diidamkan oleh masyarakat itu sendiri.

Adapaun *lantayan* adalah alat untuk menjemur padi. *Lantayan* ini terbuat dari bambu yang disimpan memanjang di atas atau disangga dua buah tiang bambu. Alat ini menyerupai rak, bagian atasnya ditutupi daun *tepus* atau *rumbia* atau daun kelapa kelapa kering sebagai peneduh. Tutup atau *turub lantayan* ini sewaktu-waktu bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. *Lantayan* letaknya tidak jauh dari sawah, hal ini memudahkan dan meringankan para petani apabila mereka akan menjemur padi hasil panen.

Ternyata perjalanan padi sampai masuk *leuit*, bukan perjalanan sederhana, tetapi merupakan perjalanan yang cukup panjang dan unik. Padi yang disimpan di dalam *leuit* adalah padi jenis *ranggeuyan*, bukan padi biasa atau segon yang dapat menggunakan arit atau sabit kemudian padi dirontokkan. Untuk padi yang disimpan di dalam *leuit*, dituai atau *dipanen* dengan menggunakan *etem*, padi diikat dalam bentuk *geugeusan* atau *pocong*. Setelah padi kering, padi diangkut atau *diunjal* dengan cara dipikul dengan menggunakan bambu panjang yang cukup kuat dan lentur, padi siap diangkut ke tempat penyimpanan yaitu *leuit*.

Bambu untuk memikul padi memang agak khusus di samping untuk membuat enak pemikul atau memperingan karena gerakan lenturnya (pada saat memikul, bambunya turut bergerak), ternyata di balik perlakuan itu, terkandung maksud tertentu yakni sikap penghormatan terhadap *Nyi Sri* (Dewi Padi). Pada saat dipikul, gerakan bambu pemikul itu membuat senang atau bisa menyenangkan padi (*Nyi Sri*) yang dipikul. Apabila kita melihat padi yang sedang dipikul, padi tersebut ikut bergerak seperti diayun.

Menurut para petani yang hidup di lingkungan masyarakat tradisional atau kasepuhan, dengan perlakuan seperti itu, *Nyi Sri* pun merasa senang.

Begitu pula, setelah petani yang mengangkut padi sampai ke tempat penyimpanan atau *leuit*, padi tersebut tidak disimpan begitu saja atau dilempar, tetapi padi tersebut mendapat perlakuan secara khusus lagi, yaitu menyimpan atau memasukkan padi ke dalam *leuit* dengan hati-hati, satu persatu jangan sampai dilempar. Mereka sangat hati-hati dalam memperlakukan *Nyi Sri* tersebut, karena mereka berpendapat, bahwa *Nyi Sri* lah yang telah mencukupi dan memberi kehidupan kepada mereka. *Nyi Sri*-lah yang telah mengayomi mereka selama ini. Oleh karena itu, ada sebagian masyarakat yang menghormati *Nyi Sri* itu dengan melakukan ritualisasi misalnya dengan menyediakan sesajen berupa *rurujakan* dan makanan lainnya. Mereka beranggapan bahwa *Nyi Sri ngancik ka urang, ngahuripkeun urang, nya urang ge kedah timbal balik ngajaga Nyi Sri, ngahuripkeun Nyi Sri*.

Untuk lebih menenangkan para petani dan juga menjaga padi yang ada di dalam *leuit*, supaya padi tersebut mencukupi dan tidak ada yang mengganggu, maka dibacakan doa-doa dan mantera petani akan memasukkan dan mengeluarkan padi tersebut ke dan dari dalam *leuit*. Pada masyarakat tradisional tertentu memasukkan padi ke dalam *leuit* disebut *ngaleuitkeun* atau *ngalelepkeun* pare. Sedangkan mengambil padi dari *leuit* disebut *ngahudangkeun* pare. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyimpanan padi atau lumbung padi, *leuit* merupakan stok pangan bagi masyarakat.

Masyarakat sadar betul stok pangan harus selalu ada di dalam *leuit*. Oleh sebab itu, isi *leuit* sangat dijaga jangan sampai kosong, sehingga sering sekali padi dari *leuit* tidak dapat dimakan karena sudah terlalu lama. Saking disiplinnya menjaga stok pangan yang ada di dalam *leuit*, apabila masyarakat sedang panen buah-

buahen atau cengkih dengan hasil yang lumayan, mereka membeli beras untuk makan sehari-hari dan mereka tidak mengambil padi dari *leuit*.

Selain *leuit* harus bersih, sisa padi yang ada di dalam *leuit* harus dikeluarkan terlebih dahulu, agar padi yang baru, bisa tersimpan di bawah dan yang lama di atas. Ada mantra-mantra yang harus dibacakan ketika menyimpan padi itu, sepertinya tidak hanya ketika menyimpan padi, pada saat mengambil padi dari *leuit* untuk ditumbuk guna keperluan sehari-hari juga tidak sembarangan, tetapi harus mengikuti tatacara yang sudah diatur. Orang yang menyimpan dan yang mengambil padi tentunya harus dari anggota keluarga yang dapat membacakan mantra-mantra itu.

Demikian juga halnya ketika akan *nganyaran* atau menumbuk padi baru, hasil panen untuk pertama kali dan diambil dari *leuit*, orang yang akan mengerjakannya harus melakukan puasa terlebih dahulu dan tidak boleh bicara sampai menanak nasi itu kemudian. Puasa hanya dilakukan untuk menumbuk padi *nganyaran* sekali itu saja, dan untuk penumbukan selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan kegiatan ritual khusus. Jadi, hanya untuk sekali itu saja. Biasanya satu orang hanya dapat menumbuk padi sampai 2 pocong saja. Untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, padi yang ditumbuk terlebih dahulu adalah padi stok lama yang sudah sengaja disimpan di atas padi yang baru. Bagi yang memiliki lahan tanam padinya luas, padi yang disimpan di *leuit* tidak habis dua sampai tiga tahun. Salah satu kearifan masyarakat tradisional yang dikenal dan sangat diikuti oleh anggota masyarakatnya adalah *pantang* untuk menjual padi mereka (*tabu*) walaupun mereka punya sisa stok. Kalau memungkinkan memiliki uang atau rizqi, mereka malah membeli beras.

Berbicara mengenai kualitas padi hingga dapat bertahan lama disimpan di dalam *leuit* ternyata berkaitan erat dengan cara

penanaman padi itu sendiri sebelum dipanen dan disimpan. Berdasarkan pengalaman mereka, padi yang ditanam dengan menggunakan obat-obatan kimia, hanya dapat bertahan hingga 7 tahun lamanya. Lain halnya jika menanam padinya secara alami dan tradisional, maka padi yang dipanen dan disimpan di *leuit* dapat bertahan hingga 30 tahun lamanya.

Sebagian besar anggota masyarakat tradisional, keberadaan *leuit* tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi semata, melainkan juga memiliki fungsi-fungsi lain yang terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakat tradisional. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah:

- *Fungsi sosial*; pada saat musim paceklik tiba, masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat tradisional yang membutuhkan bahan pangan, bisa meminjam dari *leuit* paceklik.
- *Fungsi ekonomi*; kemampuan *leuit* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi warga, *leuit* dapat dijual bila si pemilik akan pindah tempat tinggal.
- *Fungsi budaya*; *leuit* dapat memenuhi dan memelihara adat istiadat, khususnya dalam hal spiritual.

Mata pencaharian masyarakat tradisional dalam bidang pertanian, telah mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat tradisional itu sendiri, atau dengan kata lain masyarakat tradisional telah berswasembada beras sejak sebelum pemerintah mencanangkannya. Masyarakat tradisional masih bertahan sampai sekarang dan tidak terkena dampak krisis ekonomi global. Peningkatan secara ekonomis masih memungkinkan dengan sentuhan irigasi teknis sehingga memungkinkan kegiatan menanam lebih dari satu kali dalam satu tahun. Apabila hasil produksi masyarakat tradisional dapat dikonsumsi masyarakat luar, sangat memungkinkan beras dari masyarakat tradisional menjadi beras dengan kualitas tinggi, misalnya hasil panennya akan setara dengan beras pandan

wangi atau beras organik lainnya, yang memiliki nilai ekonomi di atas beras pada umumnya.

PENUTUP

Kesungguhan disertai disiplin dalam melaksanakan komitmen adat untuk mengelola hasil pertanian, khususnya padi, telah membawa masyarakat tradisional mandiri dalam bidang pangan. Lahan pertanian yang terbatas tidak seluas daerah lainnya, dengan masa tanam yang pada umumnya masih satu kali tanam dalam satu tahun tidak menjadi kendala dalam proses kehidupan masyarakat tradisional dengan pengadaan pangannya. Persoalan dapat saja timbul dalam alih generasi ke depan atau regenerasi petani, dengan aktivitas pengelolaan pertanian dilakukan oleh mayoritas generasi tua yang rata-rata di atas usia produktif 40 tahun, sementara generasi muda kurang tertarik untuk menjadi petani, sehingga tidak akan mampu melanjutkan tradisi yang baik tersebut dalam mengelola atau mengolah lahan pertanian, khususnya padi sebagai bahan ketersediaan pangan.

Sebagai upaya pelestarian, sebaiknya pola pengelolaan pertanian dan pangan yang dilakukan masyarakat tradisional diwariskan kepada anak-anak muda atau generasi muda di lingkungannya. Hal ini penting untuk menjaga dan melestarikan budaya petani atau budaya cocok tanam pada generasi penerus, sehingga dapat menghasilkan ketersediaan dan ketahanan pangan secara berkesinambungan.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penghargaan terhadap makanan pokok, dalam arti tidak memubadirkan atau membuang-buang padi atau beras sebagai hasil produksi petani yang mestinya dikonsumsi. Banyak kita temukan sisa makanan yang tidak

habis terus dibuang begitu saja. Hal ini banyak ditemukan di tempat-tempat pesta atau acara-acara kenduri di lingkungan masyarakat umum, terutama di daerah perkotaan. Mungkin hal seperti ini tidak ditemui di lingkungan masyarakat tradisional yang notabene menganggap nasi atau beras adalah penjelmaan Dewi Sri, yang dianggap sakral dan tidak boleh dihambur-hamburkan apalagi dibuang.

Terakhir dalam upaya meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan pada masyarakat tradisional dan juga masyarakat pada umumnya adalah adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan pangan dalam setiap kesempatan. Dengan begitu ada sinergitas kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat, terutama masyarakat tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri S. dkk. 2007. *Nyanghai ka Hukum, Nyanghunjar ka Nagara*, (Sebuah Upaya Masyarakat Cibedug Memperoleh Pengakuan Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Ekadjati, Edi, S. 1980. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaanannya*. Bandung: Girmukti Pustaka.
- Kosnadi, Engkos . “Leuit”, *Pertahanan Keamanan Pangan Rakyat*, dalam <http://ramaprabu.multiply.com><http://kaoemdewantara.multiply.com>
- Merlina, Nina. 2003. Fungsi Leuit bagi Masyarakat Desa Cidikit Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Bandung : BPSNT.
- Merlina, Nina, dkk. 2006. *Kepercayaan Masyarakat Kasepuhan Cicarucub dalam Aktivitas Pertanian*. Bandung: BPSNT

- Rosyadi, dkk. 2005. *Peranan Leuit dalam Kehidupan Masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang*. Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Bandung: Alqaprint- BPSNT
- Welni D.N., Mutia R., Yohana M.I, Hery J. *Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptamulya dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)*. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan –IPB.

SELINTAS SEJARAH KECAMATAN UJUNG BERUNG BANDUNG

Euis Thresnawaty S
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jl. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: euisthresnawaty@yahoo.com

ABSTRACT

The writing of local history is needed. This is in order to satisfy the desire of knowing and understanding the history of our area, our shelter, and our origins. It is also to find out the origin culture and to understand the development of an area. Ujung Berung, located in the Eastern of Bandung, is one of the areas which became the embryo of urban city and county life in Bandung. Ujung Berung with its long history line is interesting to be discussed.

Keywords: History, Ujung Berung, place.

PENDAHULUAN

Kecamatan Ujungberung merupakan salah satu wilayah Kota Bandung yang terletak di bagian timur dengan posisi di lereng dan kaki Gunung Manglayang, memanjang dari timur ke barat dengan kontur tanah yang datar dan menanjak ke arah utara. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 661,258 hektar. Secara geografis Kecamatan Ujungberung terletak pada posisi 107°42'

Bujur Timur dan 6°54' Lintang Selatan di sisi utara jalan negara (Jalan Abdul Haris Nasution), di kaki Gunung Manglayang. Kecamatan Ujungberung berada pada ketinggian 500 dpl dengan suhu udara rata-rata 19° Celcius-24° Celcius dengan curah hujan 2.400 mm/tahun.

Secara administratif Kecamatan Ujungberung, sebelum pemekaran wilayah sempat menjadi batas antara wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung di sebelah timur (kini batas wilayah tersebut diambilalih oleh Kecamatan Cibiru), berbatasan dengan:

- Kecamatan Cinambo Kota Bandung di sebelah selatan
- Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung di sebelah utara
- Kecamatan Cibiru Kota Bandung di sebelah timur
- Kecamatan Mandalajati Kota Bandung di sebelah barat

Kecamatan Ujungberung dibentuk berdasarkan PP Nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Bandung dan Kabupaten Bandung. Ketika itu Kecamatan Ujungberung terdiri dari 7 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pasir Endah
2. Kelurahan Cigending
3. Kelurahan Pasir Wangi
4. Kelurahan Pasir Jati
5. Kelurahan Pasanggrahan
6. Kelurahan Ujungberung
7. Kelurahan Cisaranten Wetan

Kemudian setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Ujungberung. Pemekaran ini tentu saja menimbulkan dampak terutama pada batas wilayah, pembagian batas wilayah

administratif, jumlah penduduk, potensi yang dimiliki (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintahan, Sarana Prasarana), Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (PPTK), dan Program Kerja Tahunan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Ujungberung dibagi dalam 5 kelurahan, terdiri dari 54 RW dan 262 RT, yaitu:

1. Kelurahan Pasir Endah, terdiri dari 49 RT/11 RW
2. Kelurahan Cigending, terdiri dari 63 RT/11 RW
3. Kelurahan Pasir Wangi, terdiri dari 43 RT/10 RW
4. Kelurahan Pasir Jati, terdiri dari 51 RT/12 RW
5. Kelurahan Pasanggrahan, terdiri dari 61 RT/14 RW

Jumlah penduduk Kecamatan Ujungberung pada tahun 2009 adalah 55.965 jiwa, terdiri dari 27.774 laki-laki dan 28.191 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) saat ini mencapai sekitar 14.449 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2007 dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 9,037 jiwa/hektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Kelurahan terpadat adalah Kelurahan Cigending.

Penduduk yang masih usia produktif adalah 32.478 orang, ibu rumah tangga 7.201 orang, dan yang masih sekolah 28.313 orang. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Ujungberung yang paling banyak adalah pegawai swasta sebanyak 8.457 orang, pengusaha 6.806 orang, PNS 6.011 orang, buruh swasta 4.242 orang. Sementara itu petani yang biasanya menduduki posisi terbanyak kini hanya tinggal 2.423 orang, salah satu penyebabnya mungkin karena berkurangnya lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan.

Dalam bidang kesehatan, kegiatan-kegiatan pembinaan kesehatan dilakukan oleh Puskesmas, kader-kader PKK RT/RW, melalui penekanan pada usaha penanggulangan kesehatan pada anak-

anak balita. Sarana kesehatan yang ada adalah sebagai berikut: Rumah bersalin/ BKIA 11 buah, Dokter Umum 13 orang, Dokter Anak 2 orang, Dokter Kandungan 3 orang, Dokter Gigi 6 orang, Dokter Spesialis 2 orang, Dokter Hewan 1 orang, Puskesmas 1 buah, Klinik/ Balai Pengobatan 7 buah, Apotik 7 buah, Toko obat 3 buah, dan Posyandu 55 buah. Untuk prasarana olah raga di Kecamatan Ujungberung tersedia 2 buah lapangan sepak bola, 29 buah lapang bulu tangkis, 55 buah tenis meja, 35 buah lapangan voli, 6 buah lapangan basket, 7 buah lapang tenis, dan 1 buah lapangan futsal.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Ujungberung beragama Islam. Hal ini bisa dilihat dari komposisi penganut agama, yaitu: Islam 67.469 orang, Kristen Katholik 179 orang, Kristen Protestan 607, Budha 75 orang, Hindu 60 orang. Untuk prasarana ibadah di wilayah ini terdapat 113 masjid yang tersebar di setiap kelurahan.

Untuk prasarana di bidang pendidikan di lingkungan Kecamatan Ujungberung terdapat 28 Taman Kanak-kanak, 14 Sekolah Dasar, 9 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 12 Lembaga Pendidikan, dan 5 tempat kursus. Untuk sarana umum di wilayah Ujungberung terdapat beberapa instansi BUMN/BUMD yaitu 3 buah bank, terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN, Telkom, PLN, Pos Giro dan Perum Pegadaian dan sebuah instansi otonomi yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU). Instansi pemerintah yang ada adalah: Kantor Urusan Agama (KUA), Polsek, Polresta, dan Perhutani. Wilayah Kecamatan Ujungberung yang dikenal sebagai kota seni di wilayah Kota Bandung tentu saja memiliki banyak sanggar seni yang tersebar di hampir seluruh kelurahan. Yang tercatat ada 32 buah sanggar seni, di antaranya seni benjang, jaipongan, wayang golek, kuda lumping, dan lain-lain.

Sebagai wilayah yang dijuluki kota seni di Kota Bandung, sejak enam tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2005 secara rutin di

Kecamatan Ujungberung diadakan acara Festival Ujungberung. Festival Ujungberung merupakan kalender tetap pergelaran seni budaya dari BKPMK (Badan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kota) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan di Alun-alun Ujungberung setiap bulan Juli.

Asal Nama Ujungberung

Dalam buku berjudul *Ujungberung Serambi Timur Bandung*, Anto S. Widjaya menguraikan bahwa terdapat beberapa versi berbeda mengenai asal-usul nama Ujungberung ini, dua di antaranya adalah:

- a. Berdasarkan "*Sasakala*" atau legenda, yaitu ketika Sangkuriang sedang sibuk membuat perahu sesuai dengan tuntutan Dayang Sumbi, ibu kandung yang ingin diperistrinya, tentu saja hal ini membuat Dayang Sumbi merasa khawatir. Untuk menghalangi pekerjaan Sangkuriang yang hampir selesai, ia berlari ke atas bukit dan melambai-lambaikan selendang mayang miliknya untuk memohon kepada sang surya agar segera terbit. Ada juga yang menduga tindakan Dayang Sumbi tersebut untuk memberi isyarat kepada para wanita agar segera menumbukkan alu pada *lisung* sebagai tanda hari telah pagi. Menyadari pekerjaannya telah gagal karena kesiangannya, Sangkuriang pun marah lalu ia menendang perahunya hingga tertelungkup. Konon perahu itu menjelma menjadi Gunung Tangkuban Perahu, sedangkan selendang mayang milik Dayang Sumbi berubah menjadi Gunung Manglayang. Tempat akhir dari usaha Sangkuriang dalam mengumbar nafsu untuk mewujudkan keinginannya mempersunting ibunya disebut Ujungberung, yaitu tempat ujungnya *ngaberung* nafsu atau akhir dari nafsu yang berkobar-kobar dalam upayanya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi

- untuk dibuatkan danau raksasa dan perahu dalam waktu semalam sebagai syarat untuk menikahinya.
- b. Versi lainnya berkaitan dengan keberadaan Danau Bandung Purba. Danau Bandung Purba tercipta kira-kira 6000 tahun yang lalu sebagai akibat dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Letusan tersebut memuntahkan abu dan lava sehingga menyumbat aliran Sungai Citarum Purba dan airnya menggenangi sebagian wilayah Bandung. Diperkirakan luas Danau Bandung membentang dari timur ke barat (Cicalengka-Ujungberung-Padalarang) sejauh 50 kilometer, dan utara ke selatan (Bukit Dago-Soreang-Ciwidey) sejauh 30 kilometer. Hal ini bisa dibuktikan dengan nama-nama tempat yang dulu dimungkinkan erat kaitannya dengan Telaga Bandung Purba. Ujungberung dikaitkan dengan suatu tempat yang menjorok ke laut atau tanjung, misalnya Ujung Kulon, Ujung Pandang. Di bekas tepian Telaga Bandung sampai kini masih ditemukan nama-nama seperti Tanjung Sari, Tanjunglaya, dan sebagainya.

Sejarah Kecamatan Ujungberung

Kabupaten dan Kota Bandung adalah sebuah tempat di wilayah Propinsi Jawa Barat yang memiliki rentang sejarah yang cukup panjang. Wilayah ini telah melewati lima zaman, yaitu zaman kerajaan, perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan. Di usianya yang tiga setengah abad lebih, khususnya Kabupaten Bandung tercatat tiga kali berganti lokasi ibukota. Pertama di Krapyak/Bojongasih yang kemudian berganti nama menjadi Citeureup, lalu di Dalem Kaum, dan terakhir di Soreang.

Apabila melihat rentang sejarah yang panjang tersebut mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa wilayah yang menjadi cikal bakal kehidupan Kota dan Kabupaten Bandung salah

satunya adalah Ujungberung. Namun demikian belum diketahui kapan sebenarnya Ujungberung sebagai suatu wilayah yang utuh mulai diperhitungkan dan menjadi perhatian. Akan tetapi minimal dari cerita legenda, nama Ujungberung sama tuanya dengan kelahiran cerita legenda “Sangkuriang” atau berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Secara historis, menjelang pertengahan abad ke-17, wilayah Ujungberung mulai disebut-sebut sebagai suatu wilayah di Priangan dalam kekuasaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (Widjaya, 2009:vii).

Ketika Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*) selesai dibangun pada tahun 1810, wilayah Ujungberung yang sangat luas, yaitu memiliki luas sekitar 42.000 hektar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Wilayah Utara Jalan Raya Pos disebut “*Oedjoengbroeng Kaler*”
2. Wilayah Selatan Jalan Raya Pos disebut “*Oedjoengbroeng Kidoel*”

Wilayah Ujungberung Kidul sebagian besar wilayahnya masih berupa rawa bernama “*Geger Hanjuang*”, merupakan sisa pengeringan Danau Purba Bandung. Sementara bagian Utara beberapa bagian telah dihuni menjadi perkampungan dan perkebunan. Pusat pemerintahannya bernama “*Oedjoengbroeng*” yang terletak di sekitar Cipaganti Hilir.

Batas timur adalah Sungai Cibeusi yang berbatasan dengan Kabupaten Parakanmuncang. Di utara berupa rangkaian pegunungan yang diawali dari Gunung Manglayang, Gunung Bukit Tunggul, hingga Gunung Tangkuban Parahu. Di selatan berbatasan dengan ibu kota Bandung Lama, yaitu Krapyak atau Dayeuh Kolot, dan sepanjang aliran Sungai Citarum. Sebelah barat berbatasan dengan Cimahi. Dapat dibayangkan, betapa luasnya wilayah Ujungberung saat itu, yaitu lebih dari 42.500 hektar dengan jumlah desa lebih dari 80 desa.

Setelah Jalan Raya Pos selesai dibangun, arus urbanisasi pun mulai mengalir ke wilayah Ujungberung. Wilayah Ujungberung

yang merupakan bagian dari Wilayah Priangan merupakan sebuah kawasan yang subur dan siap untuk digarap oleh para kaum urban. Para pendatang yang menetap di sebelah selatan Ujungberung, secara ekonomis jauh lebih berhasil daripada mereka yang tinggal di utara Jalan Raya Pos. Hal ini mungkin disebabkan tanah di utara Ujungberung sebagian besar adalah milik Pemerintah Hindia Belanda sehingga pengelolaannya berbenturan dengan aturan kolonial. Wilayah selatan Ujungberung dianggap wilayah tak bertuan karena berupa lahan rawa. Rawa tersebut merupakan sisa dari pengeringan Danau Purba Bandung.

Karena itulah, khusus di wilayah *Oedjoengberoeng Tempo Doeloe* hingga kini dikenal nama-nama daerah yang berhubungan dengan air (*cai, ci*), rawa (*ranca*), dan lubuk (*leuwi, lembang*). Nama-nama daerah itu misalnya Cicadas, Cikadut, Cipadung, Cijanjalu, Cinambo, Rancaoray, Rancamaung, Rancamasuk, Lembangjero, dan sebagainya. Berbeda dengan nama-nama tempat yang berada di utara Jalan *Grote Postweg* yang bukan bekas rawa, biasanya menggunakan nama *pasir* (bukit), misalnya Pasirjati, Pasirleutik, Pasirluhur, dan sebagainya (Widjaya, 2009: 41).

Sebelum Jalan Raya Pos dibuat, wilayah Ujungberung, khususnya Ujungberung Wetan tidak menarik untuk disinggahi atau dijadikan daerah hunian oleh para pendatang dari wilayah Priangan Timur. Namun, setelah Jalan Raya Pos dibuat melalui Ujungberung, dan wilayah utara Ujungberung dijadikan sebagai daerah perkebunan kopi, maka mulailah orang berdatangan ke Ujungberung untuk menetap. Sebelum tahun 1810, kampung-kampung yang berada di wilayah Ujungberung berada jauh di perbukitan utara, dekat lokasi perkebunan, serta di bagian selatan dekat pinggiran rawa. Tetapi ketika Jalan Raya Pos dibuat, kampung-kampung tersebut berpindah mendekati alur Jalan Raya Pos.

Ujungberung tidak hanya menarik untuk pribumi saja, tetapi juga menarik perhatian orang asing, khususnya orang Belanda. Mereka mulai berdatangan dan menetap di sekitar ibu kota Ujungberung, terutama di bagian Timur Ujungberung, di sekitar pusat pemerintahan Distrik Ujungberung. Kemungkinan, jauh sebelum pemerintahan distrik diterapkan, mereka telah menetap di sekitar tempat tersebut. Karena sebelum Jalan Raya Pos dibuat, para *Preangersplanters* telah menjadikan wilayah *Ujungberung Kaler* sebagai sentra perkebunan kopi, teh, dan peternakan sapi.

Tahun 1815 Pemerintah Kolonial mulai menerapkan sistem pemerintahan distrik. Saat itulah pemerintah kolonial mulai menempatkan para pegawai pemerintah untuk mengelola daerah *Distrik Ujungberung Wetan* yang kaya akan perkebunan kopinya. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama adalah pegawai pemerintah yang diangkat dari golongan orang asing sendiri.
2. Kelompok pegawai pemerintah dari golongan bangsawan pribumi (wedana/ pangreh praja).

Selanjutnya diikuti kelompok lain sebagai penduduk berikutnya yang menetap di sekitar wilayah Ujungberung, yaitu:

- Mereka yang tinggal dekat dengan pos pemberhentian kereta, sekitar Kampung Tagog—Sindanglaya, Tagog—Cinunuk, karena di sekitar tempat itu terdapat kandang kuda dan tempat tinggal para kusir pengganti kereta pos.
- Mereka yang mempunyai kaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan kopi dan pelaksanaan proyek tanam paksa, yaitu para “budak belian” penggarap perkebunan kopi milik Andries de Wilde, tuan tanah pemilik 2/3 wilayah Ujungberung atau 28.000 hektar. Mereka diperkirakan berasal dari Sukabumi, Bogor, Cianjur, tempat asal perkebunan kopi milik Andries yang ditempatkan di perkebunan sebelah barat Ujungberung.

Sementara di sebelah Timur Ujungberung ditempatkan para buruh dan budak belian dari Tarogong Garut dan sekitarnya.

Tahun 1840 ketika Tanam Paksa mulai dihapuskan, wilayah Ujungberung dibagi menjadi 2 wilayah distrik yaitu *Distrik Ujungberung Wetan* dengan pusatnya di Ujungberung, dan *Distrik Ujungberung Kulon* dengan pusatnya di Lembang. Setiap distrik dikepalai oleh seorang Wedana atau Kepala *Cutak* (Camat).

Pada tahun 1869 *Distrik Ujungberung Kulon* berpenduduk 18.478 orang dengan pusat pemerintahan berada di Cipaganti. Distrik ini terdiri dari 10 *Onderdistrict of Troep* (setingkat kecamatan), yaitu: Ciraten, Cibeunying, Cipaganti, Geger Kalong, Cibeureum, Balubur, Cibangkong, dan Buahbatu. *Distrik Ujungberung Wetan* berpenduduk 12.795 orang dengan pusat pemerintahan di Ujungberung. Pusat pemerintahan tersebut berada pada ketinggian 2.240 kaki di bawah permukaan laut. Distrik ini terdiri dari 8 *Onderdistrict of Troep*, yaitu Ciparungpung, Ujungberung, Binong, Cisaranten, Cicaheum, Cibiru, Buahbatu, dan Lengkong (Widjaya, 2009: 65).

Tahun 1870 keluar Undang-undang Agraria, setahun kemudian yaitu tahun 1871 terjadi Reorganisasi wilayah di Priangan, maka mulai saat itu diadakan perbaikan dan pembangunan sarana serta prasarana penunjang jalannya pemerintahan di pusat ibu kota Distrik Ujungberung Wetan. Menurut Anto Widjaya dalam bukunya *Ujungberung Serambi di Timur* ibukota Ujungberung Wetan berada di pinggir Jalan Raya Pos berjarak 5 *pal* (1 *pal* = 1605,943 meter) dari titik 0 kilometer. Wilayah tersebut berada sekitar Nyublek, antara Cikadut dan Sukamiskin. Diperkirakan pemindahan ibu kota Distrik Ujungberung dari Nyublek ke sekitar alun-alun Ujungberung sekarang terjadi setelah tanam paksa mulai dihapuskan, yaitu sekitar tahun 1830-an.

Pada awal tahun 1900-an melalui *Staatsblaad* 1901, No. 327, tertanggal 1 September 1901, *Distrik Ujungberung Wetan* dibagi menjadi 3 *onderdistrik*, yaitu:

1. *Onderdistrik* Cibiru
2. *Onderdistrik* Cibeunying
3. *Onderdistrik* Buah Batu

Distrik Ujungberung Kulon menjadi:

1. *Onderdistrik* Lembang
2. *Onderdistrik* Balubur
3. *Onderdistrik* Andir

Luas *Distrik Ujungberung Kulon* semakin mengecil karena sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah Kota Bandung dan *Distrik Ujungberung Wetan*. Luas wilayah *Distrik Ujungberung Kulon* tinggal 19.520,44 hektar dibagi menjadi 511 desa. *Distrik Ujungberung Wetan* bertambah di hulu Cikapundung dengan luas keseluruhan 22.036,17 hektar dibagi 31 desa. Keduanya di bawah kontrol *Afdeling* Bandung Utara. Akan tetapi kemudian terjadi lagi perubahan pada tahun 1911, Kota Bandung kembali memperluas wilayahnya dengan memangkas sebagian besar wilayah *Distrik Ujungberung Kulon*.

Pada tahun 1913, *Distrik Ujungberung Wetan* kembali berubah menjadi *Distrik Ujungberung*, dibagi menjadi 4 *onderdistrik*, yaitu:

1. *Onderdistrik* Cibeunying
2. *Onderdistrik* Buah Batu
3. *Onderdistrik* Cibiru
4. *Onderdistrik* Ujungberung

Tetapi melalui *Staatsblaad* 1929, No. 2, tertanggal 5 Januari 1929, *Distrik Ujungberung* kembali dibagi menjadi 3 *onderdistrik*, yaitu:

1. *Onderdistrik Ujungberung*
2. *Onderdistrik Cicadas*
3. *Onderdistrik Buah Batu.*

Pada tahun 1987, hampir 30% wilayah Ujungberung dan pusat pemerintahan Ujungberung masuk ke dalam wilayah Kota Bandung. Hal tersebut menandai dihapusnya pemerintahan kawedanaan. Dengan demikian Ujungberung sebagai suatu kawasan di timur Kabupaten Bandung pun tamat riwayatnya. Kini Ujungberung hanya menjadi sebuah kota kecamatan di kawasan Kota Bandung.

Pemangku Jabatan di Wilayah Ujungberung

Tercatat beberapa pemangku jabatan yang ada di wilayah Ujungberung, yaitu periode *Ujungberung Kulon*, *Ujungberung Wetan*, dan Ujungberung, yaitu:

Wedana Ujungberung Kulon:

1. R. Rangga Kartadiradja	1887-1892
2. R. Parba Koesoema	1893- 1898
3. R. Rangga Arga Goernita	1898- 1901
4. Mas Rangga Tirta Madja	1901- 1907
5. R. Soeria Karta Legawa	1908- 1910
6. R. Kandoeroean Satjakoesoema	1910-1911

Wedana Ujungberung Wetan:

1. R. Raksamanggala	_____
2. R. Rangga Kartadiradja	1882- 1887
3. R. Tanoewangsa	1888- 1896
4. Mas Rangga Tirta Madja	1896- 1901
5. R. Prawira Koesoema	1901- 1909

6. R. Tanoemadja 1909- 1913

Wedana Ujungberung:

1. R. Ranga Tanoemadja 1913-1917
2. R. Soeriaadimidjaja 1917- 1925
3. R. Kandoeroean Soeria Soemantri 1926- 1928
4. R. Kandoeroean Sastranagara 1928- 1935
5. R. Agoes Padmanagara 1935- 1937
6. R. Wiradipoera 1937- 1942
7. R. Sambas Prawiraatmadja 1942- 1945
8. R. Ipik Gandamana 1945- 1948

PENUTUP

Ujungberung adalah sebuah wilayah yang memiliki perjalanan panjang dalam sejarahnya. Wilayah ini banyak menyimpan kisah-kisah manis dan pahit, berawal dari sebuah wilayah yang sangat luas, yaitu lebih dari 42.000 hektar, kemudian terbagi menjadi dua wilayah, yaitu *Ujungberung Kaler* dan *Ujungberung Kidul*. Akan tetapi tahun 1840 wilayah Ujungberung dibagi menjadi 2 wilayah distrik yaitu *Distrik Ujungberung Wetan* dengan pusatnya di Ujungberung, dan *Distrik Ujungberung Kulon* dengan pusatnya di Lembang.

Kemudian tahun 1913, *Distrik Ujungberung Wetan* menjadi Distrik Ujungberung, dibagi menjadi 4 *Onderdistrik*, yaitu: *Onderdistrik Cibeunying*, *Onderdistrik Buah Batu*, *Onderdistrik Cibiru*, dan *Onderdistrik Ujungberung*. Tetapi melalui Staatsblaad No. 2, tertanggal 5 Januari 1929, Distrik Ujungberung kembali dibagi menjadi 3 *Onderdistrik*, yaitu: *Onderdistrik Ujungberung*, *Onderdistrik Cicadas*, dan *Onderdistrik Buah Batu*.

Pada tahun 1987, hampir 30% wilayah Ujungberung dan pusat pemerintahan Ujungberung masuk ke dalam wilayah Kota Bandung. Hal tersebut menandai dihapusnya pemerintahan kawedanaan. Dengan demikian Ujungberung sebagai suatu kawasan di Timur Kabupaten Bandung pun tamat riwayatnya. Kini Ujungberung hanya menjadi sebuah kota kecamatan di kawasan Kota Bandung. Namun demikian, meskipun “hanya” menjadi sebuah kecamatan, pemerintah kota dan kabupaten masih menandai peta wilayah beberapa kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Ujungberung, dan kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang tidak pernah sepi. Bahkan, Ujungberung kini dikenal sebagai pusat budaya Sunda di kawasan Bandung Raya yang secara rutin menyelenggarakan Festival Ujungberung dengan menampilkan berbagai kesenian tradisi Sunda.

DAFTAR PUSTAKA

Anggapraja, Sulaeman, 1977.

Tinjauan Sejarah Kabupaten-kabupaten di Priangan (dari abad ke 16-19)

Atmamihardja, R. Mamun, 1958.

Sadjarah Soenda, Bandung: Ganacop NV

Badan Pengembangan Informasi Daerah Kabupaten Bandung, 2003.

Sejarah Kabupaten Bandung, Bandung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAD.

Kunto, Haryoto, 1989.

Wajah Bandoeng Tempo Doelo”, Bandung: P.T Granesia

Lubis, Nina H, 2000.

Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat, Bandung:
Alqaprint

Pemda Kabupaten Bandung, 1974.

Sejarah Kabupaten Bandung, Bandung: Pemda

Widjaya, Anto S, 2009.

Ujungberung Serambi Timur Bandung. Bandung :
Gentabunda.

BIOGRAFI

Upaya Memahami dan Mengawetkan Sejarah

Heru Erwantoro
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jl. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: haninafina@gmail.com

ABSTRACT

When we talk about the history, we cannot be separated from the figures and their stories. The figures are certainly the central icon in every major historical event, so in history science we have a biography which specially tells the history of the figures. Since biography is part of the history science, biography is more likely to study the enclosed figures which are enumerated by the scientific terms in history science. Therefore in order to write people's biography, firstly a biographer has to understand the connection among the history, events, and the figures. Finally, after understanding them, the biographer has to take another step to the comprehension, the essence, and the duty from the biography. The comprehension of the concepts that have been mentioned earlier can lead a biographer to an appropriate biography in accordance with the goal of the history.

Keywords: history, events, figures, biography.

PENDAHULUAN

Dalam dunia kesejarahan dapat dipastikan kita akan menemukan sederetan tokoh dan peristiwa. Tokohnya disebut tokoh sejarah dan peristiwanya disebut peristiwa sejarah. Dalam pengamatan sepintas lalu ada orang yang menyimpulkan bahwa sejarah adalah sekumpulan tokoh dan peristiwa yang dianggap bersejarah.

Pendapat yang sepintas lalu itu ternyata sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh sejarawan Inggris Thomas Carlyle (1795 – 1881) dan James A. Froude (1818 – 1894). Mereka mengatakan bahwa sejarah adalah tidak lain dari riwayat hidup orang-orang besar (*Great Man Theory*). Bagi mereka sejarah adalah biografi kolektif (Barnes, 1963: 189-190). Pandangan itu berpengaruh pada banyak orang baik pada tataran teoretis maupun pada tataran praktis. Sejak Thomas Carlyle dan James A. Froude melontarkan pendapatnya itu, biografi orang-orang besar banyak dihasilkan bahkan sampai sekarang. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang besar adalah para negarawan, kaisar, raja, panglima perang, jenderal, para nabi, dan sebagainya. Pada sisi lain sejalan dengan perkembangan ilmu sejarah kecenderungan untuk menghadirkan peran orang-orang biasa dalam sejarah meningkat. Menurut kubu ini, bukan orang besar saja yang berperan dalam sejarah, orang kecil juga berperan. Dengan demikian, bermunculanlah kajian-kajian sejarah yang mengupas peran orang kecil dalam peristiwa sejarah.

Dari dua pendapat di atas kita dapat menyimpulkan, manusia “baik itu orang besar maupun orang kecil” berperan dalam sejarah. Persoalan yang muncul kemudian ialah: *Pertama*, bagaimanakah peran manusia dalam sejarah? *Kedua*, siapakah yang dimaksud dengan tokoh sejarah? *Ketiga*, peristiwa yang bagaimanakah yang

dikatakan sebagai peristiwa bersejarah itu? *Keempat*, apa yang dimaksud dengan biografi?

Berangkat dari empat pertanyaan itulah, penulis mencoba untuk mencari jawabannya. Jawaban itu mudah-mudahan dapat memperjelas kedudukan manusia dalam sejarah, memberi batasan siapa yang disebut tokoh sejarah, dan memperjelas apa yang dimaksud dengan peristiwa yang bersejarah itu, serta bagaimana menulis biografi seorang tokoh. Penulis berharap, apa yang dibahas pada makalah ini dapat bermanfaat untuk kita semua khususnya di dalam upaya memahami dan mengawetkan sejarah bangsa kita. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya (baca para tokoh sejarahnya).

BAHASAN

PERAN MANUSIA DALAM SEJARAH

Untuk mengetahui peranan manusia dalam sejarah kita dapat mendekatinya melalui pengertian ilmu sejarah itu sendiri. Fuad Hasan (dalam Latief, 2006: 1) menulis bahwa sejarah adalah manifestasi yang khas manusiawi; pengenalan sejarah merupakan kenyataan yang dapat kita telusuri sejak perkembangan kemanusiaan yang paling dini, sejauh masa itu meninggalkan jejak-jejaknya melalui perwujudan tertentu. Dari goresan berupa lukisan sampai tulisan, dokumen sampai monumen, manusia sepertinya ingin menandai kehadirannya dalam suatu masa, dan rekaman yang ditinggalkannya itu diharapkan kemudian hari dapat menjadi petunjuk tentang kehadirannya itu. Berikutnya, sejarah menurut Robert V. Daniels (1966: 3) adalah memori pengalaman umat manusia. Adapun menurut Sidi Gazalba (1981: 13) sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk

sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian tentang apa yang telah berlalu. Menurut Henry Steele Commager (1965: 3), sejarah merupakan rekaman keseluruhan tentang masa lampau meliputi kesusastraan, hukum, bangunan, pranata sosial, agama, filsafat, pokoknya semua yang teringat dalam memori manusia. Menurut Helius Syamsudin (2007: 199-200), sejarah adalah kajian tentang kegiatan-kegiatan manusia yang merupakan manifestasi dari pikiran, perasaan, dan perbuatannya pada masa lalu.

Dari kelima definisi tersebut jelaslah bahwa manusia merupakan unsur utama dalam sejarah, sehingga menurut Latief (2006: 36-38), tanpa manusia mustahil sejarah dapat dihadirkan, baik sebagai proses maupun sebagai kisah sejarah. Sejarah ditentukan oleh manusia. Tidak ada manusia tentu tidak akan ada yang namanya sejarah. Hal yang demikian itu disebabkan, dari semua makhluk yang diciptakan hanya pada diri manusia terdapat potensi yang memungkinkan untuk sebuah proses sejarah. Sejarah hanya bisa terjadi dalam suatu dinamika. Di dalam dinamika muncul perubahan-perubahan, dengan kata lain yang tidak dinamis tidak berubah. Di dalam diri manusia terdapat karakter dinamis itu, artinya manusia berubah. Perubahan-perubahan kemanusiaan inilah yang kemudian memberlakukan proses sejarah.

Jelaslah bahwa manusia merupakan elemen mutlak dalam sejarah. Artinya, sejarah membutuhkan manusia. Pada konteks ini, posisi manusia dalam sejarah berperan sebagai subyek sekaligus obyek dalam sejarah. Sebagai subyek manusia berperan sebagai pembuat sejarah dan memang pada kenyataannya hanya manusia yang membuat sejarah. Oleh sebab, hanya manusia yang membuat sejarah, konsekuensinya manusia berkewajiban untuk selalu menjejarah, dalam pengertian manusia harus selalu berada dalam

arus dan rotasi sejarah.

TOKOH DAN PERISTIWA SEJARAH

Pertanyaan yang sering kali muncul dalam pikiran kita, sosok dan peristiwa yang bagaimanakah yang pantas dijadikan tokoh dan peristiwa sejarah? Harus diakui dalam benak penulis (mungkin juga dalam pikiran banyak orang), seorang tokoh sejarah adalah seorang yang “besar” dan peristiwa sejarah adalah peristiwa yang juga yang tidak kalah “besarnya”. Jarang asosiasi kita mengarah kepada orang-orang kecil kalau kita mendengar kata tokoh. Begitu juga dengan peristiwa, pikiran kita tidak terarah pada kejadian keseharian, bila kita mendengar kata peristiwa sejarah. Apakah yang kita pikirkan itu benar, marilah kita lihat catatan sejarah.

Keingintahuan orang tentang sosok ketokohan dalam peristiwa sejarah telah mendorong lahirnya studi tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (*individual life history*). Secara historis, studi tokoh sudah lama digunakan orang. Studi tokoh sudah dilakukan oleh sejarawan Yunani kuno dan juga oleh sejarawan Islam seperti Ibnu Khaldun dan terus berlangsung sampai sekarang. Studi tokoh itu sendiri mempunyai tujuan umum berupa upaya memahami ketokohan seorang individu dalam suatu komunitas tertentu, melalui pandangan-pandangannya yang mencerminkan pandangan warga dalam komunitas yang bersangkutan. Menurut Arief Furchan dan Agus Maimun (2005: 9) secara spesifik tujuan studi tokoh adalah untuk: (1) memperoleh gambaran tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi sang tokoh tentang bidang yang digelutinya, (2) memperoleh gambaran tentang teknik dan strategi yang digunakannya dalam melaksanakan bidang yang digelutinya, (3) memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk

keberhasilan sang tokoh terkait dengan bidang yang digelutinya, dan (4) dapat mengambil hikmah dari keberhasilan sang tokoh.

Dari tujuan yang hendak dicapai itu, studi tokoh mengharuskan peneliti dapat memandang sang tokoh dalam konteks keseluruhan kehidupannya, mulai dari lahir sampai saat penelitian dilakukan. Peneliti juga harus dapat memandang seorang tokoh dalam kaitannya dengan sejarah zamannya dan menyelidiki bagaimana arus sosial, budaya, politik, dan ekonomi mempengaruhi sang tokoh. Peneliti harus dapat menemukan titik temu antara kehidupan seorang tokoh dengan sejarah masyarakatnya.

Namun demikian, kita kembali lagi pada persoalan semula, yaitu siapa yang layak disebut tokoh? Menurut Arief Furchan dan Agus Maimun (2005: 11-12), tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya serta ketokohnya diakui secara mutawahir. Dari batasan itu dapat disimpulkan bahwa seorang tokoh harus mencerminkan empat indikator, yaitu: (1) Berhasil di bidangnya. Istilah berhasil menunjuk pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan-tujuan tertentu (baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang) berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya. (2) Mempunyai karya-karya monumental. Sebagai tokoh, ia harus mempunyai karya-karya yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, baik berupa karya tulis maupun karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang dapat dilacak jejaknya. Artinya, karya itu masih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu merupakan karya sang tokoh. (3) Mempunyai pengaruh pada masyarakat. Artinya, segala pikiran dan aktivitas sang tokoh betul-betul dapat dijadikan rujukan dan panutan oleh masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sesuai dengan bidang yang digelutinya. (4)

Ketokohan diakui secara mutawahir. Artinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan sang tokoh, sebagian besar warga masyarakat memberikan apresiasi positif dan mengidolakannya sebagai orang yang pantas menjadi tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sesuai dengan bidangnya.

Melalui studi tokoh telah jelas apa yang dapat dijadikan kriteria di dalam menyeleksi seseorang untuk dijadikan obyek studi mengenai ketokohnya. Sekarang bagaimana dengan peristiwa? Peristiwa apa yang dapat dikategorikan ke dalam peristiwa sejarah?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita mau tidak mau harus merujuk pada metodologi sejarah. Dari definisi tentang sejarah yang telah diuraikan di muka, kita tentu sepakat bahwa sejarah menyangkut tentang masa lampau. Persoalannya masa lampau itu luas tanpa batas. Bisa dimulai dari detik yang baru dilalui sampai entah kapan bukti-bukti sejarah dapat menunjukkan. Bahkan lebih sulit lagi adalah, apakah yang harus dimasukkan ke dalam masa lampau yang nyaris tanpa batas itu? Gempa bumi? Banjir? Perang? Revolusi? Atau apa lagi? Demikian tidak terhingga peristiwa alam dan kemanusiaan yang telah terjadi (Abdullah, 1985: x). Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa konsep masa lampau itu barulah ada artinya jika pembatasan telah dilakukan. Pembatasan yang paling awal yang harus dilakukan ialah menyangkut dimensi waktu. Sejak kapan sampai apabila. Yang perlu mendapat perhatian mengenai permasalahan sampai apabila, maka yang paling menentukan bukanlah materi yang dibicarakan, tetapi pendekatan yang dipakai. Maksudnya, peristiwa yang kemarin bisa dianggap sebagai bagian dari penelitian sejarah, jika kejadian itu dilihat dari prespektif proses yang sedang berjalan. Memang hal ini jarang terjadi, tetapi begitulah kalau kita mau mengatakannya secara ekstrem. Apa yang disebut sejarah kotemporer tidak terlalu merisaukan urusan sampai apabila itu. Yang penting ialah menjawab pertanyaan metodologis, “dapatkah

si sejarawan mengambil jarak dari sasaran yang dibicarakannya?” Pembatasan yang kedua ialah periode-periode, yang dianggap suatu kesatuan tertentu, berdasarkan beberapa patokan yang telah ditentukan, baik secara konvensional dan umum diterima, maupun secara individual, yaitu sesuai dengan sasaran perhatian sejarawan. Menurut teori, setiap periode, yang dikenakan pada unit-unit sejarah tertentu, mengisyaratkan adanya suatu karakteristik yang dominan.

Pembatasan waktu barulah tahap awal. Kalau sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, maka apa saja yang dimaksud dengan peristiwa tersebut? Kecenderungan yang semakin umum sekarang ini ialah pemusatan perhatian pada peristiwa yang menyangkut manusia, atau lebih tepat, tindakan dan perilaku manusia. Sebab itulah ada seorang ahli yang mengatakan bahwa sasaran sejarah bukanlah peristiwa, tetapi peristiwa yang disengaja, jadi suatu perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, berbagai peristiwa alam tidaklah penting bagi dirinya, tetapi lebih berfungsi sebagai salah satu kekuatan yang bisa ikut mempengaruhi peristiwa yang disengaja itu (Abdullah, 1985: xi).

Mekipun batasan waktu dan tindakan manusia telah dapat kita sepakati, pertanyaan berikutnya adalah “Apakah semua tindakan manusia pada masa lampau yang tertentu itu harus masuk sejarah?” Jika benar demikian, sejarah belum mengenal batas yang sesungguhnya. Dalam setiap menit yang dilalui entah berapa jumlah tindakan manusia yang telah terjadi. Sejarah yang seperti ini bukan saja hal yang tidak mungkin—mana ada catatan dan ingatan atau bahkan benda yang akan sanggup merekam kesemuanya, langsung atau pun tidak—tetapi juga sama sekali tidak berfaedah. Oleh karena itu, di samping pembatasan waktu dan pelaku, maka tempat pun menjadi batasan sejarah. Secara praktis dan metodologis, sejarah haruslah diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Namun

demikian, hal itu juga ternyata belumlah cukup, bukankah tindakan manusia itu begitu banyak ragamnya? (Abdullah, 1985: xii).

Jika demikian, pengertian dimensi waktu dari sejarah lebih dulu perlu pula diperjelas. Tidak bisa segala peristiwa di hari lalu pada diri masing-masing dianggap sejarah. Pembunuhan di sini, perkawinan di situ; pemberontakan di suatu tempat dan perjanjian aliansi militer di tempat lain, dan entah apa lagi, belumlah boleh dikatakan sejarah. Semua itu barulah letupan-letupan atau kepingan-kepingan yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari sejarah. Semua itu barulah bisa dianggap sejarah kalau masing-masing terkait atau bisa dikaitkan dalam konteks historis. Artinya, kalau masing-masing kepingan itu merupakan bagian dari suatu proses, atau dinamika, yang sedang menjadi perhatian sejarawan. Dengan begini unsur seleksi telah ikut menentukan. Tidak semua peristiwa tindakan manusia pada masa lalu itu bisa dimasukkan dalam konteks historis (Abdullah, 1985: xii).

Hanyalah tindakan atau hasil tindakan –apa pun jenis dan coraknya – yang penting dan berkaitan dengan proses sejarah yang akan lulus seleksi. Kalau demikian, ukuran penting dan berkaitan, atau relevan, harus ditentukan pula. Pada corak tindakan yang serupa barang kali tidaklah akan terlalu sukar untuk menentukan derajat penting dan relevan itu, misalkan perkelahian di kantor kecamatan tidaklah sepenting upaya kudeta di pusat pemerintahan. Akan tetapi, susahnya tindakan manusia tidak sama coraknya. Selain hal-hal yang menyangkut kekuasaan, ada juga perbuatan yang mengenai aspek-aspek pemenuhan kebutuhan ekonomis, ekspresi estetis, persaingan kehormatan dan wibawa, pemenuhan rasa ingin tahu, dan entah apa lagi. Persoalan muncul lagi, dikarenakan berbagai corak tindakan itu seringkali saling berkaitan dan terlibat pula dalam hubungan kausal (Abdullah, 1985: xiii).

Pada konteks inilah, pengerjaan sejarah sebagai usaha rekonstruksi hari lampau itu hanyalah mungkin dilakukan apabila pertanyaan pokok telah dirumuskan. Dalam upaya mencari jawab terhadap pertanyaan pokok itulah ukuran penting atau tidaknya bisa diperoleh. Ketika pertanyaan yang telah dirumuskan itu menyangkut masalah peralihan kekuasaan, sudah jelas bahwa proses pembentukan berbagai kekuatan politik mendapat tempat yang lebih tinggi daripada misalnya, kualitas cat yang dipakai oleh seorang pelukis terkenal. Dengan demikian, selain menjadi ukuran penting atau tidaknya suatu tindakan, pertanyaan pokok itu juga merupakan alat untuk menentukan manakah hal-hal yang bisa dijadikan sebagai fakta sejarah. Atau dengan kata lain, pertanyaan pokok itu berfungsi pula untuk menentukan manakah hal-hal yang perlu dicari kebenaran historisnya agar bisa dianggap sebagai fakta – sebagai sesuatu yang berfungsi dalam usaha menjawab pertanyaan pokok yang telah dirumuskan itu. Dengan begitu, tentu jelas juga, bahwa secara teoretis dapat dikatakan fakta sejarah itu belum ada, sebelum pertanyaan dirumuskan (Abdullah, 1985: xiii).

BIOGRAFI

Di atas telah diuraikan bagaimana kaitan antara tokoh, peristiwa, dan sejarah. Dalam perspektif ilmu sejarah, upaya mengisahkan seorang tokoh dalam perjalanan hidupnya dikenal dengan istilah biografi. Menurut Kuntowijoyo (2003: 203):

“Biografi adalah catatan tentang hidup seseorang. Biografi adalah sejarah, sama halnya dengan sejarah kota, negara, atau bangsa. Sayang banyak biografi ditulis, tidak oleh sejarawan tetapi oleh pengarang dan jurnalis. Padahal biografi lebih *marketable* daripada buku-buku sejarah biasa”.

Adapun menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (1998: 120) “biografi adalah riwayat hidup, sebaiknya ditulis apabila orangnya sudah meninggal.” Ternyata unsur *marketable* itulah yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh para penulis biografi. Maka tidaklah aneh bila buku-buku biografi yang muncul lebih kepada upaya untuk “menaikkan prestise” seseorang daripada sebuah “kajian ilmiah.” Buku-buku biografi lebih mengutamakan untuk menghadirkan tokoh-tokoh populer dan masih hidup. Menanggapi fenomena itu, Abdullah (1977: 116) menulis:

Akhir-akhir ini biografi sebagai kisah lebih sering merupakan hasil kontrak kerja. Hasil yang diberikan sesuai dengan pesanan. Kadang-kadang tanpa adanya suatu usaha untuk menghadapkan diri si penulis biografi pada sasarannya. Karena itu bisa dimengerti mengapa biografi tersebut hanyalah berdimensi satu—si tokoh berbuat, dan perbuatannya kelihatan. Itu saja. Satu perbuatan diikuti oleh yang lain, seperti *slide* yang dipertunjukkan terpecah-pecah. Inilah gaya penceritaan yang pernah disebut seorang ahli kritik sastra *paratactic*—kalimat menciptakan imaji-imaji tanpa pendalaman dan keterangan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menulis biografi yang sesuai dengan dengan ilmu sejarah? Untuk menjawab pertanyaan itu marilah kita lihat pemikiran Abdulah (1977: 113-118) berikut ini:

1. Biografi sebaiknya menampilkan aspek-aspek manusiawi, yaitu gambaran individu atau manusia umumnya. Seorang tokoh bukanlah dewa! Si tokoh tidak perlu menjadi personifikasi dari nilai-nilai, dengan begitu si tokoh akan terhindar dari pelabelan yang serba superlatif.

2. Biografi bukanlah gambaran kemantapan, ketetapan, tetapi berkisar dari satu proses ke proses kehidupan. Artinya, biografi bukan hanya cerita pengalaman hidup, tetapi juga pengalaman itu sendiri.
3. Biografi seharusnya memperlihatkan hubungan yang jelas antara tokoh dengan lingkungannya, antara perbuatan dengan pikiran atau perasaan yang mendasarinya. Harus dijelaskan hubungan antara fakta dengan makna yang melekat padanya.
4. Dalam biografi harus ada kesadaran adanya dua subyek yang terlibat, yaitu si tokoh dan si pengisah. Hal yang demikian sangat penting untuk memahami bahwa kemampuan si pengisah memasuki alam perasaan dan fikiran si tokoh sangat terbatas. Jadi, tiada kepastian bahwa apa yang ditulis oleh si pengisah indentik dengan yang sesungguhnya dipikirkan oleh si tokoh.

Dari pemikiran Abdullah di atas kita baru mendapatkan rambu-rambu secara garis besarnya saja. Hal yang demikian itu tentu saja masih memerlukan pemikiran lain yang dapat membantu kita di dalam menulis sebuah biografi. Adam (2009: x) memberikan pembedaan antara biografi (ditulis orang lain), otobiografi (ditulis sendiri), memoar (memuat sepotong kehidupan tokoh atau tonggak peristiwa yang dianggap penting), dan posopografi (biografi kolektif). Menurutnya, biografi terletak di antara sejarah dan sastra sehingga orang menyebutnya “roman biografis” atau “roman memoar”. Adapun tujuan biografi bukanlah menilai melainkan untuk memahami pikiran dan tindakan pelaku sejarah. Pendapatnya itu ternyata disandarkan pada paham Dilthey yang menegaskan bahwa:

tugas sejarah (biografi adalah satu corak penulisan sejarah) adalah untuk “menangkap sistem interaksi antara kedalaman alam insani dan konteks universal dari kehidupan sejarah yang

luas.” Interaksi merupakan hubungan fundamental antar hidup itu sendiri dan sejarah dan inilah yang memberi pengaruh kepada tiap peristiwa sejarah (Adam, 2009: xi).

Dari pendapat Dilthey itu, Adam menyimpulkan ada dua tujuan dari biografi, yaitu: (1) mencoba menangkap dan menguraikan jalan hidup sang tokoh dengan lingkungan sosial-historis yang mengitarinya. Seorang seharusnya dilihat sebagaimana ia sesungguhnya berkembang bukannya sebagaimana masyarakat ingin melihatnya; (2) memberi “baju baru” kepada tokoh sejalan dengan simbol yang ingin diperteguh masyarakat untuk menjadikannya sebagai contoh atau kadang-kadang personifikasi dari simbol itu sendiri.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa di dalam menulis biografi yang sangat penting adalah memahami makna dan fungsi dari biografi itu sendiri. Menurut Abrar (2010: 9-22) makna biografi meliputi:

a. Kisah perjalanan hidup

Kisah perjalanan hidup yang dikisahkan haruslah perjalanan hidup yang menarik. Dikatakan menarik bila, pertama, memiliki nilai berita, seperti berpengaruh (terhadap kehidupan orang banyak), unik (kejadian yang sangat jarang terjadi), dekat (punya kedekatan dengan orang banyak). Kedua, warna yang dikandung perjalanan hidup itu. Semakin berwarna perjalanan hidup itu, semakin menarik kisahnya. Ketiga, nilai perjalanan hidup itu. Perjalanan hidup yang dikisahkan semestinya yang istimewa sehingga menimbulkan kekaguman. Keempat, konteks sosial, perjalanan hidup yang terlepas dari konteksnya akan terasa hampa.

- b. Sejarah anak manusia
Sebuah biografi sepantasnya menjadi kisah pengalaman jatuh-bangunnya seorang tokoh dalam mencapai posisinya yang sekarang. Pengalaman itu tentu mengandung berbagai episode, mulai dari masa kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Semua episode harus diceritakan dengan menarik sehingga dapat menimbulkan perasaan gembira, sedih, terhibur, terharu, dan sebagainya.
- c. Dokumentasi gagasan dan kekayaan intelektual
Sudah menjadi kenyataan bahwa publik akan sangat hormat dan kagum kepada tokoh yang memiliki banyak gagasan dan kaya secara intelektual. Dengan demikian, usaha pendokumentasian gagasan dan kekayaan intelektual sang tokoh dalam sebuah biografi menjadi suatu yang niscaya.
- d. Wahana melancong ke masa lalu
Waktu berjalan terus, ia tidak bisa diputar ulang, ia juga tidak mau menunggu yang ketinggalan. Akan tetapi, khalayak tidak boleh terbelenggu oleh waktu. Mereka harus bisa mengembara menembus waktu ke mana saja mereka mau. Dalam konteks itulah, biografi menjadi wahana melancong ke masa lalu.

Adapun mengenai fungsi dari sebuah biografi, Abrar (2010: 23-36) merincinya sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi
Fungsi utama sebuah kisah kehidupan manusia adalah menyediakan informasi bagi para khalayaknya. Informasi itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ada yang menggunakan sebagai pelajaran yang bernilai, ada pula yang ingin mencari makna yang lebih dalam dari peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh, bahkan ada yang

menggunakannya untuk bahan tulisan.

b. Menjawab teka-teki

Masa lalu merupakan sebuah misteri yang tidak henti-hentinya mengundang untuk dimasuki. Sebagai kisah masa lalu seorang tokoh, biografi juga memiliki fungsi mengungkapkan misteri masa lalu sang tokoh. Ia dapat memuaskan rasa penasaran khalayak. Ia bahkan dapat menjawab berbagai teka-teki atau spekulasi yang selama ini beredar di kalangan khalayak.

c. Mengenang sejarah

Untuk meyakinkan biografi dapat digunakan untuk mengenang sejarah, Nadhya mengutip pendapat Abdullah(1998: xv) sebagai berikut:

“Pada biografilah sesungguhnya kita mendapatkan unsur sejarah yang paling akrab, yaitu manusia yang berpikir dan bertindak; yang kecewa dan bahagia; yang sedih dan bahagia. Dalam biograf kita tidak saja berhadap-hadapan dengan dunia yang obyektif—sebagaimana bukti-bukti yang sah menunjukkan –tetapi juga lebih dimungkinkan untuk menangkap dan memahami dunia subyektif—sebagaimana dilihat, dirasakan dan dibangun oleh sang aktor,” tambahnya.

d. Menghibur

Suatu realitas bahwa khalayak tidaklah terhibur dengan fakta, yang selalu menghibur masyarakat adalah fiksi. Apakah sebuah biografi harus menyajikan fiksi agar dapat menghibur khalayak? Tentu saja kita tidak boleh menyajikan fiksi dalam biografi. Tetapi, kita boleh mengemas fakta tentang tokoh mengikuti format fiksi, katakanlah novel. Kita bisa mengisahkan penderitaan tokoh sebagai akibat perlakuan

pihak yang jahat. Kita bisa menambahkan kisah sang tokoh melawan kejahatan itu sehingga akhirnya dia keluar menjadi pemenang. Tegasnya, kita menjadikan kemenangan tokoh sebagai klimaks kisah.

Pada awal membaca kisah seperti ini, khalayak tentu simpati pada tokoh yang kita kisahkan. Mereka marah pada pihak yang jahat. Lama-lama mereka terharu pada perjuangan sang tokoh melawan penjahat. Akhirnya, dia senang bahwa sang tokoh bisa mengalahkan penjahat. Maka tanpa terasa sebenarnya khalayak merasa terhibur dengan kisah dalam biografi itu.

PENUTUP

Nampaknya jelas bagi kita bahwa manusia menjadi faktor dan pemegang peran utama. Manusia bertanggung jawab atas kesinambungan dan perubahan sejarah. Manusia menentukan jalannya peristiwa-peristiwa (Lucey, 1984: 93; Romein, 1956: 20). Begitulah, sejarah terus menerus melahirkan orang-orang hebat yang namanya tidak lekang ditelan zaman. Sepanjang waktu, halaman-halaman kehidupan senantiasa menyediakan tempat untuk mencatat prestasi tertinggi yang dapat diraih anak manusia. Sejarah diisi oleh rangkuman perjalanan hidup, baik pergulatan fisik, spiritual, maupun proses kreatif seseorang hingga mencapai titik kulminasi dan menemukan posisi terbaik dalam hidupnya akan selalu menjadi inspirasi yang menggugah orang-orang lain yang hidup sezaman, apalagi generasi selanjutnya. Sayangnya, tidak semua kiprah pembentuk sejarah itu terdokumentasi ke dalam sajian pustaka (biografi) sehingga kehadiran mereka dapat dimaknai dengan lebih baik. Tidak jarang hal besar yang telah mereka lakukan tidak diketahui publik hanya karena tidak ada literatur yang menjebantani

dan menembus batas ruang dan waktu antara tokoh-tokoh tersebut dengan masyarakat (Muhammad, 2003: v). Pada konteks inilah penulisan biografi terasa begitu penting bagi kesinambungan sejarah manusia.

Akhirnya, oleh karena manusia yang membuat sejarah, sudah sepantasnya setiap individu menjadi sejarawan, paling tidak sejarawan untuk dirinya sendiri (*every man is own historians*).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. 1985.

Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif.
Diredaksi oleh Taufik Abdullah dan Abdurrachman
Surjomihardjo. Jakarta: PT Gramedia.

-----, 1998.

“Menteri Agama Republik Indonesia: Sebuah Pengantar Profil Biografis”. Dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (editor), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS dan PPIM.

-----, 1977.

“Mengapa Biografi” dalam PRISMA 8, Agustus 1977. Hal. 113-118.

Abrar, Ana Nadhya. 2010.

Bagaimana Menulis Biografi: Perspektif Jurnalisme.
Yogyakarta: CV. Emerson.

Adam, Asvi Warman. 2009.

Membedah Tokoh Sejarah: “Hidup atau Mati”. Yogyakarta: Ombak.

- Barnes, Harry Elmer. 1962.
A History of Historical Writing. New York: Dover
 Publication. Inc.
- Commager, Henry Steele. 1965.
The Nature and The Study of History. Columbus, Ohio:
 Merrill.
- Daniels, Robert V. 1986.
Studying History: How and Why? New Jersey: Prentice Hall
 Inc.
- Gazalba, Sidi. 1981.
Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Kuntowijoyo. 2003.
Metodologi Sejarah. Edisi 2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latief, Juraid Abdul. 2006.
Manusia, Filsafat, dan Sejarah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lucey, William Leo. 1984.
History: Methods and Interpretation. New York & London:
 Garland Publishing Inc.
- Muhammad, Aulia A. 2003.
*Bayang Baur Sejarah: Sketsa Hidup Penulis-penulis Besar
 Dunia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Romein, Jan. 1956.
*Aera-Eropa. Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari
 Pola Umum*. Bandung: Ganaco N.V.
- Syamsuddin, Helius. 2007.
Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Tim Penyusun Kamus P3B. 1988.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

TRADISI PEMBERIAN DALAM UPACARA TRADISIONAL

Irvan Setiawan

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung

Jln. Cinambo No. 136 Bandung

Email: kamaliasetiawan@yahoo.co.id

ABSTRACT

Culture is a set of values, norms and other forms of peoples' lives through various types of relationships that hold the essence of cultural values. Therefore, the harmony of social life is determined by the harmony of their relationships with each other or their relationship with nature that has given them a living space for the community. Disharmony can occur because there are conflicts or disasters that destroy the harmony of relationships. The effort to tie back the harmonious relationship can be done by performing the ritual of giving. Stages of the implementation of this giving ritual can be regarded as a flashback to the beginning of the formation of a community. Myths and legends play an important role in this community building process which is then used as the object of the giving tradition.

Keywords: Giving Tradition, Tradition ceremony

PENDAHULUAN

Dinamika kebudayaan pada saat ini sudah semakin banyak terjadi. Arus globalisasi dan modernisasi sebagai penyumbang terbesar dinamika kebudayaan menghasilkan beragam pergeseran kebudayaan atau bahkan perubahan kebudayaan. Bentuk pergeseran atau perubahan kebudayaan ini tidak lepas dari apa yang terangkum dalam definisi kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Sir Edward Taylor (Horton, 1996: 58; Harsojo, 1988: 92; Soekanto, 2003: 172) adalah “kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.” Masyarakat itu sendiri didefinisikan oleh Koentjaraningrat (2007: 118) sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Kebudayaan bersifat dinamis, dalam pengertian bahwa sebuah kebudayaan tidak stagnan dan berdiam pada satu titik. Sebuah arti yang mengisyaratkan bahwa kedinamisan kebudayaan terjadi pada seluruh wujud kebudayaan. J.J. Honigmann (dalam Koentjaraningrat, 2000: 5) membagi kebudayaan menjadi 3 wujud, yaitu:

1. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak dalam pengertian tidak dapat diraba atau dilihat. Produk dari wujud kebudayaan ini berupa tata kelakuan yang mengatur perbuatan manusia sesuai yang disepakati oleh kelompok kebudayaan.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas berpola. Pola aktivitas ini didasarkan atas ide, gagasan, nilai dan norma

sehingga tercipta pola perilaku yang tertata dan sesuai nilai dan norma suatu budaya tertentu.

3. Wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Tata kelakuan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aktivitas saja melainkan dapat pula berbentuk benda-benda yang dihasilkan melalui proses aktivitas

Koentjaraningrat (1996: 74) kemudian menyarankan bahwa untuk melihat ketiga wujud kebudayaan tersebut perlu dibagi dalam empat lingkaran konsentris yang dipadukan dengan tujuh unsur kebudayaan (bahasa, sistem organisasi, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian). Melalui empat lingkaran tersebut dapat dilihat bahwa lingkaran paling luar (1) melambangkan kebudayaan dari segi artefak, (2) merupakan lingkaran yang melambangkan kebudayaan dalam wujud perilaku berpola, (3) merupakan lingkaran kebudayaan dilihat dalam wujud ide dan gagasan, dan (4) merupakan inti dari kebudayaan yang berisi sistem gagasan dan ideologi.

Kebudayaan akan terus bergerak dan berubah karena pengaruh modernisasi, gaya hidup, atau bahkan bencana alam yang meluluhlantakkan sistem budaya yang telah tercipta sebelumnya. Melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang tidak berubah dari kebudayaan adalah perubahan kebudayaan itu sendiri. Dalam sebuah perubahan kebudayaan, turut pula disertakan perubahan sosial. Lauer (1993: 8) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah norma berkelanjutan, tetapi menurut arah yang berbeda di berbagai tingkat kehidupan sosial dengan berbagai tingkat kecepatan.

Banyak hal yang dahulunya merupakan produk kebudayaan kemudian berkembang dan digunakan secara luas oleh masyarakat

yang disertai dengan pengurangan nilai kesakralan secara drastis. Naskah kuno, prasasti atau tulisan yang berisi pemberitahuan atau perintah yang pada masanya dahulu merupakan produk sakral yang sangat dihormati isi dan maknanya. Saat ini, nilai kesakralan dari sebuah pemberitahuan sudah mengalami penurunan drastis atau bahkan tidak ada sama sekali. Apalagi pembuatan tulisan sudah tidak melalui serangkaian tahapan sakral melainkan dicetak dan diproduksi dalam jumlah sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan teknologi modern.

Perubahan nilai dan makna pemberian bingkisan juga mengalami penurunan nilai dan makna secara drastis. Kado, bingkisan, parcel pada saat ini seakan sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi individu atau sekelompok masyarakat sebagai sebuah ucapan terima kasih, hadiah, atau sekedar bentuk lain dari upaya mempererat silaturahmi. Perilaku yang dianggap sudah membudaya pada saat ini bukan berarti memang terjadi hanya pada era modernisasi saja. Meski memiliki perbedaan bentuk, tahap, dan makna, tradisi pemberian berupa bingkisan atau apapun jenisnya sudah ada sejak dahulu melalui serangkaian upacara atau ritual. Landasan tradisi pemberian yang dilakukan dalam serangkaian kegiatan upacara atau ritual tradisional dilalui dengan membubuhi konsep magis sebagai pertanda bahwa tradisi tersebut memang sah dan direstui oleh *karuhun* atau penguasa gaib.

Sejalan dengan masuknya agama Islam, sedikit demi sedikit tradisi pemberian mulai disusupi dengan pengesaan kepada Allah Swt. Tahapan ritual berupa pemberian bingkisan tetap dilakukan namun dengan pengalihan maksud dan tujuan yang diselaraskan antara ajaran agama Islam dan kepercayaan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Keselarasan ini tampak berjalan lancar karena

memang proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan mengalihkan maksud dan tujuan dari ritual atau adat istiadat masyarakat menjadi bentuk pengagungan kepada Allah Swt.

Mitos atau legenda memegang peranan cukup penting dalam ritual pemberian. Seperti halnya dengan kisah Sangkuriang dan Tangkuban Perahu seakan memberi roh yang mampu melogikakan alam pikiran individu atau kelompok masyarakat mengenai sebuah objek yang memang nyata adanya. Terlepas dari benar atau tidaknya sebuah kejadian pada masa dahulu, mitos atau legenda akan terus menjadi panutan individu atau kelompok apabila mereka memang percaya dan meyakini apa isi dari mitos atau legenda tersebut. Tentunya pada saat ini, sedikit demi sedikit alam pikiran masyarakat sudah mulai mengikis rasa percaya mereka pada adanya mitos tersebut. Ketidakesesuaian antara alam pikiran tradisional dengan modern menjadi penyebab timbulnya rasa ketidakpercayaan mereka terhadap mitos atau legenda yang dahulunya sangat diyakini.

Peran penting mitos atau legenda dalam tradisi pemberian turut memberikan sumbangan dalam menjaga keharmonisan hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya. Secara detail, Kluckhohn dan Strodbeck (Koentjaraningrat, 1990: 78) memberi istilah nilai budaya. Konsepsi mengenai isi dari nilai budaya yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan menurut Kluckhohn dan Strodbeck menyangkut paling sedikit lima hal, yaitu 1) masalah *human - nature*, atau makna hidup manusia; 2) masalah *man - nature*, atau makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya; 3) masalah *time*, atau persepsi manusia mengenai waktu; 4) masalah *activity*, atau soal makna dari pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia, dan 5) masalah *relational*, atau hubungan manusia dengan sesama manusia. Kelima masalah tersebut sering disebut sebagai

orientasi nilai budaya (*value orientation*). Berdasarkan orientasi nilai budaya yang memilah hubungan-hubungan yang terjadi pada manusia, tradisi pemberian pun turut menyesuaikan diri dengan pilahan tersebut. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan tradisi pemberian dengan menggunakan orientasi nilai budaya yang kemudian dirangkum menjadi 2 jenis hubungan, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.

Tradisi Pemberian yang Menjaga Keharmonisan Hubungan antara Manusia dengan Alam

Sangat mudah sebenarnya apabila hendak mengetahui bentukan budaya yang bertajuk pemberian. Dalam ritual mengagungkan Sang Pencipta atau leluhur, kerap ditemukan ritual pemberian sedekah baik dalam bentuk makanan atau pun uang. Hal seperti ini dapat dilihat dari ritual mengunjungi tempat keramat dengan maksud agar keinginan atau rencana yang telah disusun sebelumnya dapat terlaksana. Susunan sesajen telah disiapkan sebelumnya kemudian ditaruh di dekat tempat keramat tersebut.

Tempat keramat yang dimaksud tidak hanya dalam sosok lokasi angker berupa pohon atau batu namun dapat juga mengambil lokasi di daerah sungai, pantai, dan gunung. Ritual yang mengambil lokasi di wilayah pantai di antaranya adalah sedekah laut. *Upacara Sedekah Laut* seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi dinamakan dengan *Upacara Labuh Saji*. *Upacara Labuh Saji* merupakan upacara turun temurun nelayan di Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk memberikan penghormatan kepada seorang putri yang bernama Nyi Putri Mayang Sagara karena telah berbuat kebaikan terhadap nelayan. Selain itu, tujuan ritual pemberian bingkisan juga dimaksudkan agar Nyi Putri Mayang Sagara tetap

memberikan berkah dan keselamatan pada nelayan saat melaut. Tradisi ini telah diyakini berlangsung sejak abad ke-15 melalui ritual pemberian “bingkisan” kepada penguasa laut selatan tersebut. Bingkisan utama yang diberikan berupa kepala kerbau. Irianti (2011: 42 – 45) menyebutkan ada berbagai jenis bingkisan lainnya yang ditaruh dalam *jampana*, yaitu:

- *Tukik* (Penyu),
- Kain (4 meter kain putih, 1 meter kain merah, 4 meter kain hijau, kain sarung poleng, baju kebaya, kerudung warna kuning, dan kain batik),
- Alat-alat rias (sisir, cermin, pensil alis, *eye shadow*, bedak, *lipstick*, minyak wangi, tusuk konde, dan *harnet*),
- Bunga rampai (mawar, melati, kenanga, dahlia, daun pandan, daun hanjuang merah, madat, kemenyan),
- Buah-buahan (nanas, semangka, melon, duku, jeruk, apel, lengkeng, konyal, manggis, pisang raja, pisang ambon, pisang emas), dan
- Minuman (kopi manis, kopi pahit, wedang jahe, teh manis, dan teh pahit).

Lokasi pantai identik dengan mata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan wilayah daratan adalah identik dengan masyarakat petani. Hal upacara pemberian yang dilakukan oleh nelayan seperti yang dilakukan dalam *Upacara Labuh Saji* di Sukabumi, dilakukan juga oleh masyarakat petani melalui upacara yang di dalamnya berisi ritual pemberian bingkisan seperti halnya *Upacara Ruwatan Bumi* yang dilakukan oleh masyarakat Banceuy di Kabupaten Subang. Nyi Pohaci menjadi pemeran utama dalam upacara ini. Menurut legenda, Nyi Pohaci adalah seorang perempuan yang dirawat oleh Nini Kantayani dan Aki Kantayani yang kemudian

menjelma menjadi tanaman padi. Nyi Pohaci adalah anak asuh dari Dewa Anta. Ia (Nyi Pohaci) semasa hidupnya lebih senang hidup di lumbung padi. Setelah meninggal, ia kemudian menjadi tanaman padi melalui proses *surup* (merasakan/kemasukan roh leluhur), *sumerep* (roh leluhur masuk ke dalam sukma), dan *sumaning* (kerasukan arwah leluhur). Masyarakat Banceuy mempercayai bahwa Nini dan Aki Kantayani adalah leluhur mereka sehingga perlu diadakan ritual untuk menghargai jasa Nyi Pohaci. Hodijah (2010: 82 – 88) mengatakan bahwa di antara tahap pelaksanaan, ritual pemberian sesajen dilakukan dengan menyediakan beberapa jenis bahan sesaji yang ditaruh dalam *nyiru*, *bokor*, *tetenong* dari bambu dan *ranggap*. Jenis sesaji tersebut adalah:

- *Lemareun* (daun sirih, kemenyan, cerutu, rokok, apu, dan tembakau),
- Pucuk manik (ketan dan telur),
- 5 ekor ayam hitam, 1 ekor kerbau jantan,
- Rujak-rujukan (rujak asem, rujak kelapa, dan rujak pisang),
- Aneka bumbu dapur, nasi tumpeng (nasi kuning yang di dalamnya berisi ikan asin),
- Beberapa butir kelapa dan serabut kelapa,
- Telur,
- Gula,
- Kopi,
- Aneka macam bunga (mawar, melati, dan kenanga), dan
- Aneka daun (daun hanjuang, daun tebu, daun jawer kotok, daun beringin, daun handarusa, daun telaga meneng, dan daun talas).

Bingkisan atau yang diberikan kepada “Sang Penguasa” juga diberikan dalam serangkaian *Upacara Hajat Wawar* di Kabupaten Sumedang. Sedikit berbeda dengan latar belakang *Upacara Hajat Wawar* dengan *Upacara Ruwatan Bumi*. *Upacara Hajat Wawar* lebih bertemakan bencana alam yang tidak hanya dari kelabilan kondisi tanah (gempa dan longsor) melainkan juga bencana yang berasal dari udara (angin puting beliung), berasal dari air (banjir), dan api (kebakaran).

Ritual *Hajat Wawar* sudah ada sejak tahun 1880-an, yaitu tahun di mana telah terjadi bencana kebakaran hebat yang membumihanguskan Desa Nagrak. Angraeni (2010: 71 – 72) mengatakan bahwa tujuan ritual ini kemudian diperluas tidak hanya sekedarantisipasi terhadap bencana kebakaran. Rusaknya hasil pertanian, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, dan gempa yang dapat merugikan masyarakat juga menjadi pertanda bahwa *Upacara Hajat Wawar* harus segera dilakukan. Bingkisan atau pun sesajen kemudian disiapkan berupa: ketupat, *bakakak hayam*, cerutu, rujak (terdiri dari rujak asem, rujak pisang, rujak roti, rujak *surawung*), kopi pahit, kopi manis, air putih, dan kemenyan. Setiap keluarga di Desa Nagrak juga diwajibkan membawa sesajen berupa nasi tumpeng beserta lauk pauknya (urab, ikan, telur, dan kentang). Melalui pemberian sesaji tersebut diharapkan alam sebagai milik Sang Penguasa dapat lebih berbaik hati pada penduduk terutama di Desa Nagrak Kabupaten Sumedang.

Tradisi Pemberian yang Menjaga Keharmonisan Hubungan antar Sesama Manusia

Dalam hubungan antar manusia terdapat konsep-konsep yang dituangkan dalam sistem budaya yang menjaga agar di antara individu atau pun kelompok pendukung kebudayaan tertentu dapat

saling menjaga keharmonisan komunikasi melalui tradisi pemberian. Tentunya ada latar belakang yang membuat terciptanya ritual tersebut. Kaitan dengan unsur keagamaan atau kepercayaan memiliki latar belakang cukup kuat dalam ritual tersebut untuk menjaga kepatuhan dan sekaligus memberi semangat agar pendukung kebudayaan dapat terus melaksanakan ritual ini.

Berbeda halnya dengan ritual pemberian yang menjaga hubungan antara manusia dengan alam, di mana bingkisan yang telah disediakan oleh sekelompok masyarakat pendukung ritual tersebut kemudian diberikan kepada Sang Penguasa Alam beserta isinya. Ritual pemberian untuk menjaga hubungan antar manusia diberikan oleh individu kepada individu atau sekelompok individu melalui serangkaian tahapan. Dua contoh dalam ritual ini adalah ritual *Saum Maleh* di Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, dan ritual *Tawurji* di Kabupaten Cirebon.

Tradisi *Saum Maleh* di Jatinegara Kaum ini dapat dikatakan sudah dianggap punah karena kesulitan dalam mencari bahan baku (batang pisang) serta penerangan sudah tidak lagi menggunakan obor. Sementara itu, wilayah masyarakat pendukung yang merupakan penduduk asli Jatinegara Kaum sudah mulai tercampur dengan para pendatang yang tentu saja kurang mengetahui atau tidak memiliki respons positif terhadap tradisi *Saum Maleh* ini.

Tradisi *Saum Maleh* dilaksanakan pada hari ke-27 saat bulan puasa. Kebiasaan atau tradisi ini dilakukan dalam bentuk pemberian makanan ringan kepada anak-anak. Tahap dalam tradisi ini dimulai dengan persiapan membuat obor oleh setiap rumah dengan bahan yang terdiri dari satu ruas bambu yang diberi sumbu dan minyak tanah sebanyak 1 liter. Obor yang telah selesai tersebut kemudian diletakkan di depan rumah masing-masing dan dinyalakan setiap

malamnya. Sebenarnya pembuatan obor ini dimulai sejak malam pertama pada bulan puasa dan dinyalakan setiap malamnya hingga akhir bulan puasa. Selain obor, dibuat juga *tong tong* (kentongan) untuk lebih menyemarakkan bulan puasa. Tong tong baru dapat ditabuh setelah taraweh berakhir. Mereka menabuh tong tong hingga menjelang subuh dan dilakukan setiap malam bulan puasa.

Dua peralatan tersebut (obor dan tong tong) menjadi alat pendukung dalam adat *Saum Maleh*. Dapat dikatakan demikian karena obor dan tong tong menjadi penting artinya karena pada zaman dahulu penerangan masih sangat minim sementara kesunyian saat malam hari dapat membuat anak-anak enggan untuk ke luar rumah.

Pada malam ke-27 setelah setelah shalat taraweh, anak-anak membentuk kelompok dan berjalan menghampiri setiap rumah sambil menyanyikan lagu *Saum Maleh* dengan syair sebagai berikut:

*Saum Maleh,
menta kuweh,
lamun henteu dibere kuweh,
leweh*

Artinya:

Saum Maleh

Minta kue

Kalau tidak diberi kue

Menangis

Sebelum mereka datang, sang empunya rumah terlebih dahulu menyediakan kue-kue serta uang yang ditaruh pada batang pohon pisang. Batang pohon pisang terlebih dahulu ditancapkan di

depan rumah kemudian pada sekelilingnya ditancapkan lidi-lidi untuk menaruh uang atau kue-kue berbentuk segitiga yang dibungkus daun andung. Anak-anak yang datang ke rumah tersebut kemudian langsung menuju batang pisang yang telah ditancapkan berbagai macam kue dan uang tersebut. Dan, dengan serta merta mereka mengambil seluruh kue dan uang yang ditancapkan di batang pisang tadi. Kemeriahan dan kegembiraan tampak tersirat pada wajah anak-anak ini.

Hampir sama halnya dengan ritual *Saum Maleh* di Jakarta Timur, ritual *Tawurji* di Kabupaten Cirebon juga mengambil tema serupa yang menampilkan anak-anak sebagai pemeran utama dalam ritual ini. Tradisi *Tawurji* masih berjalan hingga saat ini karena masyarakat merespons ritual yang berlatarbelakang amanah dari para wali Songo. Keterkaitan dengan Wali Songo dalam tradisi *Tawurji* ini dilatarbelakangi oleh mitos dimusnahkannya ajaran Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemahabang atau Syekh Jabaranta yang konon dapat menyesatkan umat Islam. Syekh Siti Jenar selama hidupnya memiliki 40 anak asuh. Setelah Syekh Siti Jenar wafat maka 40 anak asuhnya terlantar. Dewan 9 wali (*Wali Songo*) kemudian memerintahkan agar setiap rumah memberikan santunan kepada 40 anak asuh Syekh Siti Jenar.

Awalnya, tradisi atau ritual *Tawurji* ini diadakan setiap hari Selasa di bulan Safar. Aturan hari ini terus berlaku hingga tahun 1970-an. Setelah itu, aturan hari ini menjadi semakin tidak ditaati, yaitu tidak hanya dilakukan pada bulan Safar saja. Yang mereka pegang adalah nama harinya saja, yaitu hari Selasa. Dengan demikian, tradisi ini kerap dilaksanakan pada hari Selasa.

Ritual ini dilaksanakan oleh sekelompok anak-anak berusia antara SD – SMP. Mereka menggunakan kopianh lengkap dengan

188

sarung yang disilangkan dan tanpa alas kaki. Mereka kemudian berjalan kaki berkeliling kampung. Pada tiap-tiap rumah, mereka menyanyikan lagu dengan syair sebagai berikut:

Wur tawur Ji, tawur Selamat dawa umur

Artinya:

Sawer Tuan Kaji ... sawer, selamat panjang umur

Tawurji terdiri dari dua kata yaitu “tawur” dan “ji”. “Tawur” berarti menaburkan dan “ji” adalah tuan kaji (haji). Istilah Haji yang diucapkan dalam nyanyian anak-anak tersebut adalah status yang terhormat di kalangan masyarakat Cirebon. Dengan penyebutan istilah Haji tersebut setidaknya memberikan rasa bangga pada pemilik rumah/toko dan dengan senang hati mereka keluar rumah sambil membawa dan menaburkan uang – biasanya recehan – kepada anak-anak. Mereka kemudian saling berebut mengambil uang yang ditaburkan sang pemilik rumah tersebut.

Keharmonisan hubungan antar manusia juga dapat dilihat dari segi profesi. Salah satu di antaranya adalah pada profesi sebagai pelaku seni. Sangat tidak nyaman apabila sebuah pertunjukan kesenian berjalan tidak sesuai dengan pakem karena ada gangguan baik disebabkan oleh manusia atau pun dari pengaruh magis. Gangguan tersebut mengakibatkan hubungan antara penonton dan pelaku pertunjukan berjalan tidak harmonis. Oleh karena itu, praktek ritual pemberian kerap dilaksanakan agar hubungan antara penonton dan pelaku pertunjukan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kepercayaan akan adanya unsur gaib, pelaku pertunjukan kesenian kerap melaksanakan ritual pemberian baik pada saat menjelang atau pun pada pelaksanaan kesenian. Pemberian bingkisan kepada karuhun dimaksudkan agar kesenian yang hendak dipentaskan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan baik

dari penonton atau pun hal-hal yang berbau gaib. Pelaksanaan ritual pemberian bingkisan di antaranya adalah pada kesenian Topeng Betawi, yaitu ritual *Ngukub* yang dilakukan sebelum pementasan. Probonegoro (1987: 256 – 258) mengatakan bahwa Istilah “*Ngukub*” berasal dari bahasa Jawa yang artinya mengasapi kain supaya harum baunya. Ritual *Ngukub* ini dilakukan oleh kepala *panjak* topeng dengan cara membakar kemenyan sehingga asapnya memenuhi seluruh ruang pertunjukan. Asap kemenyan ini dianggap sebagai media antara pembaca doa dengan karuhun. Diharapkan setelah membaca doa, pertunjukan yang akan diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar.

Doa atau mantra dianggap tidak lengkap tanpa adanya sesaji. Beberapa jenis sesaji yang ditaruh di lokasi pertunjukan Topeng Betawi adalah: bekakak ayam, kelapa, rujak-rujukan sebanyak 7 rupa, kembang tujuh rupa, kue tujuh rupa, rokok lisong, rokok cerutu, kopi pahit, kopi manis, teh manis, teh pahit, limun, pisang satu sisir, beras, bumbu dapur, satu piring nasi beserta lauk pauk, dan kemenyan.

Tradisi pemberian juga dapat dilihat dari hubungan antara individu dengan kelompok. Latar belakangnya dapat digali dari banyak hal namun faktor penggagas dari terciptanya sebuah kelompok tersebut memegang peranan penting yang berfungsi sebagai pengikat individu untuk tetap menjalin kerja sama dengan kelompok. Penggagas yang dimaksud biasanya seorang tokoh – yang telah wafat - yang memiliki massa pendukung cukup banyak baik berasal dari kerabat, pengagum, atau pun bawahannya. Salah satu bentuk tradisi pemberian yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah pada tradisi *Nyiramkeun* di Kabupaten Majalengka. Fungsi utama dari upacara atau tradisi *Nyiramkeun* ini adalah untuk

menghormati leluhur dan mempererat silaturahmi keturunan atau warga dari kerajaan Talaga Manggung.

Zakiyudin (2010: 66 – 67) mengatakan bahwa Tradisi *Nyiramkeun* di Kabupaten Majalengka dilaksanakan pada hari Senin tanggal belasan di Bulan Safar. Sebuah upacara yang telah berjalan selama beberapa generasi dari keturunan Keprabonan Talaga yakni pada tahun 1820-an. Tahun tersebut adalah tahun kepindahan pemerintahan Talaga manggung ke Sindangkasih oleh Belanda. Tahun tersebut menandakan awal pemerintahan Majalengka dan akhir dari pemerintahan Talaga Manggung di bawah kepemimpinan Pangeran Arya Sacanata atau Eyang Regasari. Kepindahan tersebut berarti turut memindahkan barang-barang termasuk benda-benda pusaka kerajaan Talaga Manggung. Beberapa benda pusaka yang akan disucikan melalui upacara *Nyiramkeun* adalah patung Raden Panglurah dan Dewi Simbakarna, keris, berbagai macam gerabah, genta, gong renteng, meriam kuno, koin kuno, dan baju *kere*.

Air untuk upacara *Nyiramkeun* diambil dari tujuh mata air yang berada di wilayah Kecamatan Talaga Majalengka dan dimasukkan dalam kendi. “Tujuh mata air tersebut masih memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Talaga Manggung.

Menurut Zakiyudin (2010: 77 – 78), bahwa mata air tersebut merupakan bagian dari sesaji yang akan digunakan dalam upacara *Nyiramkeun*. Jenis sesaji lainnya adalah

- Tumpeng tiga warna (putih, merah, dan kuning),
- Bunga setaman (daun pandan, bunga melati, bunga mawar, dan kemenyan),
- Air kelapa,
- Jeruk nipis,

- Berbagai jenis wajit, dan
- *Seba*/seserahan kepada kepala desa di Kecamatan Talaga (biasanya berbentuk hasil bumi).

Tradisi pemberian kepada leluhur dalam bentuk sesaji dalam upacara *Nyiramkeun* di Kabupaten Majalengka memiliki kesamaan dengan upacara *Nyangku* di Kabupaten Ciamis. Sedikit perbedaan dari kedua upacara tersebut adalah bahwa leluhur dalam upacara *Nyiramkeun* berasal dari unsur pemerintahan, sementara leluhur dalam upacara *Nyangku* lebih bersifat pada ulama yang dahulunya menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Panjalu Kabupaten Ciamis. Kesamaannya terletak pada tujuan, pemberian sesaji, dan pencucian benda pusaka. Rincian benda pusaka tersebut menurut Soleh (2010: 126 – 127) berupa Pedang *Dulfiqor*, Kujang Panjalu, gongg kecil, *bangreng*, *pancarowo* dan keris komando. Keseluruhan benda keramat tersebut memiliki beragam fungsi.

- a. Pedang *Dulfiqor*. Pedang ini bertuliskan lafadz *Lapabista Ali ya Ali Alladulfiqor Wa Ali Wasohbihi Azmain La Saefi Illa Dulfiqor Lafatta Illa Aaliya Karomallohu Wajhahu*. Fungsi pedang ini adalah senjata pembela diri dan media untuk berdakwah.
- b. Kujang Panjalu. Fungsi senjata ini adalah sebagai alat beladiri. Peristiwa yang turut menyertakan peran kujang Panjalu adalah ketika berupaya menolong Bongbang Kencana dari kukungan Dangdang yang menutupi kepalanya. Hanya dengan Kujang Panjalu inilah Dangdang tersebut dapat dipecahkan.
- c. Gongg kecil. Fungsi benda ini adalah sebagai alat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa raja/pemerintah akan menyampaikan sesuatu.
- d. *Bangreng*. Fungsi alat ini adalah sebagai sarana bela diri.
- e. *Pancarowo* dan keris komando. Sama halnya dengan bangreng, kujang panjalu dan pedang *Dulfiqor*, yaitu sebagai senjata

untuk membela diri dari serangan musuh. Keris Komando adalah keris kebesaran di kerajaan Soko Panjalu.

Tujuan dari upacara *Nyangku* pada masanya dahulu adalah untuk mengumpulkan masyarakat guna mendengarkan dan memahami dakwah Islam. Saat ini fungsi tersebut ditambah yaitu sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi di antara warga Panjalu. Sesaji yang diberikan dalam upacara *Nyangku* kini lebih menekankan pada simbol penghormatan kepada leluhur mereka. Unsur magis seakan terlupakan atau bahkan ditiadakan, meski masih ada kepulan asap kemenyan sehingga suasana sakral masih cukup terasa dalam upacara *Nyangku*.

PENUTUP

Tradisi pemberian merupakan bagian dari ritual yang cukup penting dan menjadi pemeran kunci dalam seluruh rangkaian upacara yang memiliki tujuan menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam kaitannya dengan alam, tradisi pemberian memiliki hubungan sebab akibat yang menjadi latar belakang dari terbentuk dan terlaksananya sebuah ritual. Faktor alam yang tidak *kondusif* membuat sektor ekonomi masyarakat yang sangat mengandalkan alam sebagai mata pencaharian utama menjadi terganggu. Keyakinan bahwa unsur magis sebagai penyebab dari ketidaknyamanan kondisi alam ini begitu kental dan harus ditindaklanjuti dalam bentuk ritual yang di dalamnya berisi tahap pemberian berupa penyerahan sesaji kepada unsur gaib yang menjadi penguasa di lingkungan sekitar tempat tinggal atau tempat melakukan kegiatan ekonomi.

Kekentalan unsur gaib pada tradisi pemberian yang bertujuan menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam berbanding terbalik dengan tradisi pemberian yang erat kaitannya dengan

penjagaan keharmonisan hubungan antar manusia. Meski di dalamnya masih ada tahap-tahap yang berbau magis, hubungan antar manusia yang berujung pada upaya mempererat tali silaturahmi ini telah mengalami pemudaran keyakinan akan legenda atau mitos yang menjadi latar belakang terlaksananya upacara tersebut. Mitos pemusnahan ajaran Syekh Siti Djenar seperti yang tampak dalam latar belakang tradisi *Tawurji* di Cirebon tampak sudah kehilangan rohnya. Yang tampak pada saat ini hanyalah sekelompok anak kecil yang mendatangi rumah-rumah sambil menyanyikan *Tawurji* dengan harapan sang pemilik rumah menaburkan uang kepada anak-anak tersebut. Begitu juga halnya dengan tradisi pemberian yang terkait dengan profesi seperti yang dilakukan dalam ritual tari Topeng Betawi. Saat ini tradisi pemberian semacam itu sudah sangat jarang atau bahkan tidak dilakukan lagi.

Kedua bentuk ritual tersebut di atas (*Tawurji* dan ritual tari Topeng Betawi) memang mengalami pemudaran makna dalam hal pemberian bingkisan. Hal ini disebabkan pendukung dan pelaksana ritual tersebut bukan berasal dari sebuah komunitas. Tradisi pemberian yang dilakukan dalam sebuah komunitas seperti yang dilakukan dalam upacara *Nyiramkeun* dan upacara *Nyangku* memang sedikit demi sedikit juga turut pula mengalami pemudaran makna kesakralannya. Walaupun demikian, pendukung dari kedua tradisi tersebut masih tetap dengan setia setiap tahap dalam upacara. Pemeliharaan keyakinan akan kesakralan dari upacara tersebut dilakukan di antaranya dengan mengkisahkan kembali peran tokoh-tokoh yang menjadi pendiri dari ritual tersebut dalam berbagai bentuk syair atau pun doa-doa. Apalagi di dalamnya juga dilakukan tahap pencucian benda pusaka yang secara tidak langsung membuktikan bahwa legenda yang melatarbelakangi ritual tersebut memang benar ada. Melalui pencucian benda pusaka, masyarakat

yang masih meyakini kebenaran legenda tersebut kemudian menganggap bahwa air bekas cucian benda pusaka memiliki khasiat atau kekuatan tertentu yang memudahkan individu dalam melaksanakan suatu kegiatan atau maksud.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. Venny. 2010.

“Kajian tentang Nilai-nilai Budaya Pelaksanaan Tradisi Upacara Tolak Bala di Desa Nagrak Kabupaten Sumedang : Studi Deskriptif tentang Upacara Tolak Bala di Desa Nagrak Kabupaten Sumedang”. Skripsi. Bandung: UPI

Harsojo. 1988.

Pengantar Antropologi. Bandung: Binacipta.

Hodijah, Ijah. 2010. *“Upacara Adat Ruwatan Bumi di Kampung Banceuy Kabupaten Subang”*. Skripsi. Bandung: UPI.

Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. (1996). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

Irianti, Lely. 2011. *“Upacara Labuh Saji di Pelabuhan Ratu Sukabumi”*. Skripsi. Bandung: UPI.

Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

-----, 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.

-----, 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

-----, 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

BATIK TULIS DAN CAP VERSUS PRINTING BATIK
Ria Intani T.

BATIK CIMAH
Lasmiyati

MAKANAN KHAS DAERAH CIREBON
Hermana

PENGKAJIAN NASKAH KUNA
Agus Heryana

KOTA SUKABUMI DALAM LINTASAN SEJARAH
Herry Wiryono

PERISTIWA BERDARAH DI RAWAGEDE
Adeng

KEMANDIRIAN PANGAN PADA MASYARAKAT TRADISIONAL
Nina Merlina

SELINTAS SEJARAH KECAMATAN UJUNG BERUNG
Euis Thresnawaty S

BIOGRAFI
Heru Erwantoro

TRADISI PEMBERIAN DALAM UPACARA TRADISIONAL
Irvan Setiawan

BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG
Jalan Cinambo 136 Ujungberung - Bandung 42094
Telp. / Fax. (022) 7804942
Email: bpsntbandung@gmail.com
www.bpsnt-bandung.blogspot.com



Bunga Rampai
"Pelestarian Budaya dan Sejarah"

Perpustakaan
Jenderal Ke
306.4
BU